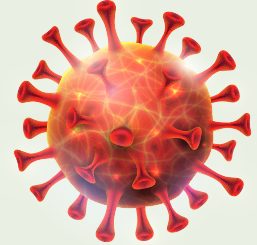


KEPENDUDUKAN INDONESIA



Penanggulangan Covid-19 dalam Kerangka Teori Kependudukan Malthus
Aswatini Raharto

Pertimbangan Demografis di Tengah Pandemi COVID-19: Kebijakan Pembatasan Perjalanan ke Provinsi Papua
Jevon E. M. Nahuway, Johni R. V. Korwa

Pentingnya Revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi COVID-19
Max Regus

COVID-19 dan Penundaan Kepulangan Migran Pelajar Indonesia di Luar Negeri
Inayah Hidayati

Potensi Pola Aliran Mudik pada Masa Pandemi COVID-19
Ari Purwanto Sarwo Prasajo, Yulinda Nurul Aini, Dwiyaniti Kusumaningrum

Persepsi Masyarakat akan Pentingnya *Social Distancing* dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia
Nina Novira, Rudi Iskandar, Raehanul Bahraen

Inisiatif Masyarakat Indonesia di Masa Awal Pandemi COVID-19: Sebuah Upaya Pembangunan Kesehatan
Marya Yenita Sitohang, Angga Sisca Rahadian, Puguh Prasetyoputra

Dampak Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Gender di Indonesia
Ikfina Chairani

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia
Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba

Lessons from COVID-19: Small and Financially Strong Family
Thomas Soseco

Produktivitas Selama *Work From Home*: Sebuah Analisis Psikologi Sosial
Agung Minto Wahyu, Mochammad Sa'id

Mempersiapkan Ketahanan Keluarga selama Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi COVID-19
Maulana Rezi Ramadhana

Kesehatan Mental Masyarakat: Mengelola Kecemasan di Tengah Pandemi COVID-19
Deshinta Vibriyanti

Dinamika Perubahan Relasi Kiai Santri pada 'Ngaji Online' di Masa Pagebluk COVID-19
Samsul Arifin

Kesenjangan Kualitas Layanan Pendidikan di Indonesia pada Masa Darurat COVID-19: Telaah Demografi atas Implementasi Kebijakan Belajar dari Rumah
Indah Pratiwi, Bakti Utama

Wabah Virus Korona dan Momentum Evaluasi Rezim Ketahanan Pangan di Indonesia
Anggalih Bayu Muh. Kamim

Profil Penduduk Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Meninggal: Kasus Indonesia dan DKI Jakarta
Deny Hidayati

Trapped Populations: Menangani Pandemi COVID-19 untuk Penyintas Bencana di Kota Palu
Abdul Fikri Angga Reksa

Data Activism and COVID-19 in Indonesia
Ibnu Nadzir

Teknologi Kecerdasan Buatan, *Big Data Analysis*, dan *Internet of Things*: Potensi dan Perannya dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia
Syahrul Mubaroq, Inas Mufidatul Insiyiroh

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Edisi Khusus	Demografi & COVID-19	1- 114	Jakarta, Juli 2020	ISSN 1907-2902
-------------------------------	--------------	----------------------	--------	--------------------	----------------

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA-EDISI SPESIAL COVID-19 & DEMOGRAFI

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah - masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan jurnal peer reviewed diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK - LIPI). Selain diterbitkan dua kali setahun, JKI menerbitkan edisi khusus untuk mendokumentasikan penelitian terbaru terkait isu aktual dalam lingkup kependudukan. Edisi khusus Demografi dan COVID-19 di Indonesia terbit ditengah derasnya publikasi dari sektor epidemiologi dan kedokteran. Edisi khusus ini diterbitkan diantara nomor 1 dan 2 volume 15 tahun 2020. Sejumlah 20 artikel pendek diterbitkan dalam edisi khusus COVID-19, ditulis dalam Indonesia dan Inggris. Terdapat sembilan tema antara lain migrasi, gender, ketahanan pangan hingga analisis gerakan sosial penyediaan data COVID-19.

Penanggung Jawab	Dr. Herry Jogaswara
Ketua Dewan Editor	Dra. Mita Noveria, M.A
Editor Pelaksana	Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc
Pemeriksa Naskah	Zainal Fatoni, M.P.H Intan Adhi Perdana Putri, M.Si Tria Anggita Hafisari, M.U.R.P
Editor Tata Letak	Intan Adhi Perdana Putri, M.Si Ari Purwanto Sarwo Prasajo, S.Si
Korektor	Zainal Fatoni, M.P.H
Mitra Bestari	Prof. Aswatini Raharto Dr. Herry Jogaswara Dr. Nawawi Dr. Augustina Situmorang Dr. Rusli Cahyadi Dra. Mita Noveria, M.A. Dra. Ade Latifa Soetrisno, M.Hum Drs Bayu Setiawan, M.P.S., M.A. Widayatun, S.H., M.Hum Devi Asiati, S.E., M.S. Gusti Ayu Ketut Surtiari, S.Si., M.Si Zainal Fatoni, S.K.M., M.P.H. Anggi Afriansyah, M.Si
Alamat Redaksi	Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI, lantai X Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia Tromol Pos 250/JKT 1002, Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106 Fax: +62 21 5207205 <i>E-mail:</i> jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id <i>Website:</i> http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id ; www.kependudukan.lipi.go.id
Penerbit	Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI, lantai X Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli, 2020

Penanggulangan COVID-19 dalam Kerangka Teori Kependudukan Malthus
Aswatini Raharto

Pertimbangan Demografis di Tengah Pandemi COVID-19: Kebijakan Pembatasan Perjalanan ke Provinsi Papua
Jevon E. M. Nahuway, Johni R.V. Korwa

Pentingnya Revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi COVID-19
Max Regus

COVID-19 dan Penundaan Kepulangan Migran Pelajar Indonesia di Luar Negeri
Inayah Hidayati

Potensi Pola Aliran Mudik pada Masa Pandemi COVID-19
Ari Purwanto Sarwo Prasajo, Yulinda Nurul Aini, Dwiyantri Kusumaningrum

Persepsi Masyarakat akan Pentingnya *Social Distancing* dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia
Nina Novira, Rudi Iskandar, Raehanul Bahraen

Inisiatif Masyarakat Indonesia di Masa Awal Pandemi COVID-19: Sebuah Upaya Pembangunan Kesehatan
Marya Yenita Sitohang, Angga Sisca Rahadian, Puguh Prasetyoputra

Dampak Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Gender di Indonesia
Ikfina Chairani

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia
Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba

Lessons from COVID-19: Small and Financially Strong Family
Thomas Soseco

Produktivitas Selama *Work From Home*: Sebuah Analisis Psikologi Sosial
Agung Minto Wahyu, Mochammad Sa'id

Mempersiapkan Ketahanan Keluarga selama Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi COVID-19
Maulana Rezi Ramadhana

Kesehatan Mental Masyarakat: Mengelola Kecemasan di Tengah Pandemi COVID-19
Deshinta Vibriyanti

Dinamika Perubahan Relasi Kiai Santri pada 'Ngaji Online' di Masa Pagebluk COVID-19
Samsul Arifin

Kesenjangan Kualitas Layanan Pendidikan di Indonesia pada Masa Darurat COVID-19:
Telaah Demografi atas Implementasi Kebijakan Belajar dari Rumah
Indah Pratiwi, Bakti Utama

Wabah Virus Korona dan Momentum Evaluasi Rezim Ketahanan Pangan di Indonesia
Anggalih Bayu Muh. Kamim

Profil Penduduk Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Meninggal: Kasus Indonesia dan DKI Jakarta
Deny Hidayati

Trapped Populations: Menangani Pandemi COVID-19 untuk Penyintas Bencana di Kota Palu
Abdul Fikri Angga Reksa

Data Activism and COVID-19 in Indonesia
Ibnu Nadzir

Teknologi Kecerdasan Buatan, *Big Data Analysis*, dan *Internet of Things*: Potensi dan Perannya
dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia
Syahrul Mubaroq, Inas Mufidatul Insiroh

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Edisi Khusus Demografi dan COVID-19 Tahun 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Editorial	vii
<i>Abstract</i>	ix
Penanggulangan COVID-19 dalam Kerangka Teori Kependudukan Malthus <i>Aswatini Raharto</i>	1-6
Pertimbangan Demografis di Tengah Pandemi COVID-19: Kebijakan Pembatasan Perjalanan ke Provinsi Papua <i>Jevon E. M. Nahuway, Johni R.V. Korwa</i>	7-10
Pentingnya Revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi COVID-19 <i>Max Regus</i>	11-14
COVID-19 dan Penundaan Kepulangan Migran Pelajar Indonesia di Luar Negeri <i>Inayah Hidayati</i>	15-20
Potensi Pola Aliran Mudik pada Masa Pandemi COVID-19 <i>Ari Purwanto Sarwo Prasajo, Yulinda Nurul Aini, Dwiyantri Kusumaningrum</i>	21-26
Persepsi Masyarakat akan Pentingnya <i>Social Distancing</i> dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia <i>Nina Novira, Rudi Iskandar, Raehanul Bahraen</i>	27-32
Inisiatif Masyarakat Indonesia di Masa Awal Pandemi COVID-19: Sebuah Upaya Pembangunan Kesehatan <i>Marya Yenita Sitohang, Angga Sisca Rahadian, Puguh Prasetyoputra</i>	33-38
Dampak Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Gender di Indonesia <i>Ikfina Chairani</i>	39-42
Dampak Pandemi COVID-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia <i>Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba</i>	43-48

<i>Lessons from COVID-19: Small and Financially Strong Family</i> <i>Thomas Soseco</i>	49-52
Produktivitas Selama <i>Work From Home</i> : Sebuah Analisis Psikologi Sosial <i>Agung Minto Wahyu, Mochammad Sa'id</i>	53-60
Mempersiapkan Ketahanan Keluarga selama Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi COVID-19 <i>Maulana Rezi Ramadhana</i>	61-68
Kesehatan Mental Masyarakat: Mengelola Kecemasan di Tengah Pandemi COVID-19 <i>Deshinta Vibriyanti</i>	69-74
Dinamika Perubahan Relasi Kiai Santri pada ' <i>Ngaji Online</i> ' di Masa Pagebluk COVID-19 <i>Samsul Arifin</i>	75-80
Kesenjangan Kualitas Layanan Pendidikan di Indonesia pada Masa Darurat COVID-19: Telaah Demografi atas Implementasi Kebijakan Belajar dari Rumah <i>Indah Pratiwi, Bakti Utama</i>	81-86
Wabah Virus Korona dan Momentum Evaluasi Rezim Ketahanan Pangan di Indonesia <i>Anggalih Bayu Muh. Kamim</i>	87-92
Profil Penduduk Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Meninggal: Kasus Indonesia dan DKI Jakarta <i>Deny Hidayati</i>	93-100
<i>Trapped Populations</i> : Menangani Pandemi COVID-19 untuk Penyintas Bencana di Kota Palu <i>Abdul Fikri Angga Reksa</i>	101-104
<i>Data Activism and COVID-19 in Indonesia</i> <i>Ibnu Nadzir</i>	105-108
Teknologi Kecerdasan Buatan, <i>Big Data Analysis</i> , dan <i>Internet of Things</i> : Potensi dan Perannya dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia <i>Syahrul Mubaroq, Inas Mufidatul Insiroh</i>	109-114

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA*p-ISSN : 1907-2902 (Print)**e-ISSN : 2502-8537 (Online)***KATA PENGANTAR**

Pandemi Covid 19 yang telah diumumkan awalnya oleh *World Health Organization* (WHO) pada akhir tahun 2019, hingga saat ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang serius dari sisi kesehatan, ekonomi dan kestabilan politik dari suatu negara, termasuk memberikan suatu gambaran wajah dari kebijakan pada saat krisis serta perilaku masyarakat dalam menghadapi situasi ini. Berhadapan dengan permasalahan seperti ini, salah satu tugas ilmu pengetahuan adalah mencoba memahami situasi yang terjadi dengan melakukan proses produksi ilmu pengetahuan yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah, sekaligus proses yang memperkaya pengembangan teori, konsep dan metode dari ilmu pengetahuan tersebut.

Pusat Penelitian Kependudukan, sebagai bagian dari Kedeputusan bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK LIPI), telah terlibat dalam proses produksi ilmu pengetahuan tersebut melalui berbagai cara yang saling bergandengan, yaitu terlibat dalam kaji cepat terkait kebijakan membuka identitas pasien terkonfirmasi COVID-19, kebijakan mudik dan moda transportasi, efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kajian dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja, perbandingan antar negara dalam pembuatan kebijakan dampak COVID-19, mengukur persepsi masyarakat terkait *zoonosis*, terlibat konsorsium Sistem Kesehatan Nasional, berbagai diskusi publik melalui webinar terkait kebijakan mudik, pekerja migran Indonesia dan sebagainya. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan baik secara individu maupun kelompok terlibat dalam kerja-kerja gugus tugas, kelompok kerja, kajian bersama organisasi pemerintah dan non-pemerintah.

Proses produksi ilmu pengetahuan ini sangat perlu untuk didokumentasikan secara tertulis dan dipublikasikan, agar dapat dibaca oleh publik yang lebih luas untuk berbagai kepentingan, sehingga dapat menjadi dasar dari suatu pembuatan kebijakan, maupun sitasi untuk pengembangan teori, konsep dan metode khususnya dalam ilmu kependudukan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) membuat edisi khusus terkait situasi pandemic COVID-19 untuk merangkum pandangan-pandangan para peneliti, akademisi, dan siapapun yang menggunakan ilmu kependudukan sebagai pijakan metodologisnya. Terdapat 20 tulisan dari hasil seleksi reviewer yang ditampilkan dalam JKI edisi khusus ini. Tentunya sebagai sebuah jurnal ilmiah terakreditasi (SINTA 2), semua tulisan-tulisan yang ditampilkan berbasis pada *evidence* yang kuat dari penelitian/kajian terbaru maupun *stock of knowledge* dari para penulisnya yang mempunyai rekam jejak ilmu kependudukan.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Sdri Mita Noveria, M.A. *editor in chief* JKI dan jajaran redaksinya, Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc. editor edisi khusus “Demografi dan Covid 19”, *reviewer* serta ucapan selamat kepada para penulis artikel yang telah berkontribusi dalam edisi khusus. Sejak awal, saya sangat mengapresiasi dan mendukung terbitnya edisi khusus ini. Semoga isi dari edisi khusus ini menjadi bagian untuk memahami permasalahan COVID-19 dari sisi ilmu kependudukan secara lebih baik.

Salam Sehat, Selamat Membaca !

Dr. Herry Jogaswara

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA*p-ISSN : 1907-2902 (Print)**e-ISSN : 2502-8537 (Online)***EDITORIAL**

Diawali dengan pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, pemerintah dan masyarakat menghadapi kebingungan bagaimana menghadapi dan bertahan di dalam pandemi ini. Kesimpangsiuran informasi diikuti dengan terbitnya berbagai kajian untuk menanggulangi wabah seringkali melupakan variabel demografi dan sosial dari dampak pandemi itu sendiri. Penyebaran COVID-19 yang cepat telah mengungkapkan perlunya memahami bagaimana dinamika penduduk berinteraksi dengan pandemi. Salah satu isu kebijakan yang paling mendesak terkait pandemi yang saat ini membunuh hampir 500 ribu warga dunia dimiliki oleh ilmu demografi. Bukan hanya mengkaji pola mortalitas maupun morbiditas yang berbeda antara kelompok maupun daerah. Pada saat yang sama kajian demografi dapat membantu melihat dan memproyeksikan dampak pandemi dan konsekuensi ekonominya terhadap dinamika populasi di masa depan. Oleh karena itu Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) melihat pentingnya untuk merangkum berbagai pandangan studi demografi dan sosial dalam sebuah edisi khusus berupa serangkaian artikel pendek.

Sejak Akhir April hingga pertengahan Juni 2020 Jurnal Kependudukan Indonesia memperoleh respon lebih dari 50 artikel pendek yang menyoroti perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia dalam perspektif demografi dan lensa kajian sosial, kependudukan di Indonesia. Penulis berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan institusi mewakili hampir semua wilayah geografis di Indonesia. Melalui hasil telaah dari mitra bestari dengan metode *blind review*, terpilih dua puluh tulisan untuk diterbitkan dalam edisi khusus JKI yang mengusung tema besar Demografi dan COVID-19 di Indonesia. Dalam rangkaian edisi khusus ini kita kembali diingatkan bahwa umur jenis kelamin dan struktur penduduk bukan hanya sekedar angka ketika pandemi terjadi. Ketiga variabel di atas tadi menjadi penentu apakah sebagai suatu bangsa Indonesia siap menghadapi bencana pandemi, bertahan dan siap kembali menghadapi kenormalan baru pasca pandemi.

Beberapa artikel yang terbit dalam edisi khusus adalah sebagai berikut; artikel utama dari edisi khusus ini ditulis oleh Profesor Aswatini. Sebagai pembuka artikel ini menggunakan kerangka analisis teori Malthus untuk mencermati upaya pengendalian wabah COVID-19 sebagai *preventive* dan *positive check* terhadap pandemi yang memicu disrupsi di dalam masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan dua artikel yang membahas kebijakan kependudukan di masa pandemi. Jevon E. M. Nahuway, Johni R.V. Korwa menulis kebijakan perjalanan di Provinsi Papua. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang berlandaskan kajian demografis diambil oleh pemerintah Papua adalah langkah tepat untuk pembatasan perjalanan (*travel restriction*) ke Provinsi Papua yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Berikutnya artikel dari Max Regus merefleksikan pentingnya revitalisasi modal sosial sebagai strategi jangka panjang menanggapi pandemi.

Pada artikel di dalam tema migrasi, Inayah Hidayati menulis pandemi COVID-19 menjadi alasan sebagian migran pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri untuk menunda kepulangannya. Berbagai faktor penghambat migrasi kembali seperti alasan kesehatan, keamanan, transportasi hingga aturan imigrasi negara setempat membuat para migran pelajar tetap tinggal di luar negeri hingga kondisi membaik. Sebaliknya, Ari Purwanto Sarwo Prasajo., dkk menulis pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi penduduk di Indonesia untuk melakukan kegiatan mudik selama pandemi. Dalam perspektif aktivitas di masa pandemi, Inisiatif yang muncul melalui kegiatan yang bertujuan memutus rantai penularan dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19 menunjukkan adanya proses adaptasi di tingkat masyarakat ditulis oleh Marya Yenita Sitohang dkk.,. Pada kajian gender, Ikfina Chairani menggarisbawahi

perlu adanya kebijakan yang responsif gender untuk menghindari kesenjangan gender yang semakin tinggi diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid-19.

Sorotan studi ketenagakerjaan ditulis oleh Ngadi dkk. Tulisan tersebut melihat pandemi COVID-19 telah menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK dengan mayoritas dari kalangan pekerja usia 15-24 tahun. Pada tingkat keluarga, Thomas Suseco mendorong tinjauan ulang pepatah banyak anak banyak rezeki. Analisisnya menunjukkan kesiapan keluarga untuk memiliki kekuatan finansial adalah ujung tombak saat menghadapi situasi ketidakpastian seperti pandemi ini.

Kajian tema keluarga dan kesehatan mental di tengah pandemi menjadi artikel terbanyak yang sampai ke meja redaksi. Secara individu, pandemi menyebabkan munculnya kecemasan akibat kegagalan beradaptasi. Deshinta Vibriyanti menulis ketahanan individu dapat berlangsung apabila proses penerimaan (*acceptance*) terhadap situasi pandemi dilakukan. Selain pada tingkat individu, ketahanan keluarga juga menjadi penting ketika menghadapi situasi sulit. Maulana Rezi Ramadhana menawarkan kajian ketahanan keluarga ditengah pandemi. Keluarga keluarga yang memiliki ketahanan dan beradaptasi menghadapi situasi yang baru dimiliki oleh keluarga tipe *joint family*, *nuclear family* yang tinggal di kawasan suburban fringe.

Sektor pendidikan juga dipaksa berbenah untuk terus melaksanakan proses belajar mengajar. Indah Pratiwi dan Bakti Utama melihat konsep belajar di rumah (BDR) telah membuka banyak celah ketimpangan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya di lingkungan pendidikan formal saja yang harus berbenah, Samsul Arifin menulis situasi pengajaran di lingkungan pesantren di masa pandemi.

Ketahanan pangan disaat pandemi tidak dapat diabaikan. Anggalih Bayu Muhammad Kamim menulis, COVID-19 membuka tabir kerapuhan dari rezim ketahanan pangan di Indonesia yang hingga saat ini bergantung pada pasokan pangan dari korporasi. Permasalahan lain yang seringkali terabaikan adalah kondisi penyintas bencana di tengah pandemi. Abdul Fikri Angga Reksa mencatat *trapped populations* yang hingga sekarang tinggal di tenda-tenda pengungsian berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19 yang sangat masif.

Bagian akhir rangkaian artikel pendek menyoroti gerakan sosial penyediaan data COVID-19 oleh warga serta pemanfaatan kecerdasan buatan dan *internet of things* (IoT) untuk mendukung PSBB. Kelemahan pemerintah untuk menyediakan data dan informasi mendorong gerakan aktivisme data (*data activism*) dalam melawan penyediaan informasi COVID-19. Ibnu Nadzir, menulis aktivisme ini belum tentu menjanjikan ketersediaan informasi di masa pandemi karena adanya konflik kepentingan antar otoritas penyedia informasi. Dibagian akhir, Syahrul Mubaroq dan Inas Mufidatul Insiyiroh mendorong pemerintah untuk mengkombinasikan kebijakan manual seperti pembatasan sosial dengan teknologi kecerdasan buatan dan IoT sebagai metode *location tracking* dalam mencegah transmisi virus.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mempercayakan tulisannya untuk diterbitkan pada Jurnal Kependudukan Indonesia. Selain itu kami ingin menghaturkan terima kasih kepada para mitra bestari yang telah berkontribusi dalam proses penelaahan artikel selama dua bulan terakhir. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Herry Jogaswara selaku Kepala Pusat Studi Kependudukan yang mendukung penuh terhadap penerbitan edisi khusus ini.

Terima kasih telah membaca Jurnal Kependudukan Indonesia dalam edisi khusus COVID-19.

Salam Sehat !

Editor Edisi Khusus Demografi dan COVID-19

Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc



Aswatini Raharto

COVID-19 COUNTERMEASURES IN VIEW OF THE MALTHUSIAN THEORY OF POPULATION

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 1-6

This paper was not necessarily discussing COVID-19 as Malthus' positive check, but it examines the current efforts to overcome and control the COVID-19 pandemic as a preventive and positive check. COVID-19 gives credence to the Malthusian Theory of Population. The key features of this model are that the preventive checks that should be carried out by men are not only limited to controlling the population through family planning but also to control the pressure on the existing resources. The two forces will act to restore equilibrium: preventive check and positive check. From the Malthusian theory, herd immunity in the time of COVID-19 regarded as a positive check. As Indonesia's home to more than 270 million population, the mortality rate likely uncontrollable. Thus herd immunity should not be chosen as a policy option.

Keywords : *COVID-19, herd immunity, malthusian theory, preventive and positive check*

Jevon E. M. Nahuway, Johni R.V. Korwa

DEMOGRAPHIC CONSIDERATIONS IN THE MIDST OF COVID-19: TRAVEL RESTRICTION POLICY TO PAPUA PROVINCE

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 7-10

Having a lot of children requires costs for fulfilling This paper aims to analyze travel restriction policy to Papua in the midst of the COVID-19 pandemic through a demographic lens. It finds that the travel restriction policy to Papua was not only influenced by non-demographic factors including politics, economy, health, but also by demographic factors such as mortality, fertility, and migration. There are several reasons for this. Firstly, the population of Papua remained small in comparison with other provinces across Indonesia; thereby imposing travel restrictions were in the best interest to lower the mortality rate in Papua due to COVID-19. Secondly, preserving fertility during the COVID-19 pandemic was vitally important regarding future generations and the government of Papua had demonstrated its ability to handle the situation by appointing several health centers particularly for pregnant women. Thirdly, people moving in and out of Papua currently became inevitable, thus migration should be limited for a while through the travel restriction policy

Keywords: *COVID-19, Indonesia, Papua, travel restriction*

Max Regus

THE IMPORTANCE OF REVITALIZING SOCIAL CAPITAL IN THE POST-COVID-19 PANDEMIC

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 11-14

The COVID-19 pandemic brings many crucial issues that had never been imagined before, and even the following situation could not be predicted comprehensively. The world, on a large scale, and every country and community must ensure that they can get through this situation. This article explicitly wants to analyze how the community and other actors deal with this pandemic situation based on social capital. This article focuses on social capital in a pandemic defined by the emergence of voluntary networks between communities. Social capital has become one of the strengths of people in many places in facing the spread of COVID-19. Learning from COVID-19, this article argues that revitalizing social capital is one of the strategic pathways in dealing with a pandemic situation

Keywords: COVID-19, Society, Social Capital Voluntary Networks, Indonesia

Inayah Hidayati

COVID-19 AND POSTPONED RETURN HOME OF INDONESIAN STUDENT MIGRANT ABROAD

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 15-20

The COVID-19 pandemic is the reason some Indonesian student migrants to delaying their return-home. Various factors that inhibit return migration such as health, security, transportation and local immigration rules make student migrants stay abroad. Objective: This research aims to understand the migration decision-making process of Indonesian student migrants abroad on postponed their return-home to Indonesia on May-December 2020. Methods: The data collected included quantitative from a survey and qualitative data from interviews. Result: The decision-making process for migrant students arises from themselves and strengthened by the family and community, including information from their social networks. The impact of some student migrants who delay their return is the economic situation, especially for students who rely on their scholarships. To relieve the burden on student migrant, the Indonesian government can provide daily need aid. The Indonesian government also need diplomate to educational institutions to reduce their tuition fees and extend residence permit

Keywords: student migrant, mobility, decision-making process, return migration, COVID-19

Ari Purwanto Sarwo Prasojo, Yulinda Nurul Aini,
Dwiyantri Kusumaningrum

**THE POTENTIAL OF "MUDIK" FLOWS
PATTERNS IN COVID-19 PANDEMIC**

Jurnal Kependudukan Indonesia

*Special Edition Demography and COVID-19, July
2020, Page 21-26*

Millions of people in Indonesia traditionally return to their home town every year in a tradition called "mudik". Unlike previous years, the annual tradition has become a cause for concern after COVID-19. This article presents the potential of mudik flows patterns during the COVID-19 pandemic, which were divided into 11 regions. We use a circulate plot chord diagram to show the potential of mudik flows patterns based on primary survey data on community perceptions regarding mobility and transportation during COVID-19. The results show that the most massive mudik flow is expected to occur from Jabodetabek to Central Java. Jabodetabek is the highest mudik origin, while Central Java and East Java are the highest mudik destinations. We suggest that government should anticipate the spread of COVID-19 by limiting mobility as they have been done this year. In addition, this must also be supported by citizen's awareness and coordination between local governments.

Keywords: chord diagram, COVID-19, flow patterns, mudik, mobility

Nina Novira, Rudi Iskandar, Raehanul Bahraen

**THE PERCEPTION OF INDONESIANS
CONCERNING THE IMPORTANCE OF SOCIAL
DISTANCING AS AN EFFORT TO 'FLATTEN
THE CURVE' OF COVID-19 IN INDONESIA**

Jurnal Kependudukan Indonesia

*Special Edition Demography and COVID-19, July
2020, Page 27-32*

COVID-19 has spread worldwide including Indonesia. The government responds by appealing to the public to implement social distancing (sd) to contained the spread of the virus. However, without threats Concrete penalties and the absence of strict safeguards make the application of SD dependent on perception and compliance community only. Seeing the fact that some people continue their activities outside the home, various assumptions developing in the community. By using Google Form ®, this study aims to analyze perceptions the public on the importance of implementing SD as an effort to deal with COVID-19, confirmed the general assumptions that develops in the community, and traces the causes of the ineffectiveness of elementary school application. Research result shows that most of the community believes that adoption of SD is very important. However, that perception not always directly proportional to the appropriate behavior. The general perception is that those who stay out of the house are in the context of work and earning a living is not proven. Compared to attending invitations and stays organizing events that have been planned since before the plague, still worship in more houses of worship many cause people to leave the house.

Keywords: community perception, COVID-19, social distancing

**Marya Yenita Sitohang, Angga Sisca Rahadian,
Puguh Prasetyoputra**

**THE IMPORTANCE OF PEOPLE CENTER
APPROACH IN THE POST DISASTER
MANAGEMENT TO SUPPORT BUILD BACK
BETTER: LESSON LEARNED FROM DISASTER
IN PALU, SIGI AND DONGGALA**

Jurnal Kependudukan Indonesia

*Special Edition Demography and COVID-19, July
2020, Page 33-38*

The impact of the pandemic has influenced every aspect of people's life. One of the positive impacts of the pandemic in Indonesia is the existence of the community initiative to prevent the COVID-19 spreading. This article aims to explore several initiatives coming from the society in relation to COVID-19 and the lesson learned for the society to have preparedness in facing health disasters. The data come from the 39 online news on the internet, the data was then analysed using a content analysis method. The authors found that Indonesian community initiative can be distinguished by two purposes i.e. to prevent the transmission of COVID-19 and to help the vulnerability group cope with the economic impact of COVID-19. Furthermore, mostly the initiative originally came from society without the intervention of the government. It is important to note that the collaboration between the government, both the centre and local, and the society should be strengthened.

Keywords: *community initiative, COVID-19, role of government, society*

Ikfina Chairani

**IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC USING
GENDER PERSPECTIVE
IN INDONESIA**

Jurnal Kependudukan Indonesia

*Special Edition Demography and COVID-19, July
2020, Page 39-42*

The COVID-19 outbreak has inevitably changed the situation in Indonesia and might bring a threat to gender equality. This short paper aims to explain the impact of the COVID-19 pandemic on women from health, economic, and social aspect in Indonesia. First, from the health aspect, women are vulnerable to COVID-19 since they play the main role in the care economy. Also, the pandemic situation has changed the regulation of reproductive health services and might intensify the unmet need of women on reproductive health care. Second, from the economic aspect, the pandemic has hit Indonesia's economic situation and increases the unemployment rate as well as the informal worker on women. In addition, women also might be harder to return to market labor since it might be a limitation after the pandemic. Third, from the social aspect, due to working from home (WFH) regulation, women more likely to face a double burden to balance their productivity and domestic work. Not to mention that during the pandemic, the domestic violence to women has increased yet slower the responsiveness of the stakeholder to handle the reports.

Keywords: *COVID-19, women, health, economic, social*

Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba

THE IMPACT OF COVID-19 ON WORKER LAYOFFS AND INCOME IN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 43-48

The larger-scale social restrictions policy to handling the COVID-19 pandemic had an impact on the socio-economic of the community including job sustainability and income of workers. This study analyzes the impact of the COVID-19 on worker layoffs and income in Indonesia. This research uses an accidental sampling through the online survey. The results showed that COVID-19 had an impact on layoffs and decreased income, especially during the social distancing. The result showed that layoffs of workers in Indonesia amounted to 15.6 percent. Regarding income, about 31.0 percent of workers claim that their income has decreased by less than 50 percent and 8.6 percent of that has fallen above 50 percent. The government needs to conduct strict supervision of companies in each region. The role of the community is needed in overcoming existing problems by looking for new strategies that are utilizing technology and looking for new job opportunities, while still paying attention to health protocols.

Keywords: COVID-19, worker, layoffs, income, Indonesia

Thomas Soseco

LESSONS FROM COVID-19: SMALL AND FINANCIALLY STRONG FAMILY

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 49-52

Households should small and but financially strong, especially to deal with a crisis where most families face a reduction in income but relatively constant expenditure. To maintain the standard of living, they need a buffer, measured from net wealth, i.e. total value of assets deducted by debts. There is no justification for how small the family size should be. For most households, higher net wealth is achieved when they have smaller household size, while only the poorest and richest households can get benefits from additional household members. However, we should also aware of the pseudo-increase of net wealth, i.e. households obtain an increasing net wealth because of additional household members but unable to push them to higher decile.

Keywords: wellbeing, total fertility rate, household's size, net wealth, debts

Agung Minto Wahyu, Mochammad Sa'id

***PRODUCTIVITY DURING WORK FROM HOME:
A SOCIAL PSYCHOLOGICAL ANALYSIS***

Jurnal Kependudukan Indonesia

*Special Edition Demography and COVID-19, July
2020, Page 53-60*

The spread of the COVID-19 pandemic requires each country to limit activities of its people outside the home by doing Work from Home (WFH). The purpose of this paper is to reveal the impact of WFH on worker productivity in the perspective of social psychology. The analysis shows that during WFH, worker productivity can increase due to the effects of social facilitation. Workers perceive the presence of others as triggers to increase their productivity. Conversely, workers' productivity can also decrease during working together with others because the presence of other people is perceived as a threat. On the other hand, job demands, distractors, and facilitators can activate the latent personality trait of an individual so that it manifests into a new work behavior during WFH. Strategies to maintain productivity is to use brainstorming, break down work teams into smaller, as well as the application of Nominal Group Technique.

Keywords: *productivity, work from home, pandemic, COVID-19, social psychology*

Maulana Rezi Ramadhana

***PREPARING FOR FAMILY RESILIENCE
DURING ADAPTATION OF NEW HABITS IN
THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD***

Jurnal Kependudukan Indonesia

*Special Edition Demography and COVID-19, July
2020, Page 61-68*

Changes in family dynamics during the isolation period of COVID-19 have an impact on family resilience in preparing for the adaptation of new habits in Indonesia. This study examines emotional reactions and family resilience, using family demographic groups, namely family type, parent's occupational type, and a residential area used as study variables. The sample came from 318 overseas student families who had reunited with families from 23 cities and districts in West Java Province. Simple frequency data analysis were used to present related situations. The results of the study showed that family type, family socioeconomic (parents' occupation), and the type of residential area of the family showed differences in positive emotions, negative emotions and were significant to family resilience during COVID-19 isolation. The implications of this study lead to the function of families in strengthening family resilience to prepare for the adaptation of new habits in Indonesia.

Keywords: *family resilience, emotion, COVID-19, adapt to new habits, Indonesia*

Deshinta Vibriyanti

SOCIETY MENTAL HEALTH: MANAGING ANXIETY DURING PANDEMIC COVID-19

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 69-74

The spread of the COVID-19 pandemic around the world not only has physical health impacts but also mental health. One of the effects of a pandemic on mental health that is feelings of anxiety about being exposed to viruses and the uncertainty of conditions during a pandemic. Anxiety needs to be managed properly so that it can still make alertness, but not excessive so that it causes worse mental health disorders. This paper aims to explain how to manage anxiety during a pandemic for the society with a literature study approach. From the perspective of social psychology, this paper concludes that managing anxiety at a proportional level, is the result of repeated perception of situations. The selection of information received during a pandemic is the key to managing anxiety. Next, adapt to the changes that occur so that can through a mentally healthy life in a pandemic.

Keywords: *society mental health, anxiety, managing anxiety, COVID-19, adaptation*

Samsul Arifin

THE DYNAMICS OF CHANGE IN RELATION KIAI SANTRI ON 'NGAJI ONLINE' IN THE COVID-19 PANDEMIC

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 75-80

This paper reveals the dynamics of the changing therapeutic relationship of the kiai with students (santri) in learning (ngaji) from face-to-face to online models in the time of COVID-19. The research method is ethnographic-hermeneutic. In the face-to-face learning system, therapeutics occur because of the warm relationship by looking directly at the kiai's face which makes the students feel calm. In the "Ngaji Online" the therapeutic system switches to environmental settings that make students feel safe and comfortable. In the "Ngaji Online" system, the warmth of relationships begins to weaken. However, this weakness can be covered up because the spiritual relationship between the kiai and the students still feels strong. This spiritual relationship is the key to therapeutic for the Islamic boarding school.

Keywords: *dynamics, therapeutic, ngaji online, COVID-19*

Indah Pratiwi, Bakti Utama

INEQUALITY OF EDUCATION SERVICES IN INDONESIA DURING THE EMERGENCY PHASE OF COVID-19: DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF IMPLEMENTATING HOME LEARNING POLICY

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 81-86

One of the effects of the COVID-19 pandemic on the education sector in Indonesia is the closure of schools. To ensure education services continue, the government issued a policy of learning home (Belajar dari Rumah/BDR) through online/distance learning. This paper aims to describe the implementation of the BDR for learning quality. To that aim, we have conducted telephone interviews with school principals and teachers from frontier, outermost and remote regions (3T) and non-3T regions. By looking at demographics perspective, implementation of BDR has six variations are a) learning by interactive virtual classroom b) learning assignment by social media c) learning in teacher's or student's home d) learning by using TV/radio e) learning by 'mouth-to-mouth' messages and f) learning stopped. The variations generate different quality of learning and will produce an increasing education inequality in Indonesia.

Keywords: *home learning, COVID-19, education inequality, education emergency, online learning.*

Anggalih Bayu Muh. Kamim

COVID-19 PANDEMIC AND MOMENTUM OF FOOD SECURITY EVALUATION IN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 87-92

This study will explore the production approach of the food security regime in Indonesia, which increasingly marginalized peasant during the COVID-19 pandemic. The production approach emphasizes the role of global governance by encouraging trade liberalization and the large role of corporations to control the supply chain from upstream to downstream creating vulnerability to peasant. The COVID-19 pandemic has led to a decline in market share of peasant agricultural products due to the closure of the wholesale market that supplies hotels and restaurants. The results of the study show that government policy during the COVID-19 pandemic increasingly benefited food corporations by easing operating hours for modern retailers and fixing selling prices that benefited corporations. Meanwhile, peasant are increasingly marginalized during the Corona virus outbreak in the operation of the food security regime with restrictions on the operation of traditional markets, price adjustments at the farm level, and the involvement of agribusiness application companies that are envisaged to help marketing, but in reality do not necessarily give selling prices which is beneficial due to the low bargaining power of peasant

Keywords: *COVID-19 pandemic, peasant, food security regime.*

Deny Hidayati

THE PROFILE OF POPULATION THAT CONFIRMED POSITIVE FOR COVID-19 AND DIED: INDONESIA AND DKI JAKARTA CASES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 93-100

This paper discusses the population that confirmed positive for COVID-19 and died in Indonesia and DKI Jakarta, which is epicentre of corona virus transmission in this country. The trend of population confirmed positive COVID-19 continues to increase and fluctuate every day, while the percentage of population deaths tends to decline. The paper using secondary data revealed that male residents were more vulnerable to COVID-19 than women. The number of male population confirmed positive corona virus is higher and the percentage of death is much higher. COVID-19 attacks all age groups, but the population is over 46 years, especially 60 years and above, more vulnerable than other age groups. Infants, toddlers and children who are detected positively have a low percentage, but the quantity is quite large. The population risk reduction policy for COVID-19 is indispensable for all residents with priority given to more vulnerable groups in Indonesia and DKI Jakarta.

Keywords: *population, sex, age group, vulnerable, COVID-19*

Abdul Fikri Angga Reksa

TRAPPED POPULATIONS: MANAGING COVID-19 PANDEMIC FOR DISASTER SURVIVORS IN PALU CITY

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 101-104

This article depicts the disaster survivors' recent situation amidst the COVID-19 crisis in Palu City (Central Sulawesi). Even though multiple disasters occurred around two years ago, there are still many people living in temporary shelters. They could not apply a health protocol recommendation such as physical distancing due to densely populated setting. Apart from that, they could not access a proper WASH facility in the evacuation camps. The coronavirus outbreak has been undermining the temporary shelters' dwellers hardly. Most of them are trapped or unable to move to a safe place, albeit they want to do it so. The local government has anticipated the worst-case scenario through direct assistance and stimulus programs. However, those ongoing programs are inadequate to reach the whole communities in need. In order to manage the COVID-19 pandemic, this article suggests people empowering approach by harnessing the existing social capital, for instance, social network and community-based initiatives. Learning from the tragedy on 28 September 2018, the community-based initiatives focus on providing basic needs (food, sanitizer, mask) and mental health support.

Keywords: *trapped populations, COVID-19, Palu*

Ibnu Nadzir

DATA ACTIVISM AND COVID-19 IN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 105-108

The government's inability to provide information in relation to COVID-19 in Indonesia, has stimulated grassroots efforts from society to develop data activism. These are the kind of activism that proliferates from modern social media ecosystem and utilizes data as the core of their movement. The article proposes that there are at least three forms of activism differentiated based on the actors, their main sources of data, and characteristic. These forms of activism are aimed to provide data and information that could help both government and society to better mitigate the impact of pandemic. While data activism provides some hope among other grim outlook of COVID-19 management in Indonesia, the questions on its impacts are still looming under the contested authorities of information in Indonesia.

Keywords: *Data, activism, social media, COVID-19, information*

Syahrul Mubaroq, Inas Mufidatul Insiroh

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY, BIG DATA ANALYSIS, AND INTERNET OF THINGS: THE POTENTIAL AND THE ROLE TO FIGHT COVID-19 IN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Special Edition Demography and COVID-19, July 2020, Page 109-112

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has spread throughout the world including Indonesia. The poor prevention and treatment of the initial phase results in a continuing increase in the number of positive cases and mortality caused by this virus. On the other hand, countries that have adopted policies that are fast and appropriate technology have been able to reduce the rate of additional cases and mortality rates. In this paper the authors conduct an analytical study of the application of technologies such as artificial intelligence, big data, and the internet of things in accelerating the detection, prevention, response, and recovery of COVID-19 cases in several countries and their possibilities to be applied in Indonesia. The authors suggest the Indonesian government to apply appropriate policies and technologies to reduce the high growth of COVID-19 cases.

Keywords: *artificial intelligence, big data, COVID-19, internet of things, technology*

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PENANGGULANGAN COVID-19 DALAM KERANGKA TEORI KEPENDUDUKAN MALTHUS

(COVID-19 COUNTERMEASURES IN VIEW OF THE MALTHUSIAN THEORY OF POPULATION)

Aswatini Raharto

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

*Korespondensi penulis: tiniaswa2710@gmail.com

Abstract

This paper was not necessarily discussing COVID-19 as Malthus' positive check, but it examines the current efforts to overcome and control the COVID-19 pandemic as a preventive and positive check. COVID-19 gives credence to the Malthusian Theory of Population. The key features of this model are that the preventive checks that should be carried out by men are not only limited to controlling the population through family planning but also to control the pressure on the existing resources. The two forces will act to restore equilibrium: preventive check and positive check. From the Malthusian theory, herd immunity in the time of COVID-19 regarded as a positive check. As Indonesia's home to more than 270 million population, the mortality rate likely uncontrollable. Thus herd immunity should not be chosen as a policy option.

Keywords : *COVID-19, herd immunity, malthusian theory, preventive and positive check*

Jumlah total penduduk di suatu wilayah umumnya merupakan data demografi pertama yang dibutuhkan dalam penyusunan berbagai kebijakan. Faktor yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk ini pada suatu kurun waktu tertentu adalah tingkat kelahiran (*fertility*), kematian (*mortality*), dan migrasi bersih (*net-migration*). Pemikiran awal terkait kekhawatiran akan ancaman pertumbuhan penduduk yang pesat dikemukakan dalam teori kependudukan yang dikenal dengan *Malthusian Theory*. Teori ini pertama kali dipaparkan oleh Thomas Malthus dalam tulisannya berjudul *An Essay on the Principles of Population* (Malthus, 1798). Tulisan tersebut kemudian dimodifikasi pada beberapa

kesimpulannya setelah mendapat kritik para ilmuwan (Dunn, 1998, Hofman, 2012, Subair, 2015). Kekhawatiran Malthus adalah melihat pertumbuhan penduduk yang pesat yang akan berdampak negatif pada kecukupan ketersediaan pangan. Malthus memformulasikan postulatnya sebagai berikut:

I said that population, when unchecked, increased in a geometrical ratio, and subsistence for man in an arithmetical ratio (Malthus, 1798:6).

Postulat tersebut, jika diterjemahkan dalam angka-angka, menunjukkan pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64;

sedangkan produksi pangan tumbuh mengikuti deret hitung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih pesat dari pertumbuhan produksi pangan dan dengan berjalannya waktu keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan akan terganggu.

Malthus mengemukakan dua macam *check* ‘pencegah’ yang dapat mempertahankan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat keseimbangan dengan ketersediaan pangan, yang dikenal dengan *preventive* dan *positive check*. *Preventive check* bekerja memengaruhi pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran, seperti menghindari perkawinan, menunda usia kawin, dan membatasi jumlah anak (keluarga berencana); sedangkan *positive check* memengaruhi pertumbuhan penduduk melalui tingkat kematian yang tinggi, seperti dampak perang, kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit (Malthus, 1798).

Apakah pandemi COVID-19 saat ini dapat diartikan sebagai *positive check* dari pemahaman teori Malthus? Rankin (2020) mengemukakan pendapatnya bahwa COVID-19 tidak dapat dikatakan sebagai krisis Malthusian, tetapi merupakan peringatan bahwa *positive checks* mungkin saja dapat terjadi di dunia di masa yang akan datang. Tulisan ini tidak difokuskan untuk membahas COVID-19 sebagai *Malthus’ positive check*, tetapi mencermati upaya penanggulangan dan pengendalian pandemi COVID-19 sebagai *preventive* dan *positive check* terhadap gangguan keseimbangan dalam kenyamanan kehidupan yang selama ini kita jalani.

Dampak pandemi COVID-19 sudah dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebelum pandemi terjadi, masyarakat biasa hidup dalam keseimbangan dan kenyamanan pada tingkatan yang beragam dan sangat relatif untuk setiap orang dan keluarga. Keseimbangan dan kenyamanan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti tercukupinya pangan, tersedianya lapangan

pekerjaan, serta adanya kesempatan dan keleluasaan untuk bersosialisasi atau melakukan mobilitas, baik untuk keperluan sosial (mengunjungi kerabat, berwisata) maupun terkait dengan urusan pekerjaan. Namun, situasi pandemi saat ini jelas memperburuk kondisi kehidupan (keseimbangan) yang selama ini kita jalani dan nikmati. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kehidupan normal rakyat, meskipun nantinya akan berada dalam tataran *new normal* ‘adaptasi kebiasaan baru’.

Pada dasarnya, ada tiga cara dalam penanggulangan COVID-19. Pertama, dengan melarang penduduk melakukan mobilitas secara bebas serta melakukan tes cepat (*rapid test*) untuk menghentikan peneruan; kedua, dengan vaksinasi; dan ketiga, yang sangat mengerikan untuk dipertimbangkan adalah dengan menunggu sampai cukup banyak orang terinfeksi dan terbentuk *herd immunity* (Regalado, 2020a). Sampai saat ini Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan pandemi COVID-19, baik dalam perawatan dan penyembuhan penduduk terinfeksi (*curative*) maupun pencegahan penyebaran/penularan (*preventive*).

Upaya perawatan dan penyembuhan dilakukan di rumah sakit (RS) tertentu yang sudah ditetapkan sebagai tempat perawatan pasien terinfeksi, termasuk dengan memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai RS darurat untuk merawat pasien berstatus positif COVID-19 maupun pasien dalam pengawasan (PDP) dan Orang dalam pemantauan (ODP). Upaya pencegahan diimplementasikan dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan tes cepat secara massal. Bahkan Pemerintah DKI Jakarta sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Lokal – Rukun Warga (PSBL-RW) di wilayah-wilayah yang terdata sebagai “zona merah” COVID-19.

Pemberlakuan PSBB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pelaksanaan PSBB ini melingkupi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Peliburan sekolah dan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam konteks teori Malthus, penyiapan RS dan RS darurat COVID-19 serta tes cepat massal dan pemberlakuan PSBB dapat dianalogkan sebagai upaya pencegahan, *preventive check*, untuk menekan tingkat kematian melalui pengobatan dan deteksi serta pencegahan penularan. Sementara itu, *herd immunity* dikatakan sebagai salah satu cara lain yang dapat membantu menekan penyebaran COVID-19. Konsep dasar *herd immunity* adalah pemahaman bahwa imunitas suatu kelompok penduduk terhadap suatu penyakit menular dibangun dari tingkat individu, yang secara kumulatif pada saat sudah cukup banyak individu yang imun, akan berkembang menjadi imunitas kelompok penduduk tersebut.

Pada tingkat individu, imunitas ini diperoleh jika (1) individu terinfeksi (tertular) penyakit tersebut, atau (2) melalui vaksinasi. Dengan terbangunnya imunitas kelompok penduduk ini, maka individu-individu yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi, seperti anak kecil dan mereka yang memiliki masalah sistem imunitas (*immunocompromised*), dapat terlindungi dari penularan penyakit (Randolph & Barreiro, 2020, hlm. 737).

Dengan demikian, dalam kasus pandemi COVID-19 saat ini, dikarenakan upaya untuk mendapatkan vaksin terhadap infeksi virus SARS-CoV-2 (virus yang menyebabkan COVID-19) masih dalam proses pengembangan, kekebalan tubuh terhadap COVID-19 bisa didapatkan secara alami oleh orang yang pernah terinfeksi dan berhasil sembuh. Dengan kata lain, orang tersebut sudah memiliki *immunity passport* (Regalado, 2020b). Setelah sembuh, orang tersebut akan memiliki antibodi untuk melawan virus SARS-CoV-2 jika suatu saat terinfeksi kembali (Fadli, 2020).

Sampai saat ini belum dapat dipastikan apakah percobaan-percobaan yang dilakukan akan menghasilkan vaksin yang efektif dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkannya. Estimasi waktu dengan asumsi optimis adalah sekitar 12-18 bulan. Membangun *herd immunity* dengan membiarkan penularan COVID-19 secara alami pada penduduk sangat mungkin secara teoretis, tetapi tidak ada cara-cara langsung yang tidak melanggar etika untuk mencapainya karena konsekuensi biaya sosial yang tidak kecil yang harus ditanggung masyarakat. Biaya sosial ini dapat diukur dengan *infection fatality rate* (IFR).

IFR adalah proporsi penduduk yang meninggal akibat wabah penyakit di antara mereka yang terinfeksi. Banyak kasus kematian yang mungkin tidak terdeteksi atau terdata di antara orang dengan gejala ringan atau tanpa gejala penyakit (Randolph & Barreiro, 2020, hlm. 738). Keadaan ini juga dapat terjadi jika *herd immunity* diterapkan dalam menanggulangi virus SARS-CoV-2, melalui 'pembiaran' penularan terjadi diantara penduduk dan ketiadaan vaksinasi. Padahal, biasanya 70 persen sampai 90 persen penduduk perlu memiliki imunitas (tertular penyakit) untuk mencapai *herd immunity* (D'Souza & Dowdy, 2020).

KESIMPULAN

Dalam teorinya, Thomas Malthus menggagas tentang *positive check* sebagai kondisi pertumbuhan penduduk yang pesat dihambat dengan tingginya tingkat kematian yang terjadi,

misalnya karena peperangan, kemiskinan, kelaparan atau wabah penyakit. Malthus mendapat banyak kritik karena gagasannya tersebut dianggap tidak beretika, membiarkan tingkat kematian yang tinggi tanpa upaya untuk mencegahnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan. Malthus tidak mempertimbangkan pada saat itu (1798) bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi alternatif dalam peningkatan produksi pangan secara massal untuk memenuhi kebutuhan pangan. Perkembangan metode kontrasepsi dan pemanfaatannya secara massal terutama di negara-negara berkembang juga dapat menjadi *preventive check* pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan dapat dicapai tanpa pembiaran terhadap bekerjanya *positive check* sebagai kontrol.

Dari perspektif Teori Kependudukan Malthus, *herd immunity* dapat dianggap sebagai *positive check* jika didapatkan melalui pembiaran penularan terjadi pada jumlah penduduk yang besar dan dengan risiko kematian yang mungkin saja tidak terkendali di antara penduduk yang terinfeksi. Dengan demikian, *herd immunity* tidak dapat dijadikan alternatif dalam mengatasi COVID-19, terlebih sampai saat ini vaksin yang

efektif untuk melawan virus SARS-CoV-2 juga belum tersedia. Kebijakan pemerintah saat ini dalam penanggulangan Covid-19 merupakan pilihan yang tepat, antara lain seperti penerapan PSBB dan tes cepat secara massal. Keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut memang sangat tergantung pada kedisiplinan penduduk dan masyarakat. Sayangnya, masih banyak penduduk yang kurang memahami dan tidak disiplin melaksanakan anjuran pemerintah, misalnya saja untuk hal-hal yang mendasar seperti pembatasan sosial (*social distancing*), menjaga jarak, menghindari kerumunan/keramaian, memakai masker jika ke luar rumah, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Hal ini dipengaruhi berbagai kendala seperti masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang mendesak terkait pekerjaan atau mata pencaharian mereka. Untuk itu, pemerintah harus selalu mengadvokasi penduduk untuk mengakumulasi pemahaman dalam penanggulangan Covid-19 yang ramah penduduk serta menyiapkan program-program untuk membantu kondisi ekonomi penduduk. Hal ini diperlukan agar pelanggaran PSBB yang saat ini sudah dilakukan tidak menjadi cara yang secara ‘tidak disadari’ membangun *herd immunity* dengan segala risiko pahitnya.

DAFTAR PUSTAKA

D'Souza, G., & Dowdy, D. (2020). *What is herd immunity and how can we achieve it with Covid-19?*. <https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/achieving-herd-immunity-with-covid19.html>

Dunn, P.M. (1998). Thomas Malthus (1766-1834): Population growth and birth control. *Archives of Disease in Childhood (Fetal and Neonatal Edition)*, 1998, 76-77. DOI:10.1136/fn.78.1.F76.

Fadli, R. (2020). Begini skema herd immunity guna menekan penyebaran Corona. *halodoc*

<https://www.halodoc.com/skema-herd-immunity-guna-menekan-penyebaran-corona>.

Hofmaan, K. (2012). Beyond the principle of population: Malthus's Essay. *European Journal of the History of Economic Thought*, 20(3), 1-27. DOI: 10.1080/09672567.2012.654805.

Malthus, T. (1798). *An essay on the principle of population*. Electronic Scholarly Publishing Project.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Randolph, H.E., & Luis, B.B. (2020). Herd immunity: Understanding Covid-19. *Immunity*, 52, 737-741.
<https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.04.012>.

Rankin, K. (2020). *Corona virus – A Malthusian Event?*
<https://www.scoop.co.nz/stories/HL2003/S00228/coronavirus-a-malthusian-event.htm>

Regalado, A. (2020a, Maret 17). *What is herd immunity and can it stop the coronavirus?*
<https://www.technologyreview.com/2020/03/17/905244/what-is-herd-immunity-and-can-it-stop-the-coronavirus/>.

Regalado, A. (2020b, April 27). What if immunity to Covid-19 doesn't last?
<https://www.technologyreview.com/2020/04/27/1000569/how-long-are-people-immune-to-covid-19/>.

Subair. (2015). Relevansi teori Malthus dalam diskursus kependudukan kotemporer. *Diaektika*, 9(2), 96-110.
<http://dx.doi.org/10.33477/dj.v9i2.224>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PERTIMBANGAN DEMOGRAFIS DI TENGAH PANDEMI COVID-19: KEBIJAKAN PEMBATAHAN PERJALANAN KE PROVINSI PAPUA

(DEMOGRAPHIC CONSIDERATIONS IN THE MIDST OF COVID-19: TRAVEL RESTRICTION POLICY TO PAPUA PROVINCE)

Jevon E. M. Nahuway¹, Johni R.V. Korwa^{2*}

¹Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

²Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cenderawasih,

*Korespondensi penulis: johnikorwa@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze travel restriction policy to Papua in the midst of the COVID-19 pandemic through a demographic lens. It finds that the travel restriction policy to Papua was not only influenced by non-demographic factors including politics, economy, health, but also by demographic factors such as mortality, fertility, and migration. There are several reasons for this. Firstly, the population of Papua remained small in comparison with other provinces across Indonesia; thereby imposing travel restrictions were in the best interest to lower the mortality rate in Papua due to COVID-19. Secondly, preserving fertility during the COVID-19 pandemic was vitally important regarding future generations and the government of Papua had demonstrated its ability to handle the situation by appointing several health centers particularly for pregnant women. Thirdly, people moving in and out of Papua currently became inevitable, thus migration should be limited for a while through the travel restriction policy.

Keywords: COVID-19, Indonesia, Papua, travel restriction

Papua merupakan Provinsi terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 319.036,05 km² atau setara 16,64 % dari luas Indonesia. Meskipun demikian, jumlah penduduk Papua masih cukup sedikit jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu 3.379,3000 (BPS, 2020). Dalam konteks pencegahan COVID-19, Papua adalah provinsi pertama di Indonesia yang secara tegas menyatakan penutupan sementara akses perjalanan baik melalui laut maupun udara, kecuali untuk kargo barang atau yang bersifat darurat. Hal ini tertuang pada salah satu poin hasil 'Kesepakatan Bersama' antara Gubernur dan Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah), bupati/walikota beserta seluruh stakeholders di Papua pada tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan,

“penutupan sementara seluruh bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara di Papua” (Hasil Kesepakatan Bersama, 2020). Walaupun sempat mendapat penolakan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dianggap tidak sejalan dengan instruksi pemerintah pusat yang menekankan pada *social/physical distancing*; bukan penutupan akses travel (Nugraheny, 2020); implementasi kesepakatan tersebut tetap dijalankan.

Dalam perspektif negara kesatuan, pembatasan perjalanan ke Papua belum mendapat legitimasi dari pemerintah pusat. Payung hukum untuk melakukan penutupan akses travel adalah melalui kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang ternyata

dikeluarkan Presiden Jokowi satu minggu setelah pembatasan akses ke Papua diberlakukan, yaitu tanggal 31 Maret 2020. Penetapan PSBB pun harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, dan Papua tercatat belum mendapat status PSBB sampai saat penulisan paper ini. Tentunya ada banyak pertimbangan mengapa para pengambil keputusan di Papua bersikukuh untuk tetap melakukan pembatasan perjalanan ditengah pandemi COVID-19.

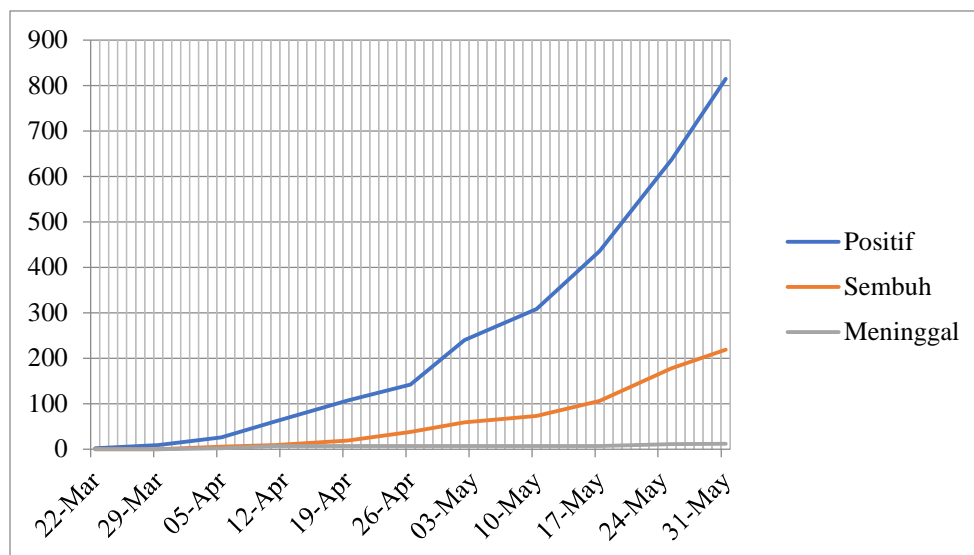
Korwa (2020) berpendapat bahwa terdapat ketidakpercayaan (*distrust*) pada kemampuan otoritas nasional untuk menekan laju penyebaran COVID-19 sehingga mendorong para pengambil keputusan di Papua menutup akses masuk wilayah. Selain itu, minimnya sumber daya (professional) dan infrastruktur kesehatan di Papua juga menjadi pertimbangan krusial terkait pembatasan perjalanan (Mawel & Mambor, 2020). Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa pertimbangan demografis juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengambilan keputusan untuk pembatasan perjalanan (*travel restriction*) ke Papua di masa pandemi COVID-19.

Ada tiga variabel demografis yaitu 1) tingkat kematian; 2) tingkat kelahiran; dan 3) migrasi masuk (Hardiani,

2009). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jumlah penduduk di Papua masih cukup sedikit jika di bandingkan dengan luas wilayahnya. Artinya bahwa jika semakin banyak masyarakat Papua yang terinfeksi dan meninggal akibat wabah COVID-19 maka populasi Papua tentunya akan menurun. Namun fakta menunjukkan bahwa angka kematian pasien COVID-19 di Papua sangat kecil sejak pembatasan perjalanan diberlakukan.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 yang mendeskripsikan bahwa meskipun jumlah kasus positif dan pasien sembuh meningkat, angka kematian sangat rendah dengan *trending* stabil selama periode ditunjukkan. Gambar 1 juga didukung oleh pernyataan dr. Silwanus Sumule – Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Papua bahwa per 25 Mei angka kematian 11 orang atau hanya 1,7% (Seputar Papua, 2020). Dengan kata lain, pemerintah Papua telah mampu menekan angka kematian sebagai bagian dari pertimbangan demografis dan tentunya diharapkan agar jumlah pasien positif COVID-19 di Papua dapat menjadi sembuh dalam beberapa waktu ke depan.

Gambar 1. Perbandingan antara pasien meninggal dengan kasus positif dan sembuh COVID-19 di Provinsi Papua (22 Maret - 31 Mei 2020)



Sumber: Diolah oleh penulis dari 'Satgas Pengendalian Pencegahan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua (2020)'

Tingkat kelahiran juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam pembatasan perjalanan ke Papua. Dalam konteks pandemi ini, Pemerintah Provinsi berusaha memproteksi ibu hamil dan anak yang dilahirkan dari infeksi COVID-19. Bayangkan jika banyak ibu hamil di Papua yang terpapar wabah COVID-19? Bagaimana nasib masa depan anak-anak generasi Papua? Tentunya infeksi tersebut akan memberi kontribusi buruk dan tidak menunjang angka kelahiran di Papua serta mempengaruhi kesehatan anak yang dilahirkan. Keseriusan pemerintah dalam mendukung tingkat kelahiran di tengah situasi pandemi saat ini dapat dilihat di ibu kota Provinsi Papua – Kota Jayapura – episentrum COVID-19 dengan jumlah kasus tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari bahwa pihaknya telah menyiapkan 13 Puskesmas khusus untuk menerima persalinan partus normal, dan semua petugas medis Puskesmas juga telah dilengkapi dengan APD /Alat Pelindung Diri (Suara Papua, 2020).

Terakhir, pembatasan perjalanan ke Papua tidak terlepas dari pertimbangan arus migrasi dalam beberapa periode terakhir. Papua sejak lama telah menjadi sasaran empuk migrant dan transmigrasi; kemudian terhenti lewat penolakan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kependudukan No. 15 Tahun 2008 (Yuminarti, 2017; Pona, 2008). Namun, arus masuk-keluar orang ke wilayah Papua baik melalui darat maupun laut masih sangat gencar dengan berbagai pertimbangan. Hal inilah yang mendasari penutupan sementara perjalanan ke Papua sebagai langkah pencegahan COVID-19 dari luar Papua (*imported cases*).

Seperti yang diketahui bahwa kasus positif di Papua pertama kali ditemukan di Kabupaten Merauke pada 22 Maret yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah terpapar COVID-19 (Aditra, 2020). Seiring perkembangan waktu, dua *cluster* lainnya ditemukan – ditengarai beberapa masyarakat itu sebelumnya melakukan perjalanan ke Lembang dan Gowa, dan ketika kembali ke Papua kemudian berinteraksi dengan masyarakat sehingga terjadi penularan lokal (Pemerintah Provinsi Papua, 2020). Fenomena ini kemudian membuktikan bahwa perjalanan masuk/keluar Papua perlu dihentikan sementara waktu guna mencegah resiko orang yang terjangkit COVID-

19 masuk ke Papua melalui proses migrasi dan untuk memetakan persebaran transmisi lokal.

KESIMPULAN

Tulisan ini menganalisa kebijakan pembatasan perjalanan ke Papua di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif demografi. Perspektif ini digunakan untuk melihat sisi lain dalam pengambilan keputusan. Tulisan ini menemukan bahwa kebijakan pembatasan perjalanan ke Papua tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor non-demografi seperti politik, ekonomi, kesehatan, tetapi juga oleh unsur-unsur demografis seperti tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan migrasi masuk.

Penulis merangkum beberapa poin penting. Pertama, angka kematian yang rendah dan relatif stabil di Papua membuktikan keberhasilan manajemen daerah melalui pembatasan perjalanan dalam mengontrol tingkat kematian akibat COVID-19. Kedua, kesigapan pemerintah dalam memproteksi tingkat kelahiran dimasa pandemi sudah cukup baik melalui penunjukkan beberapa Puskesmas untuk persalinan ibu hamil. Ketiga, penularan COVID-19 di Papua disebabkan oleh warga yang bepergian ke luar daerah dan juga ada resiko dibawa oleh orang luar ketika bermigrasi ke Papua. Oleh karena itu, tindakan pembatasan perjalanan merupakan hal yang tepat. Rekomendasi dari penulis adalah pemerintah Papua harus terus menopang tim medis dalam proses *treatment* terhadap pasien positif untuk sembuh sehingga angka kematian COVID-19 tetap berada dalam level rendah, dan tetap membatasi perjalanan hingga jumlah kasus mencapai titik puncak dan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditra, I.P. (2020, Maret 3). Satu Pasien Covid-19 di Merauke adalah Tenaga Kesehatan. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/22/20520011/satu-pasien-positif-covid-19-di-merauke-adalah-tenaga-kesehatan>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>

- Hasil Kesepakatan Bersama. (2020). *Kesepakatan Bersama Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua*.
- Hardiani, J. (2009). *Dasar-dasar Teori Kependudukan*. Jakarta: Hamada Prima.
- Korwa, J. R. V. (2020). Coronavirus (COVID-19) and Papua1: Putting People First. *Department of Pacific Affairs ANU In Brief 2020/15*. doi: 10.25911/5ec659100053b
- Mawel, B., & Mambor, V. (2020, Maret 25). Papua restricts entry as concerns mount over lack of facilities to treat COVID-19. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/25/papua-restricts-entry-as-concerns-mount-over-lack-of-facilities-to-treat-covid-19.html>
- Nugraheny, D. E. (2020, Maret 25). Mendagri Tak Setuju Pemprov Papua Tutup Wilayah akibat Covid-19. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/25/07591621/mendagri-tak-setuju-pemprov-papua-tutup-wilayah-akibat-covid-19>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2020). *Positif COVID-19 Papua Kini Sudah 95 Kasus*. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-7213/positif-covid-19-papua-kini-sudah-95-kasus.html>
- Pona, L. (2008). Penduduk, otonomi khusus, dan fenomena konflik di Tanah Papua. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(1), 51–67. <https://doi.org/10.14203/jki.v3i1.163>
- Seputar Papua. (2020). *Mimika Urutan Pertama Jumlah Pasien Corona Sembuh Tertinggi di Papua*. <https://seputarpapua.com/view/mimika-urutan-pertama-jumlah-pasien-corona-semuh-tertinggi-di-papua.html#>
- Suara Papua. (2020). *8 Rumah Sakit Fokus Corona, Ibu Hamil Siap bersalin di Puskesmas*. <https://suarapapua.com/2020/05/07/8-rumah-sakit-fokus-corona-ibu-hamil-siap-bersalin-di-puskesmas/>
- Yuminarti, U. (2017). Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua : Masalah dan Harapan (Transmigration Policy in the Context of Special Autonomy in Papua: Problems and Expectations). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 13–24. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.215>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PENTINGNYA REVITALISASI MODAL SOSIAL PASKA PANDEMI COVID-19

(THE IMPORTANCE OF REVITALIZING SOCIAL CAPITAL IN THE POST-COVID-19 PANDEMIC)

Max Regus

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Flores—NTT

Korespondensi penulis: max.regus73@yahoo.com

Abstract

The COVID-19 pandemic brings many crucial issues that had never been imagined before, and even the following situation could not be predicted comprehensively. The world, on a large scale, and every country and community must ensure that they can get through this situation. This article explicitly wants to analyze how the community and other actors deal with this pandemic situation based on social capital. This article focuses on social capital in a pandemic defined by the emergence of voluntary networks between communities. Social capital has become one of the strengths of people in many places in facing the spread of COVID-19. Learning from COVID-19, this article argues that revitalizing social capital is one of the strategic pathways in dealing with a pandemic situation.

Keywords: *COVID-19, society, social capital voluntary networks, Indonesia*

PENDAHULUAN

COVID-19 mempengaruhi dunia dengan ukuran yang hampir sama (Chakraborty & Maity, 2020). Dampak COVID-19 memang berada di luar perkiraan banyak pihak (Yamin, 2020). Di Indonesia, COVID-19 menghadirkan dampak mencemaskan. Pertanyaannya adalah bagaimana dunia dapat bertahan di tengah bencana COVID-19 ini (Suni, 2020). Tanggapan atas pandemi COVID-19 datang dengan langkah-langkah ketat seperti karantina, isolasi diri, dan jam malam. Di beberapa wilayah, masyarakat ditegakkan secara paksa, dalam beberapa kasus, melanggar tujuan dari jarak sosial itu sendiri (*social distancing*).

Rasa ingin tahu akademik atas kenyataan ini mengarah pada kekuatan modal sosial (*social capital*) dalam menghadapi COVID-19 (Pitas & Ehmer, 2020). Modal sosial menjadi satu titik pijak masyarakat di dalam menahan dampak buruk COVID-19 (Buana, 2020). Artikel ini merefleksikan pentingnya revitalisasi modal

sosial sebagai strategi jangka panjang menanggapi pandemi.

MODAL SOSIAL DAN PANDEMI

Modal sosial mendefinisikan hubungan interpersonal dan jaringan sosial yang memberi orang rasa identitas, tanggung jawab bersama, dan akuntabilitas kolektif (Whiteley, 2015). Modal sosial menjelaskan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menanggapi keadaan pandemik (Koh & Cadigan, 2008).

Kita bisa menemukan dengan mudah munculnya jejaring sosial dan sukarelawan selama COVID-19. Masyarakat menunjukkan rasa tanggap tinggi dalam melindungi komunitas. Sesama warga memberikan dukungan bagi komunitas yang terdampak COVID-19. Mereka menggalang solidaritas sosial agar warga dapat menyumbang apapun untuk bantuan darurat.

Dalam banyak inisiatif, setiap komunitas pada unit terkecil, seperti kampung, membangun langkah

konstruktif yang mengandung rasa saling bertanggung jawab atas kebaikan bersama (Zahrotunnimah, 2020). Praktek sosial macam ini sejak lama menjadi bagian dari budaya masyarakat kita (Effendi, 2016).

Modal sosial berhubungan dengan komunikasi publik dan promosi kohesi sosial sebagai kekuatan lunak dalam menangani pandemi. Ada satu refleksi penting yang menguat dari situasi ini. Masyarakat Indonesia yang berkarakter komunal sedang menggunakan sistem pengelolaan tradisional untuk mengatasi masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi dari pandemi COVID-19.

Modal sosial, yang kemudian mendapatkan atmosfer baru dalam kebijakan-kebijakan publik, membentuk platform penting di mana masyarakat merumuskan secara bersama tanggapan atas pandemi (Nurhalimah, 2020).

PERAN MODAL SOSIAL DI MASA DEPAN

Pandemi COVID-19 telah menciptakan gangguan terhadap interaksi sosial fisik manusia (Williams dkk., 2020). Kenyataan ini memiliki implikasi serius bagi modal sosial yang dibangun melalui interaksi sosial. Aspek ini juga secara signifikan memberi dampak besar bagi keberhasilan penanggulangan bencana dan pandemi (Sukmana dkk., 2020). Masyarakat kita mampu mengelola dampak pandemi dengan memanfaatkan jaringan modal sosial mereka (Burt, 2000). Usaha-usaha pemerintah atas pencegahan penyebaran COVID-19 juga dipengaruhi oleh pendekatan komunal dengan melibatkan masyarakat (Kusumastuti, 2016). Bagi kebanyakan orang, modal sosial menjadi alasan untuk bertahan (Nakagawa & Shaw, 2004).

Setiap pihak harus bekerja bersama sebagai keluarga bangsa dan negara, sebagai pengungkapan modal sosial dalam bentuk kohesi sosial dan politik (Forrest & Kearns, 2001). Revitalisasi modal sosial untuk menggelar jaring pengaman sosial dan melindungi kelompok-kelompok rentan dari guncangan pandemi niscaya memerlukan pendekatan terpadu. Pada situasi 'ruang kosong' keterlibatan pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat niscaya menunjukkan partisipasi signifikan dan konstruktif dalam memperkuat kembali modal sosial.

Dalam menghadapi pandemi dan dampak multi-dimensional seperti menyusutnya ruang dan kesempatan kerja (Nurwati, 2020), ekonomi yang rapuh (Hadiwardoyo, 2020), keguncangan dalam dunia pendidikan (Aji dkk., 2020), membangun kembali dengan lebih baik harus tetap menjadi ciri khas dari semua intervensi kultural ini. Kelompok rentan akan tumbuh semakin banyak. Mereka hanya bisa dibantu dengan aksi langsung dalam perjumpaan kemanusiaan, sementara format baru perjumpaan sosial barangkali sebagian besarnya ada di jaringan maya. Modal sosial yang bisa menyelamatkan komunitas-komunitas terdampak menjadi salah satu tantangan nyata paska pandemi COVID-19.

KESIMPULAN

Kesadaran akan jaringan kemanusiaan telah meluputkan kita dari arus akibat lebih menghancurkan COVID-19. Bagaimanapun, COVID-19 niscaya menyusun ulang postur sosial, stratifikasi sosial, dan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Perubahan ini mungkin akan menyebabkan sebagian komunitas menjadi lebih rentan daripada sebelumnya. Pasti ada yang akan menjadi korban permanen dari perubahan ini.

COVID-19 seolah memaksa umat manusia dan komunitas sosial-politik mempertanyakan kembali 'kegunaan' kohesi sosial yang mereka bangun selama ini. Bagaimanapun, modal sosial yang masih hidup di relung-relung kehidupan sosial dan budaya masyarakat dilihat sebagai salah satu alasan utama mengapa kita masih bertahan di bawah dampak mematikan COVID-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim reviewer yang telah memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, W., Dewi, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>

- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>
- Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. *Research in Organizational Behavior*.
- Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. *Science of the Total Environment*.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882>
- Effendi, T. N. (2016). Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*.
<https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23403>
- Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social cohesion, social capital and the neighbourhood. *Urban Studies*.
<https://doi.org/10.1080/00420980120087081>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*.
<https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Koh, H. K., & Cadigan, R. O. (2008). Disaster preparedness and social capital. *Social Capital and Health*. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71311-3_13
- Kusumastuti, A. (2016). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*.
<https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740>
- Nakagawa, Y., & Shaw, R. (2004). Social capital: A missing link to disaster recovery. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*.
- Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah COVID-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 plague). *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3576405>
- Nurwati, R. A. M. dan R. N. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia. *Kesejahteraan Sosial*.
- Pitas, N., & Ehmer, C. (2020). Social Capital in the Response to COVID-19. *American Journal of Health Promotion*.
<https://doi.org/10.1177/0890117120924531>
- Sukmana, M., Aminuddin, M., & Nopriyanto, D. (2020). Indonesian government response in COVID-19 disaster prevention. *East African Scholars Journal of Medical Sciences*.
<https://doi.org/10.36349/EASMS.2020.v03i03.025>
- Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Whiteley, P. F. (2015). Social Capital. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93127-1>
- Williams, S. N., Armitage, C. J., Tampe, T., & Dienes, K. (2020). Public perceptions and experiences of social distancing and social isolation during the COVID-19 pandemic: A UK-based focus group study. *MedRxiv*.
- Yamin, M. (2020). Counting the cost of COVID-19. *International Journal of Information Technology*.
<https://doi.org/10.1007/s41870-020-00466-0>
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

COVID-19 DAN PENUNDAAN KEPULANGAN MIGRAN PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI

(COVID-19 AND POSTPONED RETURN HOME OF INDONESIAN STUDENT MIGRANT ABROAD)

Inayah Hidayati¹²

¹Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

²Departemen Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia

Korespondensi penulis: inayah.hidayati@gmail.com

Abstract

*The COVID-19 pandemic is the reason some Indonesian student migrants to delaying their return-home. Various factors that inhibit return migration such as health, security, transportation and local immigration rules make student migrants stay abroad. **Objective:** This research aims to understand the migration decision-making process of Indonesian student migrants abroad on postponed their return-home to Indonesia on May-December 2020. **Methods:** The data collected included quantitative from a survey and qualitative data from interviews. **Result:** The decision-making process for migrant students arises from themselves and strengthened by the family and community, including information from their social networks. The impact of some student migrants who delay their return is the economic situation, especially for students who rely on their scholarships. To relieve the burden on student migrant, the Indonesian government can provide daily need aid. The Indonesian government also need diplomate to educational institutions to reduce their tuition fees and extend residence permit.*

Keywords: *student migrant, mobility, decision-making process, return migration, COVID-19*

Pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh negara berakibat pada berbagai aspek kehidupan termasuk arus dan mobilitas penduduk. Hingga 23 Juni 2020 dilaporkan 216 negara terinfeksi COVID-19 dengan jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 8.860.331 dan korban meninggal mencapai 465.740, dimana hampir separuh kasus dilaporkan terjadi di kawasan Amerika (WHO, 2020). Situasi ini membuat pemerintah di berbagai negara membatasi ruang gerak penduduk hingga menutup perbatasannya (Ranjan & Bisht, 2020; Ratha, dkk, 2020). Banyak rencana pergerakan penduduk baik yang permanen maupun non permanen ditunda hingga dibatalkan karena situasi ini,

termasuk rencana kepulangan pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri.

Saat ini lebih dari 289 juta penduduk di dunia berpindah aktif dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan dalam periode waktu beragam dari hitungan jam, harian, hingga menetap tahunan (IOM, 2020). Pandemi COVID-19 yang muncul sejak akhir 2019 lalu menghambat pergerakan penduduk karena pemerintah di berbagai negara mengatur ketat mobilitas penduduk dengan berbagai skema. Kondisi ini tentu saja berdampak pada pelajar Indonesia di luar negeri, banyak diantara mereka tertunda kepulangannya dari jadwal semula karena perkembangan situasi COVID-19

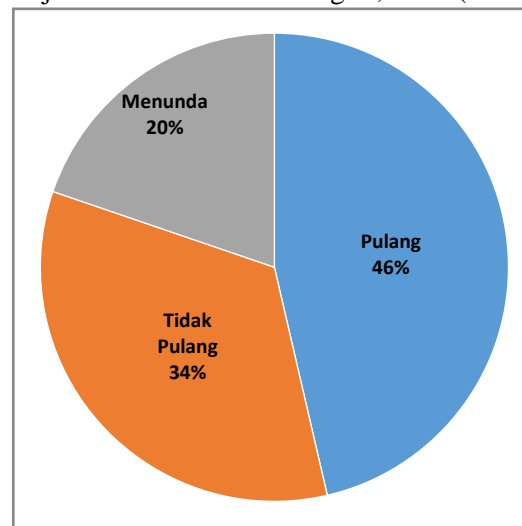
yang berubah dengan sangat cepat. Konsep dan definisi “kepulangan” dalam tulisan ini termasuk untuk pelajar yang pulang karena sudah menyelesaikan studi (*back for good*) maupun yang ke Indonesia karena keperluan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Belum ada catatan resmi melaporkan jumlah pelajar Indonesia yang tertahan tidak bisa pulang dari luar negeri. Namun fenomena ini terlihat dari unggahan pelajar Indonesia di berbagai media sosial yang menyatakan kepulangannya ditunda karena penundaan penerbangan internasional hingga ketidakjelasan informasi mengenai prosedur penanganan COVID-19 di negara tempat studi, negara transit dan di Indonesia (Sirkeci & Yucesahin, 2020; Chakraborty & Maity, 2020).

Tulisan ini bertujuan untuk memahami pengambilan keputusan bermigrasi para migran pelajar yang sedang di luar negeri dalam menunda kepulangan ke Indonesia pada periode Mei-Desember 2020. Proses pengambilan keputusan untuk bermobilitas atau tidak merupakan serangkaian proses melalui kombinasi individu maupun kelompok (aktor) dan mengintegrasikan informasi yang dimilikinya dengan tujuan memilih satu dari kemungkinan tindakan (Baron dkk., 2008; Achenbach, 2016). Proses pengambilan keputusan ini akan menghasilkan pilihan terbaik dan paling rasional menurut pertimbangan migran pelajar (Muhyadi, 2003). Proses pengambilan keputusan untuk bermobilitas pada masa pandemi ini tentu saja tidak akan sama dengan kondisi normal. Berbagai alasan seperti faktor kesehatan, keamanan, transportasi hingga berbagai macam pertimbangan individu migran akan menjadi pertimbangan. Untuk menjawab permasalahan dilakukan survei dengan 248 responden yang tersebar diberbagai negara melalui *accidental sampling* dan wawancara melalui *voice call*, *video call* hingga *text message* dengan partisipan perwakilan di beberapa negara. Data survei dan wawancara merupakan bagian dari data primer penelitian dengan judul “PULANG ATAU MENETAP: Intensi Migrasi Pelajar Indonesia yang Tinggal di Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19” yang diambil pada 13 April - 12 Mei 2020 (Hidayati, 2020).

Hasil survei menunjukkan sebanyak 46,4 persen migran pelajar mengemukakan akan pulang ke Indonesia, 33,9 persen tidak pulang dan 19,8 persen menunda kepulangannya pada periode Mei-Desember 2020

(Gambar 1). Migran pelajar yang menunda kepulangan merupakan pelajar yang mempunyai rencana kepulangan ke Indonesia, baik karena sudah menyelesaikan studi maupun keperluan lainnya, namun menunda dan membatalkannya karena kondisi pandemi.

Gambar 1. Persentase Rencana Migrasi Kembali Pelajar Indonesia di Luar Negeri, 2020 (N=248)



Sumber: Diolah dari data survei online pada 13 April - 12 Mei 2020 (Hidayati, 2020)

Penundaan kepulangan ke Indonesia ini merupakan situasi yang cukup rumit, apalagi bagi migran pelajar yang sudah terjadwal pulang sepanjang tahun 2020 ini. Sebagian memang tetap pada rencana semula, yaitu pulang ke Indonesia. Namun kondisi ini ternyata tidak berlaku untuk semua pelajar, sekelompok pelajar memilih untuk membatalkan atau menunda kepulangannya setidaknya hingga akhir tahun 2020. Hasil wawancara menyebutkan sebagian besar partisipan mengaku khawatir jika pulang ke Indonesia, mereka tidak akan bisa masuk lagi ke negara tempatnya studi.

“Adanya kebijakan terkait COVID-19 yang dapat menghambat sampainya saya di rumah dan saya khawatir tidak bisa kembali ke Thailand. Kalau melihat kebijakan yang berlaku saat ini di Thailand. Apalagi kabarnya jika sudah terlanjur keluar dari sini, masuknya lagi harus punya asuransi yang mahal banget...” (Aa, perempuan, migran pelajar di Thailand)

Proses pengambilan keputusan migran pelajar untuk menetap, pulang atau menunda kepulangan memang bukan proses yang mudah. Untuk mengambil keputusan migran perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang melekat pada situasi mereka. Lipshitz dan Pras (2005) membagi proses pengambilan keputusan dalam dua fase, yaitu fase mendefinisikan situasi yang sedang dialami dan fase tindakan yang merupakan implementasi, evaluasi dan elaborasi.

Fase pertama menunjukkan migran akan mengumpulkan semua informasi dan data terkait keputusan yang akan dilakukan kemudian memustuskan satu tindakan dari beberapa pilihan yang ada. Proses pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi individu, keluarga hingga komunitas (Tucker dkk., 2012). Hasil kajian Hidayati (2017) menunjukkan bahwa pengambilan bermigrasi migran pelajar merupakan keputusan individu yang dipengaruhi oleh faktor keluarga/orang tua dan komunitasnya. Seseorang akan mudah memutuskan bermigrasi apabila keluarga dan komunitasnya mendukung dengan berbagai informasi yang bisa menjadi faktor pendorong migrasi.

Untuk kondisi mahasiswa yang masih aktif masa studinya, pertimbangan aturan imigrasi negara tempat studinya memang menjadi faktor penting dalam mengambil keputusan apakah tahun ini akan pulang atau tidak ke Indonesia. Bahkan beberapa pelajar juga menunda kegiatan *fieldwork* di Indonesia karena kekhawatirannya terhadap pandemi COVID-19. Selain itu penundaan kepulangan juga dilakukan oleh 6 orang dari 49 pelajar yang sudah menyelesaikan masa studinya. Alasan penundaannya karena penerbangan internasional yang dibatalkan dan kekhawatiran terhadap situasi di Indonesia, tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan migran pelajar yang masih memiliki ijin tinggal hingga akhir tahun 2020.

Sebagian besar responden (87,7 persen) yang menunda kepulangannya mengaku khawatir jika mengunjungi Indonesia pada periode Mei-Desember 2020. Penundaan ini juga diperkuat dengan himbuan *social distancing* maupun *physical distancing* yang dilakukan di seluruh dunia yang membuat semua orang lebih baik tetap tinggal di rumah, menghindari kerumunan dan juga menunda perjalanan baik internal maupun internasional (Vieira, Franco, Restrepo & Abel, 2020).

Bahkan berbagai negara menerapkan kebijakan karantina wilayah untuk menekan penyebaran COVID-19. Semua migran pelajar sudah memiliki pemahaman jika mereka berpotensi menjadi pembawa virus dan menyebarkan COVID-19 di kampung halamannya. Pemahaman ini diadaptasi oleh para migran dari penanganan COVID-19 yang relatif lebih baik di luar negeri.

Penundaan kepulangan para migran pelajar bukan merupakan situasi yang mudah, apalagi bagi mereka yang tinggal di luar negeri sendirian tanpa ditemani oleh anggota keluarga lainnya. Sebagian besar keputusan untuk menunda kepulangannya utamanya merupakan keputusan individu migran pelajar, kemudian masukan dan pertimbangan dari keluarga di Indonesia menjadi faktor pendukung (Tucker dkk., 2012). Migran, baik pekerja atau pelajar, saat tinggal jauh dari keluarganya mengalami kondisi merasa tidak aman (*insecure*) dan kondisi emosionalnya terganggu (Maji dkk., 2020). Apalagi perkembangan COVID-19 di Indonesia cukup mengkhawatirkan, risiko tinggi untuk tertular pada orang tua dan kerabat para migran di Indonesia bisa jadi menambah beban pikiran para migran pelajar. Pengambilan keputusan untuk menunda kepulangan muncul dari diri sendiri berdasarkan pertimbangan yang dimiliki, namun akumulasi faktor informasi dari jaringan sosialnya juga memengaruhi keputusan yang dipilih migran pelajar.

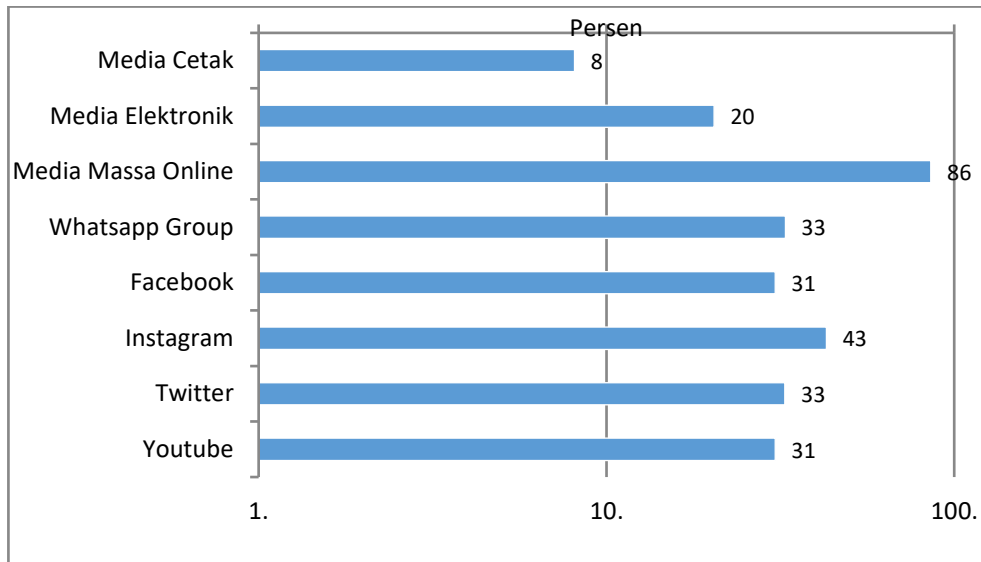
Lebih lanjut, untuk memutuskan migrasi kembali, semua migran pelajar memanfaatkan berbagai platform saluran informasi untuk mengikuti perkembangan COVID-19 di Indonesia (Gambar 2). Sebagian besar mencari informasi terkait melalui media massa online (85,7 persen) dan melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* hingga *Whatsapp Group*.

Sumber informasi berbasis online menjadi pilihan bagi semua migran di luar Indonesia untuk mengikuti perkembangan berita, termasuk COVID-19. Hasil wawancara menyebutkan bahwa migran pelajar biasanya mencari sumber informasi melalui media online maupun media sosial kemudian saling mendiskusikannya di *Whatsapp* ataupun platform percakapan digital lainnya. Jaringan sosial migran pelajar di Indonesia juga menjadi sumber informasi penting, untuk mereka mendapatkan informasi aktual dan terpercaya dari rekannya yang terlibat dalam

penanganan COVID-19 di Indonesia. Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, hal ini akan menjadi faktor pengambilan keputusan para migran pelajar untuk kembali ke Indonesia atau menetap sementara di negara tempat studinya. Di sini dapat diambil

kesimpulan sementara bahwa teknologi komunikasi dan informasi dapat memberikan dukungan signifikan kepada penduduk untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 (Chakraborty & Maity, 2020).

Gambar 2. Sumber Informasi Terkait Perkembangan Informasi COVID-19 di Indonesia Bagi Pelajar Migran yang Menunda Kepulangannya, 2020 (N=44)



Sumber: Diolah dari data survei online pada 13 April - 12 Mei 2020 (Hidayati, 2020)

Namun demikian, faktor kondisi ekonomi bisa menjadi permasalahan utama bagi migran, terutama bagi pelajar dengan beasiswa. Uang beasiswa yang sudah habis ditambah ketidakpastian hidup di luar negeri menjadi pendorong utama para migran pelajar untuk memutuskan pulang walaupun risiko COVID-19 untuk kesehatan dan keamanan masih sangat besar. Hasil wawancara mendalam dengan salah seorang pelajar di Jerman menggambarkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi pendorong utama untuk pulang ke Indonesia.

“Sekarang udah tahun terakhir di studi saya, tinggal menyelesaikan disertasi dan sidang. Saya akan pulang di akhir tahun 2020. Semoga COVID sudah mereda. Ya karena beasiswa sudah habis juga, takut juga dengan risiko tertular COVID-19 di perjalanan, apalagi transit di Abu Dhabi. Inginnya tinggal di sini (sampai lulus). Tapi ya bagaimana lagi, nanti kalau pulang saya akan isolasi mandiri, sekalian menyelesaikan menulis disertasi.”
(Ab, laki-laki, migran pelajar di Jerman)

Mobilitas penduduk memang menjadi salah satu potensi terciptanya kluster baru penyebaran COVID-19. Hasil kajian Maji dkk., (2020) menyebutkan kepulangan pekerja migran ke Maharashtra - India menyebabkan peningkatan kasus positif COVID-19. Hal ini tentu saja akan terjadi pada migrasi kembali migran pelajar, melihat banyaknya migran pelajar yang bersekolah di pusat penyebaran COVID-19 seperti Amerika Serikat, China, Perancis maupun Italia.

Migrasi pelajar seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena tidak mudah untuk membendung arus pergerakan penduduk dalam waktu yang lama. Data menunjukkan dalam dua tahun terakhir tren migrasi pelajar internasional masih terus meningkat, termasuk pelajar dari Indonesia yang menempuh studinya di berbagai universitas seperti Australia, Kanada dan Amerika Serikat (Coyne & Yatsyshina, 2020). Latar belakang pemilihan negara-negara tersebut karena kualitas pendidikan yang sudah tidak diragukan lagi. Arus dan pola migrasi pelajar ini tentunya akan berubah di situasi pandemi COVID-19 ini, setidaknya akan tertunda untuk sementara waktu.

Kajian Coyne dan Yatsyshina (2020) menyebutkan dampak COVID-19 yang paling terlihat dalam fenomena migrasi pelajar adalah terjadinya pembatasan hingga penutupan mobilitas pelajar. Kondisi ini bisa berlaku pada situasi pelajar yang tidak bisa pulang ke negaranya maupun pelajar yang tidak bisa menuju negara tempat studinya. Migran yang memiliki keterbatasan mengakses fasilitas layanan publik di negara tempat tinggalnya (*host country*) akan menjadi pihak yang paling dirugikan (Vieira dkk., 2020).

Sudah sewajarnya negara setempat memastikan para migran untuk mendapatkan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk menyediakan informasi terkait COVID-19 dalam berbagai bahasa yang dipahami migran internasional (Hargreaves dkk., 2020). Jika pada kondisi normal, para migran yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya di luar negeri bisa memutuskan pulang. Namun situasi ini tidak akan mudah dilakukan karena berbagai regulasi yang mengatur pergerakan penduduk. Tidak bisa dipungkiri kalau koridor migrasi yang menghubungkan negara asal dan tujuan akan menjadi indikator penyebaran pandemi (Sirkeci & Yucesahin, 2020). Kondisi ini memerlukan kebijakan yang tepat dan cepat mengingat virus berkembang dengan pesat, sementara mobilitas penduduk termasuk migrasi pelajar juga tidak bisa terlalu lama ditahan. Dalam jangka waktu panjang, penutupan penerimaan pelajar internasional juga akan berdampak bagi kondisi ekonomi suatu negara. Tidak bisa dipungkiri keberadaan migran pelajar telah menjadi sumber pemasukan di berbagai negara (Liem dkk., 2020).

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 menjadi alasan sebagian migran pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri untuk menunda kepulangannya. Berbagai faktor penghambat migrasi kembali seperti alasan kesehatan, keamanan, transportasi hingga aturan imigrasi negara setempat membuat para migran pelajar tetap tinggal di luar negeri hingga kondisi membaik.

Proses pengambilan keputusan pada migran pelajar muncul dari diri sendiri kemudian diperkuat dengan dukungan keluarga dan komunitas, termasuk faktor informasi yang diperoleh dari jaringan sosialnya. Informasi yang diperoleh melalui media sosial yang

dimiliki migran pelajar menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan untuk pulang ke Indonesia atau menunda untuk sementara. Keputusan untuk menetap sementara di luar negeri bukan suatu kondisi yang mudah, terutama bagi migran pelajar yang ijin tinggalnya habis di tahun 2020 ini.

Dampak sebagian migran pelajar yang menunda kepulangannya adalah situasi ekonomi, terutama bagi pelajar yang hanya mengandalkan kebutuhan hidupnya dengan beasiswa, memperpanjang masa tinggal di luar negeri tentu saja bukan sesuatu yang murah. Untuk meringankan beban migran pelajar, dan migran Indonesia di luar negeri pada umumnya, pemerintah Indonesia bisa memberikan bantuan pangan lebih intensif. Pemerintah Indonesia juga diharapkan berdiplomasi ke institusi pendidikan tempat migran pelajar agar diberikan keringanan membayar biaya pendidikan hingga menambah lama ijin tinggal para migran pelajar. Di situasi pandemi ini diharapkan pemerintah negara setempat maupun perwakilan pemerintah Indonesia bisa hadir dalam mengatasi permasalahan yang mungkin timbul akibat penundaan kepulangan para migran pelajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai negara yang telah membantu menyebarkan dan mengisi kuesioner penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achenbach, R. (2016). *Return migration decisions: A study on highly skilled Chinese in Japan*. Springer.
- Baron, R.A., Branscombe, N.R., & Byrne, D. (2008). *Social Psychology*: 12th Ed. MA (US): Pearson
- Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. *Science of The Total Environment*, 728(1), 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882>
- Coyne, C., & Yatsyshina, Y. (2020). Immigration Reform Is Key in the Recovery from the COVID-19 Crisis. *Policy Brief*.

- https://www.mercatus.org/system/files/coyne_and_yatsyshina_policy_brief_cfi_series_f1_and_h1b_visa_reform_may_offset_the_negative_effects_of_covid-19_v1.pdf
- Hargreaves, S., Kumar, B. N., McKee, M., Jones, L., & Veizis, A. (2020, Maret 26). *Europe's migrant containment policies threaten the response to covid-19*. *The BMJ*. <https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1213.full>
- Hidayati, I. (2017). The Role of Social Media on Migration Decision-making Processes: Case of Indonesian Student in University of Groningen. *Jurnal Studi Pemuda*, 6(1), 515-526. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.38010>
- Hidayati, I. (2020). Data survei online "PULANG ATAU MENETAP: Intensi Migrasi Pelajar Indonesia yang Tinggal di Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19" yang diambil pada kurun waktu 12 April-13 Mei 2020. Dataset.
- International Organization for Migration [IOM]. (2020). World Migration Report 2020. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf.
- Liem, A., Wang, C., Wariyanti, Y., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2020). The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic. *The Lancet Psychiatry*, 7(4), e20. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30076-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30076-6)
- Lipshitz, R. & Pras, A. A. (2005). Not Only for Experts: Recognition Primed Decisions in the Laboratory. In, H. Montgomery, R. Lipshitz & B. Brehmer (Eds.), *How Experts Make Decisions*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Maji, A., Sushma, M. B., & Choudhari, T. (2020, Mei 9). Implication of Inter-State Movement of Migrant Workers during COVID 19 Lockdown using Modified SEIR Model. Population and Evolution: Cornell University. <https://arxiv.org/abs/2005.04424>
- Muhyadi, M. (2003). Teknik Pengambilan Keputusan. *Efisiensi Kajian Ilmu Komunikasi*, 3(2), 111-120. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i2.3796>
- Ranjan, R., & Bisht, M. (2020). Novel Coronavirus and Indian Overseas Labour Migrants: Updates from Gulf Cooperation Council Countries. *Roots and Routes*, 9(1-4). [https://grfdt.com/Upload/Publication/10128_GR_FDT_Novel%20Coronavirus%20and%20Indian%20Overseas%20Labour%20Migrants.edited%20\(1\).pdf](https://grfdt.com/Upload/Publication/10128_GR_FDT_Novel%20Coronavirus%20and%20Indian%20Overseas%20Labour%20Migrants.edited%20(1).pdf)
- Ratha, D. K., De, S., Kim, E. J., Plaza, S., Seshan, G. K., & Yameogo, N. D. (2020). COVID-19 crisis through a migration lens (No. 147828, pp. 1-50). *Migration and Development Brief* 32. <http://documents.worldbank.org/curated/en/989721587512418006/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens>
- Sirkeci, I., & Yucesahin, M. M. (2020). Coronavirus and Migration: Analysis of Human Mobility and the Spread of Covid-19. *Migration Letters*, 17(2), 379-398. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=846629>
- Tucker, C. M., Torres-Pereda, P., Minnis, A. M., & Bautista-Arredondo, S. A. (2012). Migration Decision-Making Among Mexican Youth. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 35(1), 61-84. <https://doi.org/10.1177/0739986312458563>
- Vieira, C. M., Franco, O. H., Restrepo, C. G., & Abel, T. (2020). COVID-19: The forgotten priorities of the pandemic. *Maturitas*, 136 (01), 38-41. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.04.004>
- World Health Organization [WHO]. (2020, Juni 23). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. *WHO*. <https://covid19.who.int/>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

POTENSI POLA ALIRAN MUDIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

(THE POTENTIAL OF "MUDIK" FLOWS PATTERNS IN COVID-19 PANDEMIC)

Ari Purwanto Sarwo Prasajo*, Yulinda Nurul Aini, Dwiyantri Kusumaningrum

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

*Korespondensi penulis: arip002@lipi.go.id

Abstract

Millions of people in Indonesia traditionally return to their home town every year in a tradition called "mudik". Unlike previous years, the annual tradition has become a cause for concern after COVID-19. This article presents the potential of mudik flows patterns during the COVID-19 pandemic, which were divided into 11 regions. We use a chord diagram to show the potential of mudik flows patterns based on primary survey data on community perceptions regarding mobility and transportation during COVID-19. The results show that the most massive mudik flow is expected to occur from Jabodetabek to Central Java. Jabodetabek is the highest mudik origin, while Central Java and East Java are the highest mudik destinations. We suggest that government should anticipate the spread of COVID-19 by limiting mobility as they have been done this year. In addition, this must also be supported by citizen's awareness and coordination between local governments.

Keywords: chord diagram, COVID-19, flow patterns, mudik, mobility

Mudik merupakan fenomena sosial di Indonesia yang terjadi setiap tahun. Mudik pada dasarnya dimaknai sebagai pulang ke kampung halaman, khususnya pada hari-hari besar seperti hari Lebaran. Fenomena mudik mulai menjadi tren sejak berkembangnya kota-kota besar di Indonesia pada awal tahun 1970-an (Somantri, 2007). Sejak tahun 70-an, kota-kota berkembang sebagai simpul sumber penghidupan sekaligus tempat singgah bagi para pendatang yang berasal dari berbagai daerah.

Warga kota, khususnya pendatang dari desa yang telah bermigrasi cukup lama ke kota biasanya melakukan aktivitas mudik pada hari libur kerja yang panjang dan bermakna kultural seperti Lebaran, Natal maupun Tahun Baru (Somantri, 2007). Dari tahun ke tahun, mudik tidak pernah menjadi hal yang mengkhawatirkan selain persoalan kemacetan. Namun, pada tahun 2020 ini, mudik menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan

karena adanya pandemi COVID-19¹ yang juga melanda Indonesia.

Sejak kasus positif pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, tren kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 8 Juni 2020, total jumlah kasus positif di Indonesia kini mencapai 32.033 kasus yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus terbanyak hingga saat ini berada di Provinsi DKI Jakarta dengan 8.033 kasus (25,8 persen) dan Provinsi Jawa Timur dengan 5.948 kasus (19,1 persen).

Pada masa pandemi COVID-19, kota-kota besar tidak hanya menjadi simpul kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi simpul penyebaran COVID-19. Mobilitas manusia yang tinggi di wilayah perkotaan kini menjadi faktor utama dalam penyebaran COVID-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mobilitas manusia

¹ Menurut *World Health Organization (WHO)*, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus dan penyakit ini pertama kali muncul pada

wabah yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

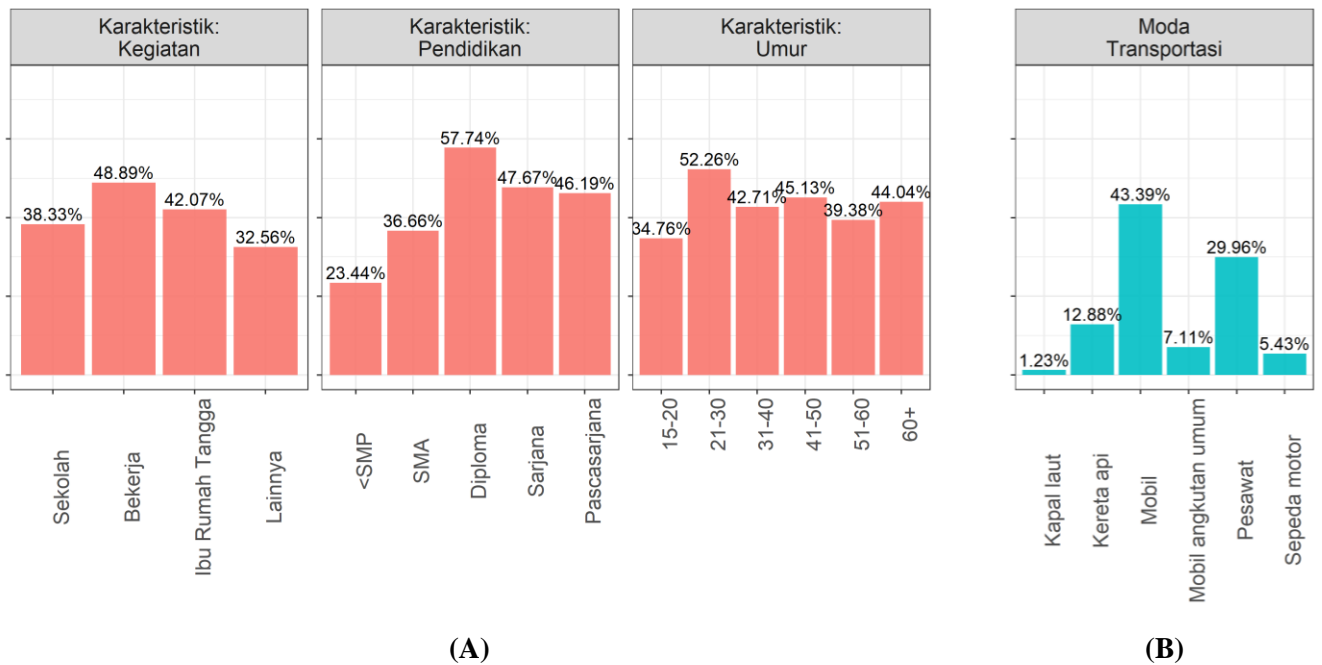
sangat berperan dalam penyebaran wabah (Hisi dkk., 2019; Merler & Ajelli, 2012; Universitas Rovira i Virgili, 2018). Dalam konteks ini, fenomena mudik dipandang sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menyebarkan COVID-19. Di Indonesia, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling rentan karena memiliki aktivitas mudik yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain.²

Artikel ini menyajikan potensi pola aliran mudik di masa pandemi COVID-19 yang dibagi ke dalam 11 wilayah, yakni: Jabodetabek³, Jawa Barat tanpa Bodebek⁴ (Jabar*), Banten tanpa Tangerang Raya⁵ (Banten*), Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur (Jatim), Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara (Bali & Nusra), Sulawesi, Maluku & Papua. Potensi aliran mudik kami sajikan dengan visualisasi plot *chord diagram* yang dibuat dengan menggunakan paket *circlize* pada program R (Gu dkk., 2014). Setiap aliran merepresentasikan asal, tujuan, arah, dan besaran aliran antar wilayah. Kami menggunakan data Survei Aspek

Sosial COVID-19 tentang persepsi masyarakat terkait mobilitas dan transportasi dalam menghadapi wabah COVID-19 yang dilakukan oleh Tim Panel Sosial Kebencanaan LIPI beserta beberapa universitas dan lembaga. Survei dilaksanakan secara daring menggunakan *platform* Google pada 28 Maret - 2 April 2020 dengan target responden penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia.

Pengumpulan data survei menggunakan teknik pengambilan sampel kombinasi⁶ *accidental, voluntary*, dan *snowball sampling*. Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 4.602 dengan persentase laki-laki dan perempuan setelah dilakukan *matching*⁷ karakteristik demografi jenis kelamin berturut-turut adalah 50,00 persen dan 49,99 persen. Kemungkinan aliran mudik didefinisikan sebagai perbedaan antara kabupaten/kota tempat tinggal dengan rencana perjalanan mudik atau ke luar kota. Rencana tersebut akan dilakukan pada waktu awal April, awal Ramadhan, masa cuti Idul Fitri atau setelahnya.

Gambar 1. (A) Persentase Responden yang Memiliki Rencana Mudik Menurut Kegiatan, Pendidikan, Umur. (B) Persentase Moda Transportasi yang Dipilih Responden yang Merencanakan Pemudik



Sumber: data primer diolah dan divisualisasi oleh penulis (2020)

² Riset yang dilakukan oleh Tirto.id tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Pulau Jawa adalah kampung halaman bagi sebagian besar pendatang yang tinggal di kota dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai destinasi mudik tertinggi.

³ Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

⁴ Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

⁵ Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

⁶ Berkaitan dengan operasional pengumpulan data, tautan kuesioner survei di sebar melalui media sosial diteruskan antar orang ke orang dan partisipasi survei sifatnya sukarela. Metode ini untuk mendapatkan respon partisipan sebanyak-banyaknya.

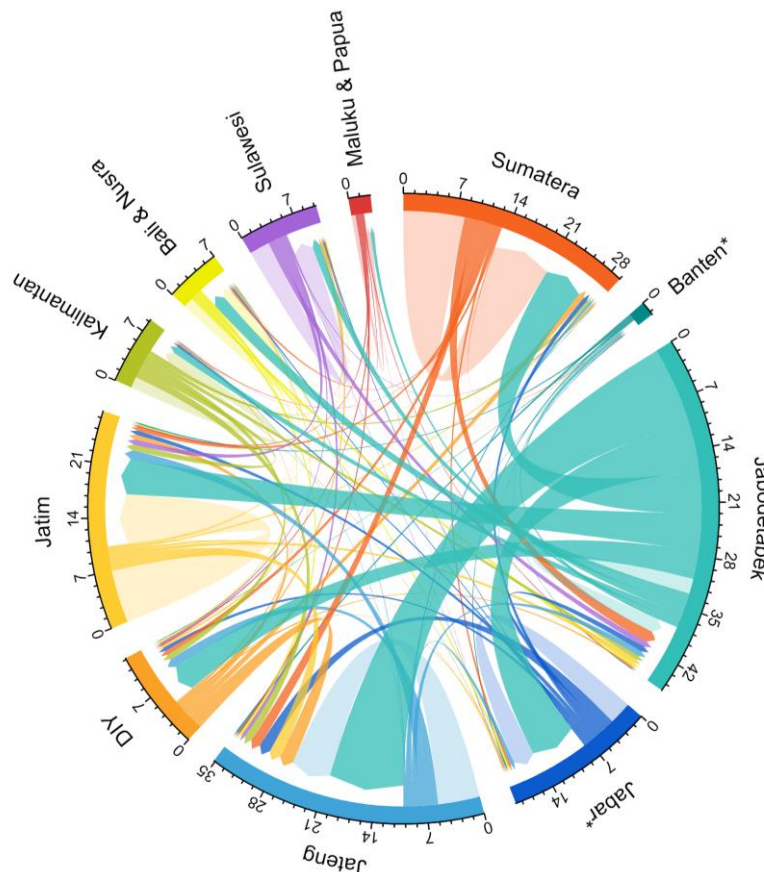
⁷ Proses pemberian bobot supaya variabel yang diminati memiliki sebaran yang mirip dengan kondisi populasi.

Berdasarkan hasil survei, wabah COVID-19 tidak menjadi halangan bagi penduduk yang berniat untuk mudik. Meskipun banyak dari mereka yang memilih untuk menunda mudik, namun persentase penduduk yang berencana mudik masih cukup besar, yaitu sekitar 44,00 persen. Libur nasional terutama saat Idul Fitri menjadi momen penduduk untuk melaksanakan mudik (Iriyanto, 2012). Bahkan 60,64 persen dari responden yang berencana mudik memilih untuk melaksanakan mudik di waktu ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari (2019) yang menyatakan bahwa mayoritas pemudik merencanakan perjalanan mudik dari H-3 sampai hari-H Lebaran. Berdasarkan kegiatan dan pendidikan tertinggi, responden yang kegiatannya bekerja, berpendidikan diploma ke atas, berturut-turut menjadi responden yang paling banyak merencanakan mudik. Sementara jika dilihat berdasarkan kelompok umur, responden pada kelompok umur 21-30 menjadi

responden yang paling banyak merencanakan mudik (Gambar 1A). Adapun moda transportasi yang banyak dipilih responden dalam merencanakan mudik adalah mobil pribadi dan pesawat (Gambar 1B).

Plot *chord diagram* pada Gambar 2 menyajikan 99 potensi aliran mudik, 11 di antaranya adalah aliran internal. Informasi yang disajikan pada plot tersebut mencakup wilayah asal dan tujuan, arah, serta besaran aliran mudik. Arah aliran ditunjukkan dengan panah pada ujung pita, sedangkan lebar pita mewakili besaran aliran. Pita disusun secara berurutan menurut besarnya aliran. Panjang absis pada setiap wilayah menunjukkan aliran mudik bruto, yakni jumlah antara aliran mudik internal, keluar, dan masuk. Setiap wilayah diberikan warna yang berbeda, sedangkan aliran internal diberikan warna yang lebih transparan.

Gambar 2. Potensi Pola Aliran Mudik (Besaran dalam persen)



Sumber: data primer diolah dan divisualisasi oleh penulis (2020)

Berdasarkan Gambar 2, Jabodetabek menjadi wilayah dengan calon pemudik terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 37,65 persen. Calon pemudik dari wilayah ini memiliki tujuan mudik yang tersebar di beberapa wilayah. Aliran terbesar terjadi dari Jabodetabek menuju Jateng dengan persentase sebesar 10,44 persen

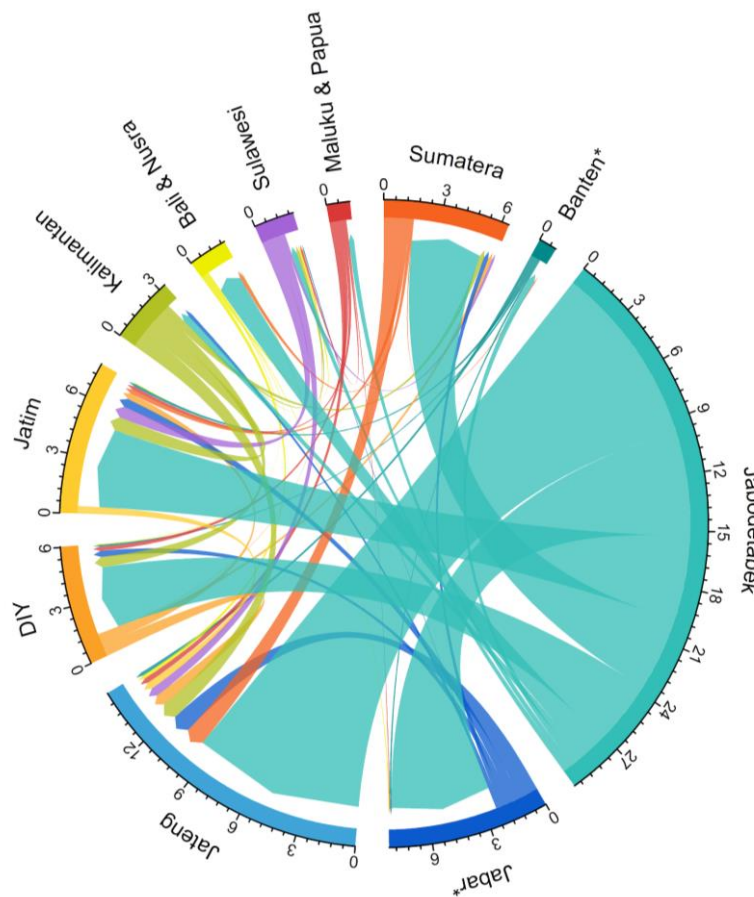
dari responden yang berencana mudik. Selain Jawa Tengah, Jabar* (6,38 persen), Sumatera (5,54 persen), Jatim (4,99 persen), dan DIY (3,71 persen) menjadi tujuan bagi calon pemudik dari Jabodetabek. Sumatera menjadi wilayah kedua dengan persentase calon pemudik tertinggi (13,09 persen). Aliran di wilayah ini

didominasi oleh aliran internal (8,07 persen). Beberapa wilayah lain yang diperkirakan juga akan didominasi oleh aliran internal antara lain Jatim (6,97 persen), Jateng (5,54 persen), Jabar* (3,02 persen), dan Sulawesi (2,67 persen). Tanpa melihat aliran internal, wilayah yang diperkirakan menjadi pengirim pemudik terbanyak di antaranya adalah Jabodetabek (35,77 persen) dan Sumatera (5,05 persen), sedangkan wilayah penerima pemudik terbanyak adalah Jateng (19,54 persen) dan Jatim (10,24 persen).

Untuk memperjelas pola aliran, kami membuat aliran mudik neto yang disajikan pada Gambar 3. Visualisasi *chord diagram* ini menyediakan representasi yang lebih efektif untuk melihat arah mobilitas dibanding plot pada Gambar 2 (Abel & Sander, 2014). Aliran mudik neto

dihitung dari selisih aliran yang keluar dan yang masuk antar setiap pasangan aliran (Qi dkk., 2017). Angka positif yang dihasilkan dari perhitungan tersebut menunjukkan aliran keluar yang lebih besar, sedangkan angka negatif menunjukkan aliran masuk yang lebih besar. Pada Gambar 3, kami hanya menyajikan angka yang positif, tetapi aliran mudik masuk neto dapat dilihat dari lebar pita yang masuk di setiap wilayah. Berdasarkan Gambar 3, aliran terbesar adalah dari Jabodetabek ke Jateng. Jabodetabek menjadi wilayah pengirim pemudik terbesar, sedangkan Jateng dan Jatim adalah dua provinsi penerima terbesar dari berbagai wilayah (yang dominan berasal dari Jabodetabek). Pola aliran ini konsisten dengan pola aliran yang disajikan pada Gambar 2.

Gambar 3. Potensi Pola Aliran Mudik Neto (Besaran dalam persen)



Sumber: data primer diolah dan divisualisasi oleh penulis (2020)

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi penduduk untuk melakukan kegiatan mudik. Aliran mudik terbesar diperkirakan akan terjadi dari Jabodetabek ke Jateng. Jabodetabek menjadi wilayah pengirim pemudik terbesar, sedangkan Jateng dan Jatim

berturut-turut sebagai provinsi penerima terbesar. Di samping soal kultur masyarakat, motivasi mudik yang dimiliki sebagian penduduk pada tahun ini juga disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya karena adanya ketidakpastian atau hilangnya pekerjaan akibat dampak COVID-19, berpisah dari keluarga, perubahan

lingkungan sosial, dan takut tertular virus (Ivakhnyuk, 2020).

Temuan juga menunjukkan bahwa responden dengan kegiatan bekerja menjadi responden yang paling banyak merencanakan mudik. Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan responden yang terjaring dalam survei, yakni adanya kecenderungan terkonsentrasi pada kelompok menengah ke atas. Namun demikian, temuan tersebut cukup memberikan informasi bahwa kelompok pekerja, baik formal maupun informal perlu menjadi perhatian dalam hal mudik ini.

Mudik menjadi sangat mengkhawatirkan karena membuka potensi bahaya lainnya karena pemudik belum tentu 100 persen bebas dari virus. Pemudik sangat berpotensi menjadi *carrier* atau pembawa virus dari daerah yang telah terpapar COVID-19 sehingga dapat menjadi sumber penularan dan memperluas wilayah keterpaparan COVID-19. Potensi virus menginfeksi lebih banyak orang semakin besar sehingga episentrum COVID-19 bisa muncul akibat tingginya aliran mudik ke suatu wilayah. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa Jatim dan Jateng sebagai wilayah yang diperkirakan menjadi wilayah terbesar sebagai penerima pemudik kini telah menjadi episentrum baru penyebaran COVID-19 dan

menempati 5 besar wilayah dengan jumlah kasus positif tertinggi di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).

Potensi pola aliran mudik dan penularan yang telah diulas sangat mungkin terjadi baik pada tahun ini maupun pada tahun berikutnya jika pandemi belum usai. Intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, salah satunya dengan mengeluarkan larangan mudik dan juga mengatur kebijakan transportasi darat dan udara untuk membatasi mobilitas penduduk seperti yang telah dilakukan pada tahun ini. Di samping itu, larangan mudik juga harus didukung dengan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat serta koordinasi yang baik antar pemerintah daerah agarantisipasi penyebaran COVID-19 dapat berjalan optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim Panel Sosial Kebencanaan di bawah koordinasi Kedeputusan Bidang IPSK-LIPI sebagai penyelenggara Survei Aspek Sosial COVID-19 tentang persepsi masyarakat terkait mobilitas dan transportasi dalam menghadapi wabah COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, G. J., & Sander, N. (2014). Quantifying Global International Migration Flows. *Science*, 343(6178), 1520-1522. <https://doi.org/10.1126/science.1248676>
- Gu, Z., Gu, L., Eils, R., Schlesner, M., & Brors, B. (2014). Circlize implements and enhances circular visualization in R. *Bioinformatics*, 30(19), 2811-2812. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu393>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Peta Sebaran*. Retrieved 4 Juni 2020 from <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Hisi, A. N. S., Macau, E. E. N., & Tizei, L. H. G. (2019). The role of mobility in epidemic dynamics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 526, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.03.028>
- Iriyanto, A. M. (2012). Mudik dan Keretakan Budaya. *Humanika*, 15(9). <https://doi.org/10.14710/humanika.15.9>
- Ivakhnyuk, I. (2020). Coronavirus pandemic challenges migrants worldwide and in Russia. *Population and Economics*, 4(2), 49-55. <https://doi.org/10.3897/popecon.4.e53201>
- Lestari, F. (2019). Kajian Karakteristik Arus Mudik Lebaran Menggunakan Survei Online. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 21(1), 31-36. <https://doi.org/10.25104/jptd.v21i1.1165>
- Merler, S., & Ajelli, M. (2012). Human mobility and population heterogeneity in the spread of an epidemic. *Procedia Computer Science*, 1(1), 2237-2244. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2010.04.250>
- Qi, W., Abel, G. J., Muttarak, R., & Liu, S. (2017). Circular visualization of China's internal migration flows 2010-2015. *Environment and Planning*, 49(11), 2432-2436. <https://doi.org/10.1177/0308518X17718375>

Somantri, G. R. (2007). *Kajian Sosiologis Fenomena Mudik*. Universitas Indonesia. <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/gumilar.r09/publication/kompilasi-buku.pdf>

Universitat Rovira i Virgili. (Januari, 2018). *Mobility patterns influence the spread and containment of an epidemic: Mathematical model predicts the spread of diseases in situations of recurring mobility*. Science Daily. <https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180118101224.htm>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PERSEPSI MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA *SOCIAL DISTANCING* DALAM PENANGANAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA

(THE PERCEPTION OF INDONESIANS CONCERNING THE IMPORTANCE OF SOCIAL DISTANCING AS AN EFFORT TO 'FLATTEN THE CURVE' OF COVID-19 IN INDONESIA)

Nina Novira^{1*}, Rudi Iskandar², Raehanul Bahraen³

¹Universitas Negeri Medan Indonesia

²Universitas Negeri Jakarta Indonesia

³Universitas Negeri Mataram Indonesia

*Korespondensi penulis: ninanovira@unimed.ac.id

Abstract

COVID-19 has spread worldwide including Indonesia. The government responds by appealing to the public to implement social distancing (sd) to contained the spread of the virus. However, without threats Concrete penalties and the absence of strict safeguards make the application of SD dependent on perception and compliance community only. Seeing the fact that some people continue their activities outside the home, various assumptions developing in the community. By using Google Form ®, this study aims to analyze perceptions the public on the importance of implementing SD as an effort to deal with Covid-19, confirmed the general assumptions that develops in the community, and traces the causes of the ineffectiveness of elementary school application. Research result shows that most of the community believes that adoption of SD is very important. However, that perception not always directly proportional to the appropriate behavior. The general perception is that those who stay out of the house are in the context of work and earning a living is not proven. Compared to attending invitations and stays organizing events that have been planned since before the plague, still worship in more houses of worship many cause people to leave the house.

Keywords: *community perception, COVID-19, social distancing*

COVID-19 pertama kali merebak di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 (Li dkk., 2020; Riou & Althaus, 2020). Meskipun Pemerintah baru mengumumkan kasus pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, banyak pihak percaya bahwa COVID-19 sudah jauh lebih dulu menjangkiti masyarakat Indonesia (Almuttaqi, 2020; Pranita, 2020; Massola, 2020). Segera setelah pengumuman resmi tersebut, pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan *social distancing (sd)* yang diartikan sebagai

pembatasan diri untuk keluar rumah, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik (Djalante dkk., 2020; Setiati & Azwar, 2020). Sebagian masyarakat muslim merespons himbuan tersebut dengan mengatakan bahwa himbuan tersebut selaras dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dalam menanganani wabah penyakit menular (Rajab dkk., 2020). Kelompok ini kemudian banyak mengedukasi masyarakat akan pentingnya *sd* baik dari segi medis maupun dari segi mengikuti tuntunan Rasulullah dalam

menangani wabah (Subarkah, 2020; Gugus Tugas Percepatan Penganganan COVID-19, 2020; Mukharom & Aravik, 2020). Kelompok lain mengedukasi masyarakat lewat sejarah penanganan wabah-wabah di masa lalu, seperti wabah flu spanyol dan kolera di Eropa dan wabah pes di Malang di masa penjajahan Belanda (Griffin & Denholm, 2020; Mukhaer, 2020; Fizriyani, 2020).

Penerapan *sd* di Indonesia tidak disertai dengan ancaman hukuman atau penertiban menyeluruh oleh aparat yang berwenang (Subarkah, 2020; Davina, 2020). Karena itu, implementasinya sangat bergantung pada kesadaran masyarakat sendiri. Sementara itu, ketika di satu sisi mayoritas masyarakat sepakat bahwa *sd* sangat penting diterapkan, namun di sisi lain mereka tidak sepaham dengan perlu tidaknya tempat ibadah ikut ditutup (Dimedjo, 2020). Masuknya bulan Ramadhan menambah keinginan sebagian masyarakat untuk beribadah di masjid dan mushola. Di saat yang sama, kebutuhan masyarakat untuk mencari pemasukan guna menyambung hidup memaksa sebagian

masyarakat untuk tetap melakukan keseharian seperti biasa. Selain itu terdapat pula kelompok yang menganggap remeh penyebaran COVID-19 serta tidak mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) (Mashabi, 2020) dan menganggap COVID-19 sebagai sebuah konspirasi dan rekayasa (Nursaniyah, 2020). Penelitian ini berupaya untuk menjawab dan menjelaskan persepsi masyarakat akan pentingnya penerapan *social distancing* sebagai upaya penanganan wabah COVID-19 di Indonesia berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, mengkonfirmasi asumsi umum yang berkembang di masyarakat tentang penerapan *sd* serta menganalisa penyebab kurang efektifnya penerapan kebijakan tersebut.

Dengan menggunakan fasilitas *Google Form*[®] sebagai angket yang disebarakan melalui media sosial dan relasi di berbagai kota di Indonesia pada rentang waktu 24 April – 10 Mei 2020, penelitian ini berhasil mengumpulkan 2.828 respons dari 32 Provinsi di Indonesia. Sebaran responden penelitian ini disajikan di Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Responden

Provinsi	Prosentase	Provinsi	Prosentase	Provinsi	Prosentase
Jawa Barat	26,87	Sulawesi Selatan	2,01	Kalimantan Utara	0,53
DKI Jakarta	13,96	Lampung	1,76	Bangka/Belitung	0,49
Jawa Tengah	7,49	Kalimantan Barat	1,73	Kalimantan Tengah	0,49
Banten	7,39	Sumatera Selatan	1,48	Papua	0,39
Jawa Timur	6,65	Kepulauan Riau	0,88	Bengkulu	0,21
Sumatera Utara	4,77	Kalimantan Selatan	0,81	Gorontalo	0,21
DIY	4,06	Sulawesi Tenggara	0,74	NTT	0,17
NTB	3,43	Aceh	0,63	Maluku Utara	0,14
Sumatera Barat	3,11	Bali	0,6	Sulawesi Utara	0,07
Kalimantan Timur	3,11	Jambi	0,56	Sulawesi Barat	0,01
Riau	2,65	Sulawesi Tengah	0,53		

Sumber: Data Primer, 2020

Penelitian ini menggunakan 6 parameter berdasarkan tipe perilaku dan aktifitas untuk menganalisa persepsi masyarakat tentang pentingnya penerapan *sd* di Indonesia dan implementasinya pada beberapa perilaku terkait *sd*, yaitu pertanyaan harfiah mengenai pentingnya *sd*, mengurangi keluar rumah, beribadah di rumah ibadah, menghadiri undangan hari raya atau pesta, penyelenggaraan acara yang sudah direncanakan, dan rencana mudik lebaran. Setiap parameter diberi nilai 1 – 5 yang menggambarkan kondisi terendah hingga tertinggi. Nilai akhir kemudian dibagi menjadi 5 kelas.

Sebanyak 87,9 persen responden menganggap penerapan *sd* sangat penting dengan 36, 8 persen responden memberikan nilai maksimal untuk seluruh parameter dan hanya sebanyak 0,6 persen yang masuk pada kelas 2. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya mayoritas masyarakat menganggap penting penerapan *sd* dalam penanganan COVID-19. Namun kami tidak berhenti sampai disitu. Kami juga menganalisa asumsi yang banyak berkembang di masyarakat tentang perbedaan perilaku masyarakat dalam menyikapi kebijakan *sd* yang dikaitkan dengan pendidikan, jenis pekerjaan, besarnya pendapatan, dan dampak *sd* pada

pendapatan. Lebih lanjut, kami menganalisa penyebab utama kurang efektifnya penerapan kebijakan *sd* di masyarakat. Karena yang diharapkan adalah pemahaman akan ketidakpatuhan terhadap kebijakan *sd*, maka data yang dianalisa adalah data-data dengan kelas dan nilai rendah.

Dari 17 responden yang masuk pada kelas 2 (terrendah), hanya 6 responden yang berprofesi sebagai pekerja

harian. Sebanyak 15 responden menyatakan tetap beribadah di rumah ibadah seperti biasa dan 2 responden menyatakan sedikit mengurangi. Sebanyak 14 responden menyatakan tetap akan mudik lebaran walaupun tidak ada perbaikan berarti. Profil lengkap responden yang masuk ke dalam kelas 2 dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Responden Dengan Nilai Akhir Kelas 2

Pekerjaan	Domisili	Pendidikan	Anggapan <i>sd</i>	Keluar Rumah	Ibadah di Rumah Ibadah	Menghadiri perayaan agama/pesta	Penyelenggaraan acara	Mudik Lebaran
Guru/Dosen/Peneliti	Sumatera Barat	SMA	1	1	1	5	1	1
Guru/Dosen/Peneliti	DKI Jakarta	Sarjana	5	5	1	1	1	1
Ibu rumah tangga	Jawa Barat	Mahasiswa	4	5	1	1	1	1
Ibu rumah tangga	Banten	Pasca Sarjana	5	5	1	1	1	1
Ibu rumah tangga	Sumatera Utara	Sarjana	5	5	1	1	1	1
Pedagang grosiran	Jawa Tengah	SMA	1	1	1	5	2	1
Pedagang rumahan	Jawa Timur	SD	2	1	1	1	5	2
Pedagang rumahan	Sumatera Utara	Sarjana	2	2	1	2	2	1
Pedagang rumahan	Jawa Barat	Mahasiswa	3	2	1	3	3	1
Pekerja harian	Jawa Barat	Pasca Sarjana	1	1	1	5	3	1
Pekerja harian	NTB	Sarjana	1	1	1	5	4	1
Pekerja harian	Jawa Barat	Sarjana	2	2	2	2	2	1
Pekerja harian	Jawa Timur	SMA	2	4	1	3	2	1
Pekerja harian	Sumatera Barat	SMA	3	1	1	1	3	1
Pekerja harian	Jawa Barat	Sarjana	4	3	1	1	1	3
Pengusaha export/import	Jawa Timur	Mahasiswa	1	4	1	1	5	1
PNS/Pegawai Kantoran dengan gaji tetap	Sumatera Utara	Sarjana	3	3	2	1	1	2

Sumber: Data Primer, 2020

Keterangan rentang penilaian: 1: nilai minimal yang dapat berarti sangat tidak penting, dan tetap seperti biasa; 5: nilai maksimal yang dapat berarti sangat penting, dan sangat tidak dilakukan

Terdapat 14 responden yang memberi jawaban sangat tidak penting untuk pertanyaan harafiah apakah menurut mereka kebijakan *sd* penting dilakukan sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Namun, dari 14 responden tersebut, hanya 5 responden yang menjawab sama sekali tidak

mengurangi untuk pertanyaan mengurangi keluar rumah. Bahkan 5 responden lain mengaku sangat mengurangi keluar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku keluar rumah mereka hanya sedikit mempengaruhi dan dipengaruhi persepsi tentang pentingnya kebijakan *sd*. Hal ini diperkuat dengan

adanya 15 dari 30 responden yang mengaku sama sekali tidak mengurangi keluar rumah, namun menganggap kebijakan *sd* sangat penting diterapkan. Di saat reponden yang menganggap kebijakan *sd* tidak penting sebanyak 14 responden, terdapat 30 responden menjawab sama sekali tidak mengurangi keluar rumah.

Dilihat dari jenis pekerjaan, sebanyak 50 persen dari 30 responden yang sama sekali tidak mengurangi keluar rumah tersebut memiliki pekerjaan yang memungkinkan untuk dikerjakan dari rumah, seperti Guru/Dosen/Peneliti, Ibu Rumah Tangga, dan PNS/Pegawai Kantoran dengan Gaji Tetap. Hanya 11 responden yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja harian yang sering diasumsikan sebagai kelompok yang tidak mengurangi keluar rumah dan melanggar anjuran *sd*. Dilihat dari tingkat pendidikan, terdapat 2 mahasiswa, 9 sarjana, 3 pasca sarjana, dan hanya 1 SD, sedangkan responden yang berpendidikan SD sebanyak 8 responden.

Dari 193 responden yang berprofesi sebagai pekerja harian, sebanyak 74 persen menjawab *sd* sangat penting dan hanya 1,5 persen yang menjawab sangat tidak penting. Meskipun nilainya turun ketika ditanya mengenai mengurangi keluar rumah, yaitu sebanyak 44,6 persen menyatakan sangat mengurangi dan 5,7 persen menyatakan tidak mengurangi sama sekali, namun nilai akhir menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Sebanyak 70,5 persen pekerja harian menempati kelas 5 dan hanya 3,1 persen yang menempati kelas terendah, yaitu kelas 2.

Dari 543 responden yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,-, hanya 4 responden yang menganggap kebijakan *sd* tidak penting dan hanya 15 responden yang sama sekali tidak mengurangi keluar rumah. Dari 68 responden pekerja harian yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,-, hanya satu responden yang menganggap kebijakan *sd* tidak penting dan 6 reponden yang sama sekali tidak mengurangi keluar rumah.

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mengurangi keluar rumah tidak dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, rendahnya pendidikan maupun rendahnya penghasilan. Jika bukan karena pekerjaan dan mencari pemasukan, lalu apakah yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan kebijakan *sd*?

Sebanyak 29 responden menyatakan akan tetap menghadiri perayaan keagamaan massal dan atau pesta dan 56 responden akan tetap menyelenggarakan perayaan, pesta, atau seminar yang telah direncanakan sejak sebelum pandemi. Di saat yang sama, terdapat 137 responden yang menyatakan tetap akan mudik lebaran dan 191 responden yang menyatakan tetap beribadah di rumah ibadah seperti biasa. Dari seluruh pertanyaan, beribadah di rumah ibadah dan mudik lebaran mendapat jawaban dilaksanakan seperti biasa terbanyak dengan perbedaan kuantitas yang cukup signifikan. Mungkinkah hasrat masyarakat untuk tetap beribadah di rumah ibadah menjadi penyebab utama tidak efektifnya implementasi *sd* di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetap beribadah ke rumah ibadah sebagai faktor yang paling membuat masyarakat tetap keluar rumah. Namun, penelitian yang diluncurkan awal Mei 2020 ini belum mempertimbangkan keputusan pemerintah untuk mendorong strategi pemulihan ekonomi dan terlupa untuk mempertimbang eforia masyarakat dalam menyambut lebaran. Penelitian ini juga tidak menanyakan perilaku keluar rumah lain selain ibadah dan menghadiri undangan. Hal ini sayangnya menjadikan penelitian ini sedikit bias.

KESIMPULAN

Penjabaran di atas menghantarkan kita kepada beberapa benang merah. Yang pertama, bahwa persepsi umum akan pentingnya penerapan *sd* dalam menangani wabah tidak mampu mengontrol masyarakat agar berperilaku sesuai dengan persepsi umum tersebut. Seseorang bisa saja berpersepsi bahwa kebijakan *sd* sangat penting, namun tidak dapat menahan diri untuk keluar rumah guna berbagai kepentingan. Benang merah kedua yaitu bahwa persepsi umum tentang mereka yang tidak patuh berasal dari profesi, tingkat pendidikan, atau tingkat penghasilan tertentu tidak terbukti. Mereka yang dianjurkan bahkan wajib bekerja dari rumah pun tidak mengurangi keluar rumah dan beraktifitas seperti biasa. Benang merah ketiga, meskipun bias, menunjukkan satu hal. Banyaknya yang mengaku sangat mengurangi keluar rumah namun tetap beribadah di rumah ibadah menunjukkan bahwa di satu sisi, masyarakat Indonesia sangat religius. Sisi religiusitas tersebut mendorong masyarakat agar lebih dekat pada tuhan di masa sulit. Namun di sisi lain, perilaku tetap beribadah di rumah

ibadah ini dapat juga merupakan dampak dari propaganda yang mengolok-olok masyarakat yang tertib menahan diri untuk keluar rumah termasuk ke rumah ibadah. Untuk menjawab bias yang terjadi, peneliti akan melakukan studi lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyebaran dan pengisian kuisioner daring kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuttaqi, A. I. (2020, Maret 23). *The Omnishambles of COVID-19*. THC Insights No. 13, The Habibie Center.
- Davina, D. (2020, Maret 18). Tak Terapkan Lockdown Pemerintah Kampanyekan Social Distancing, Apa Bedanya? *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/article/71830/ini-yang-harus-dipahami-perbedaan-social-distancing-dengan-lockdown>.
- Dimedjo, E. (2020, Maret 20). Soal Corona, UAS: Kenapa Masjid Ditutup Mal Tidak. *Tagar.id*. <https://www.tagar.id/soal-corona-uas-kenapa-masjid-ditutup-mal-tidak>.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M.S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L.A., Suriarti, G.A.K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science* 6, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Fizriyani, W. (2020, April 12). Saat Kolonial Remehkan Wabah. *Republika*. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/q8rt8s393/saat-kolonial-remehkan-wabah>.
- Griffin, D., & Denholm, J. (2020). This isn't the first global pandemic, and it won't be the last. Here's what we've learned from 4 others throughout history. *The Conversation*. <https://theconversation.com/this-isnt-the-first-global-pandemic-and-it-wont-be-the-last-heres-what-weve-learned-from-4-others-throughout-history-136231>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Anjuran Menghindari Wabah dan Tidak Menyebarkannya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19* [Brosur]. <https://COVID19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/anjuran-menghindari-wabah-dan-tidak-menyebarkannya-telah-menjadi-salah-satu-sabda-rasulullah-saw>.
- Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., Ren, R., Leung, K.S.M., Yau, E.H.Y., Wong, J.Y., Xing, X., Xiang, N., Wu, Y., Li, C., Chen, Q., Li, D., Liu, T., Zhao, J.,... Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *The New England Journal of Medicine*, 382 (13), 1199-1207. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316>.
- Mashabi, S. (2020, Maret 20). Istana: Banyak Anak Muda Anggap Remeh Virus Corona. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/11104741/istana-banyak-anak-muda-anggap-remeh-virus-corona>.
- Massola, J. (2020, Mei 7). 'Not allowed to do testing': governor says Jakarta was tracking COVID-19 cases in January. *The Sydney Morning Herald*. <https://www.smh.com.au/world/asia/not-allowed-to-do-testing-governor-says-jakarta-was-tracking-COVID-19-cases-in-january-20200507-p54qnh.html>.
- Mukhaer, A. A. (2020, April 27). Selain COVID-19, Inilah 5 Wabah Paling Mematikan dalam Sejarah. *National Geographic*. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132120840/selain-COVID-19-inilah-5-wabah-paling-mematikan-dalam-sejarah?page=all>.
- Mukharom, & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus COVID-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7 (3), 239-246. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>
- Nursaniyah, F. (2020, Mei 7). Temukan Bukti Konspirasi COVID-19, Jerinx: RS di Luar Negeri Kosong, Kata Teman Saya. *Pikiran Rakyat*. <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12378258/temukan-bukti-konspirasi-COVID-19-jerinx-rs-di-luar-negeri-kosong-kata-teman-saya>.

- Pranita, E. (2020, Mei 10). Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>.
- Rajab, A. J., Nurdin, M. S., & Mubarak, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan Mui dalam Menyikapi Wabah Covid-19. *Bustanul Fuqaha. Jurnal Bidang Hukum Islam 1* (2), 156-173.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.143>
- Riou, J., & Althaus, C.L. (2020). Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 to January 2020. *Euro Surveill*ance, 25 (4),
<https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.4.2000058> .
- Setiati, S., & Azwar, M. K. (2020). COVID-19 and Indonesia. *Acta Med Indonesia. Indonesian Journal of International Medicine* 52 (1), 84-89.
<http://www.actamedindones.org/index.php/ijim/article/view/1426/pdf>
- Subarkah, M. (2020, Maret 20). Teladan Nabi Muhammad Mencegah Wabah. *Republika*.
<https://republika.co.id/berita/q7hqrm385/teladan-nabi-muhammad-mencegah-wabah>.
- Subarkah, T. (2020, Maret 23). Social Distancing di KRL: Longgar di Peron, Padat di Kereta. *Media Indonesia*.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/298322-social-distancing-di-krl-longgar-di-peron-padat-di-kereta>.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

INISIATIF MASYARAKAT INDONESIA DI MASA AWAL PANDEMI COVID-19: SEBUAH UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN

(INDONESIAN COMMUNITY INITIATIVE IN THE EARLY PHASE OF THE COVID-19 PANDEMIC: A HEALTH DEVELOPMENT STRATEGY)

Marya Yenita Sitohang*, Angga Sisca Rahadian, Puguh Prasetyoputra

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

*Korespondensi penulis: maryayenita19@gmail.com

Abstract

The impact of the pandemic has influenced every aspect of people's life. One of the positive impacts of the pandemic in Indonesia is the existence of the community initiative to prevent the COVID-19 spreading. This article aims to explore several initiatives coming from the society in relation to COVID-19 and the lesson learned for the society to have preparedness in facing health disasters. The data come from the 39 online news on the internet, the data was then analysed using a content analysis method. The authors found that Indonesian community initiative can be distinguished by two purposes i.e. to prevent the transmission of COVID-19 and to help the vulnerability group cope with the economic impact of COVID-19. Furthermore, mostly the initiative originally came from society without the intervention of the government. It is important to note that the collaboration between the government, both the centre and local, and the society should be strengthened.

Keywords : *community initiative, COVID-19, role of government, society*

Dunia sedang menghadapi bencana yang disebabkan pandemi *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dimana penyakit ini, sampai dengan 31 Mei 2020, sudah menjangkiti lebih dari enam juta kasus dan merenggut lebih dari 370 ribu nyawa di seluruh dunia (Worldometer, 2020). Pandemi yang mulai masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020 ini telah melahirkan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangan, mulai dari level pemerintah pusat hingga level masyarakat.¹. Meskipun di level pemerintahan terjadi beberapa perubahan kebijakan dalam penanggulangan

COVID-19, di tingkat masyarakat muncul beberapa inisiatif untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan pandemi.

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam berbagai program kesehatan termasuk saat ini dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 (Wu dkk., 2020). Terdapat bukti-bukti adanya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 di belahan dunia lainnya dalam rangka menopang beban berat pelayanan kesehatan (Ebrahim dkk., 2020; Gharibah & Mehchy, 2020; Joffé, 2020). Sistem kesehatan yang disusun Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri menyebutkan bahwa masyarakat yang berdaya memegang peranan penting dalam upaya pembangunan kesehatan (Marston dkk., 2016). Upaya di tingkat masyarakat dalam konteks pandemi

¹ Artikel berita berjudul *Kebijakan Presiden terkait COVID-19 Disebut Bisa Berubah*. 26 April 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait-penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>

COVID-19 diharapkan bertujuan untuk mengontrol sumber penularan, memutus rantai penularan, dan melindungi kelompok penduduk yang rentan (TNCPERET, 2020). Selanjutnya, koordinasi yang kuat dari pemerintah dan sikap kooperatif masyarakat diperlukan agar upaya-upaya tersebut berjalan efektif dan efisien (Qian dkk., 2020). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan pencegahan serta pengurangan dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 serta menganalisis lebih lanjut pembelajaran dari pandemi COVID-19 agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi pandemi lainnya di masa depan.

Untuk itu, kami menganalisis kumpulan berita di situs berita daring (*online*) yang berkaitan dengan COVID-19 di Indonesia. Berita yang dikumpulkan merupakan terbitan dalam kurun waktu 1 Maret sampai dengan 30 April 2020 (Tabel 1). Pencarian berita dibatasi dengan menggunakan kata kunci inisiatif masyarakat dan COVID-19. Pencarian tersebut menghasilkan sebanyak 80 artikel di situs berita *online* yang kemudian dibaca lebih teliti isinya sehingga menghasilkan 39 artikel untuk dianalisis lebih mendalam. Selanjutnya kami melakukan analisis konten (*content analysis*) terhadap artikel-artikel tersebut (Cresswell & Poth, 2018). Analisis konten adalah salah satu metode untuk menganalisis teks atau informasi yang bersifat kualitatif dan bertujuan untuk menemukan pola-pola yang ada sehingga dapat melakukan interpretasi atas teks tersebut (GAO, 2013; Vaismoradi dkk., 2013).

Dari hasil identifikasi dan koding atas data yang ada, kegiatan-kegiatan yang diinisiasi masyarakat di awal masa pandemi COVID-19 dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, berbagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan kedua adalah upaya mengurangi dampak COVID-19. Inisiatif yang dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 antara lain :

1. Melakukan karantina wilayah dengan menutup pintu portal kawasan pemukiman.
2. Penerapan protokol kesehatan yaitu penggunaan masker, mencuci tangan, jaga jarak, desinfeksi, serta adanya surat kesehatan bagi pekerja informal yang beraktivitas.

3. Penyediaan bangunan untuk isolasi mandiri bagi pendatang berupa gedung sekolah.
4. Pembuatan dan pembagian masker, *hand sanitizer*, dan APD bagi tenaga kesehatan.
5. Penggalangan dana untuk APD tenaga kesehatan.
6. Edukasi *door to door* terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakan #dirumahaja di media sosial

Selanjutnya, upaya pengurangan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dilakukan melalui penggalangan dana, pemberian bantuan sembako, dan menyediakan makanan gratis bagi masyarakat terdampak yaitu pekerja sektor informal dan keluarga pra sejahtera.

Berdasar data yang ada, sebagian besar inisiatif yang dilakukan masyarakat muncul secara mandiri tanpa dikoordinasikan dan dikomandoi oleh pihak tertentu baik itu pemerintah daerah maupun otoritas kesehatan setempat misalnya puskesmas. Selain itu, peran pemerintah belum terlihat di semua berita yang menjadi sumber data penulis dan hanya dapat ditemukan di artikel tertentu. Peran pemerintah yang jelas terlihat yakni untuk kasus pembuatan masker di Sumatera Utara di mana pemerintah daerah melakukan promosi untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, masyarakat tersebut mendapatkan pesanan masker dari berbagai daerah sehingga memberi efek positif terhadap masyarakat terdampak COVID-19 secara ekonomi. Selain itu, peran pemerintah lainnya terlihat dari tim Gugus Tugas di daerah yang mengapresiasi kegiatan masyarakat karena hal tersebut sejalan dengan upaya yang dianjurkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Pentingnya peran masyarakat dalam menanggulangi wabah penyakit telah dibuktikan melalui banyak studi (Alonge dkk., 2019; Kickbusch & Reddy, 2016; Schwartz & Yen, 2017). Wabah menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat (Kickbusch & Reddy, 2016) sehingga secara psikologi, inisiatif yang muncul di kalangan masyarakat merupakan bagian dari reaksi untuk bertahan hidup dari sesuatu yang dapat mengancam hidup mereka (Norberg & Rucker, 2020). Budaya gotong royong yang dimiliki masyarakat Indonesia serta pengalaman masa lalu dalam menghadapi bencana menjadi modal sosial bagi masyarakat untuk saling menolong melalui inisiatif

yang dimunculkan masyarakat (Krismantari & Tamara, 2020).

Tantangan, keberlanjutan, dan pembelajaran

Setiap kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya (Marston dkk., 2016). Dalam kasus COVID-19, tantangan yang ada terkait dengan keberlanjutan dari partisipasi masyarakat. Apakah kegiatan tersebut tetap berlangsung hingga situasi pandemi selesai atau hanya berlangsung di awal saja. Namun demikian, analisis yang dilakukan terhadap 39 artikel berita daring terkait inisiatif masyarakat ini hanya mampu memotret partisipasi masyarakat dalam satu satuan waktu tanpa memberikan informasi lebih lanjut terkait keberlanjutan partisipasi tersebut. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa masyarakat dapat berkomitmen dan turut serta ketika ia sudah mendapatkan hasil yang positif dan sebaliknya ketika tidak mendapatkan hasil sesuai harapan mereka cenderung tidak berkomitmen (George dkk., 2015; Marston dkk., 2016). Komitmen masyarakat dalam berpartisipasi ini perlu dibangun secara terus menerus melalui hubungan yang baik dan rasa saling percaya antara pemerintah atau otoritas kesehatan setempat dan masyarakat bahwa upaya yang dilakukan akan menguntungkan satu sama lain (Kustiningsih & Nurhadi, 2020).

Komunikasi yang baik antar aktor dan penyediaan informasi yang terpercaya merupakan hal yang krusial dalam menanggulangi suatu wabah penyakit (Kickbusch & Reddy, 2016). Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah dan masyarakat mendapatkan pembelajaran berharga dalam dua hal, yaitu koordinasi lintas sektoral serta peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat. Berbagai sektor di pemerintahan maupun non pemerintahan bekerja sama dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Banyak pihak di luar sektor kesehatan yang terlibat baik itu dari sektor transportasi, pariwisata, perekonomian, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI tahun 2017 yang menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan akan tetapi berbagai pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama untuk terciptanya tujuan kesehatan di masyarakat (Astuti dkk, 2018). Selain itu,

terjadi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan COVID-19 meskipun pelaksanaannya akan berbeda tergantung dari komitmen dan kapasitas pemerintah daerah. Dari sisi masyarakat, kemampuan literasi digital masyarakat meningkat dari sebelumnya karena terbiasa menghadapi maraknya informasi *hoax* yang beredar (Kustiningsih & Nurhadi, 2020). Paparan informasi terkait COVID-19 pula yang menggerakkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan penularan dan mengurangi dampak COVID-19 di masyarakat.

Inisiatif yang muncul melalui kegiatan yang bertujuan memutus rantai penularan dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19 menunjukkan adanya proses adaptasi di tingkat masyarakat dalam menghadapi suatu bencana. Inisiatif yang ditunjukkan masyarakat ini digerakkan oleh pemahaman bahwa COVID-19 bukanlah masalah individu melainkan masalah bersama. Pembelajaran ini menjadi modal sosial yang penting bagi masyarakat dalam menghadapi bencana kesehatan di masa depan (Lomas, 1998). Seperti mekanisme imunitas tubuh dalam merespons virus yang masuk, pengalaman melewati masa pandemi melatih respons masyarakat agar lebih adaptif dan terukur sehingga membentuk kesiapsiagaan serta resiliensi masyarakat terhadap suatu bencana (Kustiningsih & Nurhadi, 2020).

KESIMPULAN

Inisiatif yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di masa awal pandemi bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mengurangi dampak COVID-19 khususnya secara ekonomi. Respons ini timbul dari reaksi untuk bertahan hidup dalam kondisi tidak menyenangkan dan juga pemahaman bahwa pandemi COVID-19 merupakan masalah bersama, bukan hanya individu. Selain itu, masyarakat Indonesia juga telah dilengkapi oleh modal sosial berupa budaya gotong royong serta pengalaman menghadapi bencana di masa lalu. Penyediaan informasi terpercaya terkait COVID-19 perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman menyeluruh dan terhindar dari ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat,

daerah dan masyarakat sangat diperlukan agar penanggulangan pandemi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alonge, O., Sonkarlay, S., Gwaikolo, W., Fahim, C., Cooper, J. L., & Peters, D. H. (2019). Understanding the role of community resilience in addressing the Ebola virus disease epidemic in Liberia: a qualitative study (community resilience in Liberia). *Global Health Action*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1662682>
- Astuti, Y., Widayatun, Hafsari, T.A. (2018). *Strategi Daerah untuk Meningkatkan Perilaku Kesehatan Ibu dan Pengasuhan Anak melalui Pendekatan Keluarga*. PPK-LIPI (Laporan Penelitian).
- Cresswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Ebrahim, S. H., Ahmed, Q. A., Gozzer, E., Schlagenhauf, P., & Memish, Z. A. (2020). Covid-19 and community mitigation strategies in a pandemic. *BMJ*, 368, m1066. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1066>
- GAO. (2013). Content analysis: Principles and practices. *Participant Manual*. United States Government Accountability Office.
- George, A., Scott, K., Garimella, S., Mondal, S., Ved., R & Sheikh., K. (2015). Anchoring contextual analysis in health policy and systems research: A narrative review of contextual factors influencing health committees in low and middle income countries. *Social Science and Medicine*. 133(2015): 159-167. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.03.049>
- Gharibah, M., & Mehchy, Z. (2020). COVID-19 pandemic: Syria's response and healthcare capacity. *Conflict Research Programme Policy Memo*. http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf
- Joffé, G. (2020). COVID-19 and North Africa. *The Journal of North African Studies*, 25(4), 515-522. <https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1757334>
- Kickbusch, I., & Reddy, K. S. (2016). Community matters – why outbreak responses need to integrate health promotion. *Global Health Promotion*, 23(1), 75–78. <https://doi.org/10.1177/1757975915606833>
- Krismantari, I., & Tamara, N. (2020). *Ahli: inisiatif masyarakat saat pandemi COVID-19 lahir karena lambannya gerak pemerintah*. The Conversation. <https://theconversation.com/ahli-inisiatif-masyarakat-saat-pandemi-covid-19-lahir-karena-lambannya-gerak-pemerintah-136708>
- Kustiningsih, W., & Nurhadi. (2020). Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 179–193). Gadjah Mada University Press.
- Lomas, J. (1998). Social Capital and Health: Implications for Public Health and Epidemiology. *Social Science Medicine*, 47(9), 1181-1188. [http://doi.org/10.1016/s0277-9536\(98\)00190-7](http://doi.org/10.1016/s0277-9536(98)00190-7)
- Marston, C., Hinton, R., Kean, S., Baral, S., Ahuja, A., Costello, A., & Portela, A. (2016). Community participation for transformative action on women's, children's and adolescents' health. *Bulletin of the World Health Organization*, 94(5), 376–382. <https://doi.org/10.2471/BLT.15.168492>
- Norberg, M., & Rucker, D. (2020). *Ada alasan psikologis di balik "panic buying". Ada cara psikologis juga untuk menghindari perilaku itu*. The Conversation. <https://theconversation.com/ada-alasan-psikologis-di-balik-panic-buying-ada-cara-psikologis-juga-untuk-menghindari-perilaku-itu-135437>
- Qian, X., Ren, R., Wang, Y., Guo, Y., Fang, J., Wu, Z. D., Liu, P.L., Han, T. R., & Members of Steering Committee, Society of Global Health, Chinese Preventive Medicine Association.(2020). Fighting against the common enemy of COVID-19: A practice of building a community with a shared future for mankind. *Infectious Diseases of Poverty*, 9(1), 4–9. <https://doi.org/10.1186/s40249-020-00650-1>
- Schwartz, J., & Yen, M. Y. (2017). Toward a collaborative model of pandemic preparedness and response: Taiwan's changing approach to pandemics. *Journal of Microbiology, Immunology*

and Infection, 50(2), 125–132. <https://doi.org/10.1016/j.jmii.2016.08.010>

TNCPERET. (2020). The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. *China CDC Weekly*, 2020, Vol. 2, Issue 8, Pages: 113-122, 2(8), 113–122. <https://doi.org/10.46234/CCDCW2020.032>

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. *Nursing & Health Sciences*, 15(3), 398-405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>

Worldometer. (2020, Mei). COVID-19 Coronavirus Pandemic Website. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Wu, J., Gong, Y., & Yin, X. (2020). Role of community participation in the prevention and control of coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Tropical Public Health*, 1(1), 2–3. <http://journals.hainmc.edu.cn/tp/article/abstract/20200323>

Tabel 1. Daftar Tautan Artikel Berita 1 Maret- 30 April 2020

No	Tautan Artikel Berita
1.	https://www.tokohkita.co/read/20200416/1195/perlu-diberikan-apresiasi-terhadap-inisiatif-masyarakat-bantu-pemerintah-lawan-covid-19
2.	https://www.liputan6.com/regional/read/4225185/inisiatif-warga-buat-masker-di-tengah-pandemi-corona-covid-19
3.	https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/21/partisipasi-publik-menghadapi-covid-19/
4.	https://bebas.kompas.id/baca/muda/2020/03/20/warga-mulai-bergerak-mencegah-penyebaran-covid-19/
5.	https://mediaindonesia.com/read/detail/304290-inisiatif-warga-cakung-timur-layak-ditiru
6.	https://www.kupastuntas.co/2020/04/06/cegah-covid-19-warga-perumahan-lamban-lintang-7-jatimulyo-inisiatif-buat-gerbang-sterilisasi
7.	https://www.galamedianews.com/bandung-raya/252457/cegah-penyebaran-covid-19-warga-komplek-kiarasari-asri-inisiatif-lakukan-disinfeksi.html
8.	https://jambi-independent.co.id/read/2020/03/30/49278/cegah-penyebaran-covid19-secara-mandiri-dan-swadaya
9.	https://www.ayobandung.com/read/2020/04/03/84785/cegah-corona-warga-gci-cileunyi-inisiatif-lakukan-disinfeksi-rutin
10.	https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-128319-2020-04-10-inisiatif-mandiri-warga-tuahmadani-pekanbaru-semprot-disinfektan-dari-rumah-ke-rumah.html
11.	https://kumparan.com/kumparannews/foto-warga-terapkan-karantina-wilayah-mandiri-di-sejumlah-daerah-1t9rE5fuJvW
12.	https://theconversation.com/dua-sisi-karantina-wilayah-mandiri-warga-dalam-mencegah-penyebaran-covid-19-135689
13.	https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/293361/Cegah.Corona,Warga.Perumahan.di.Lobar.Inisiatif.Bangun.Posko/
14.	https://makassar.terkini.id/warga-bulukumpa-inisiatif-bentuk-posko-pencegahan-covid-19-secara-swadaya-ini-pesan-bupati-bulukumba/
15.	http://lintasterkini.com/04/04/2020/inisiatif-isolasi-mandiri-sebagai-upaya-cegah-penyebaran-covid-19.html
16.	https://tribatanews.sukoharjo.jateng.polri.go.id/upaya-pencegahan-penyebaran-corona-warga-sukoharjo-inisiatif-sediakan-rumah-isolasi/
17.	https://bogor.pojoksatu.id/baca/inisiatif-warga-cegah-corona-bilik-disinfektan-mandiri-di-depan-komplek
18.	https://www.vivanews.com/berita/nasional/45512-cegah-covid-19-komunitas-ini-inisiatif-bikin-masker-dari-kain-perca
19.	https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-apresiasi-inisiatif-rt-rw-bergotong-

	royong-cegah-penyebaran-covid-19
20.	https://news.detik.com/berita/d-4982766/cegah-corona-warga-bengkulu-secara-swadaya-semprot-disinfektan-ke-tempat-umum
21.	https://timur.jakarta.go.id/v15/news/Pemerintahan/5837/cegah-penyebaran-covid-19,-akses-jalan-di-rt-05-rw-03-cilangkap-ditutup
22.	https://tirto.id/solidaritas-masker-gratis-di-sejumlah-kota-hadapi-pandemi-corona-eKEb
23.	https://www.liputan6.com/health/read/4217817/banyak-konser-virtual-dan-video-soal-covid-19-pemerintah-apresiasi-inisiatif-masyarakat
24.	https://www.alinea.id/nasional/lockdown-kampung-inisiatif-warga-proteksi-dari-covid-19-b1ZL79tKA
25.	https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/nbwjXejN-ini-inisiatif-yang-muncul-di-twitter-selama-pandemik-covid-19
26.	https://www.aman.or.id/2020/04/bangun-posko-cek-kesehatan-dan-inisiatif-cegah-covid-19-di-raja-ampat/
27.	https://www.ayobandung.com/read/2020/04/09/85427/desa-di-tasikmalaya-inisiatif-dirikan-rumah-isolasi-covid-19-bagi-pemudik
28.	https://kabarsebelas.com/2020/04/20/pendataan-tidak-tepat-sasaran-pemuda-pkb-tirtamulya-inisiatif-bagikan-sembako-kepada-masyarakat-terdampak-covid-19/
29.	https://kabar24.bisnis.com/read/20200328/15/1219047/antisipasi-penyebaran-covid-19-melihat-lockdown-ala-warga-di-yogyakarta
30.	https://setkab.go.id/pemerintah-apresiasi-inisiatif-rt-rw-bergotong-royong-cegah-penyebaran-covid-19/
31.	https://monitor.co.id/2020/03/26/cegah-penyebaran-corona-warga-depok-inisiatif-bikin-gerbang-disinfektan-otomatis/
32.	http://www.topsumbar.co.id/warga-balai-balai-inisiasitif-semprot-desinfektan-dari-rumah-ke-rumah/
33.	https://enewsindonesia.com/pencegahan-virus-covid-19-febrianto-apresiasi-inisiatif-masyarakat/
34.	http://seriau.com/mobile/detailberita/36510/parlemen/hastag-pasir-penyu-bergerak--sebuah-inisiatif-pemuda-pasir-penyu-melawan-penyebaran-covid-19
35.	https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/42805/posko-relawan-covid19-bagikan-bantuan-ketua-mui-riau-inisiatif-mulia
36.	https://dhaksinarga.id/news/59953
37.	https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/04/26/514/1037751/inisiatif-terapkan-protokol-kesehatan-cafe-kelompok-masyarakat-dapat-apresiasi
38.	https://www.magnetindonesia.co/2020/03/pemuda-dan-masyarakat-benteng-kidul-inisiatif-semprot-disinfektan/
39.	https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1209101-masyarakat-inisiatif-sebar-pesan-dirumahaja-pemerintah-kami-bangga

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

DAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF GENDER DI INDONESIA

(IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC USING GENDER PERSPECTIVE IN INDONESIA)

Ikfina Chairani

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Korespondensi penulis: ikfinachairani@gmail.com

Abstract

The COVID-19 outbreak has inevitably changed the situation in Indonesia and might bring a threat to gender equality. This short paper aims to explain the impact of the COVID-19 pandemic on women from health, economic, and social aspect in Indonesia. First, from the health aspect, women are vulnerable to COVID-19 since they play the main role in the care economy. Also, the pandemic situation has changed the regulation of reproductive health services and might intensify the unmet need of women on reproductive health care. Second, from the economic aspect, the pandemic has hit Indonesia's economic situation and increases the unemployment rate as well as the informal worker on women. In addition, women also might be harder to return to market labor since it might be a limitation after the pandemic. Third, from the social aspect, due to working from home (WFH) regulation, women more likely to face a double burden to balance their productivity and domestic work. Not to mention that during the pandemic, the domestic violence to women has increased yet slower the responsiveness of the stakeholder to handle the reports.

Keyword: *COVID-19, women, health, economic, social*

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mengonfirmasi kasus COVID-19 (Tim detikcom, 2020). Hingga per tanggal 28 Mei 2020, tercatat 31.024 kasus COVID-19 yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi ini membawa dampak yang cukup serius pada tatanan kesehatan, perekonomian, dan sosial di Indonesia. Perubahan tatanan ini yang kemudian menjadi ancaman pada kesetaraan gender di Indonesia, karena pada dasarnya ketidakpastian kondisi perekonomian membawa dampak yang lebih buruk bagi perempuan dibandingkan laki-laki (Alon dkk., 2020). Padahal tanpa adanya pandemi ini pun, posisi perempuan di Indonesia belum pada posisi setara dengan laki-laki. Hal ini terlihat pada data perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan jenis kelamin, IPM pada penduduk laki-

laki lebih tinggi (75,96) dibandingkan pada penduduk perempuan (69,18) (BPS, 2020a). Terlebih, pada kondisi pandemi perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi (Wenham dkk., 2020). Penelitian singkat ini akan membahas dampak situasi pandemi COVID-19 terhadap perempuan dari aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Sebagai perbandingan awal, data pasien COVID-19 menurut jenis kelamin di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pasien laki-laki yang terpapar kasus COVID-19 lebih tinggi dibandingkan perempuan (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Data per 28 Mei 2020 memberikan gambaran sebanyak 55 persen laki-laki positif COVID-19. Pola ini terjadi tidak hanya secara nasional, namun juga pada provinsi-provinsi di Indonesia. Bahkan, pola ini juga ditemukan pada kasus di negara lain yang

menyimpulkan bahwa laki-laki lebih rentan terpapar virus COVID-19 (Begley, 2020; Wenham dkk., 2020). Kerentanan yang dihadapi oleh laki-laki berkaitan dengan pola pergerakan mereka yang lebih banyak berada di luar rumah daripada perempuan (Begley, 2020). Ditambah, selama masa pandemi ini, perempuan lebih disiplin dalam menjalani protokol kesehatan seperti menerapkan *physical distancing*, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker dibandingkan dengan laki-laki (BPS, 2020d). Meski begitu, Wenham dkk. (2020) menyatakan bahwa data tersebut belum bisa menjadi dasar pijakan terkait kondisi gender pada COVID-19.

Perempuan telah lama memegang peranan utama dalam *care work*, baik dibayar maupun tidak dibayar. Dalam lingkup keluarga, perempuan merupakan kunci utama untuk menjaga kesehatan anggota keluarganya. Data tahun 2019 menunjukkan sebanyak 37,04 persen perempuan di Indonesia memiliki aktivitas utama mengurus rumah tangga (BPS, 2020f). Pada cakupan yang lebih luas, petugas medis sebagai *frontliner* penanganan COVID-19 juga didominasi oleh perempuan. Data tahun 2019 menunjukkan proporsi perempuan yang bekerja di jasa kesehatan mencapai hingga 2,69 persen, sedangkan untuk laki-laki hanya sebanyak 0,83 persen (BPS, 2020e). Bahkan pada tahun 2017, perawat perempuan di Indonesia mencapai hingga 71 persen (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Sebagai lini terdepan penanganan COVID-19 baik pada lingkup keluarga maupun masyarakat, perempuan tentunya memiliki risiko paparan yang lebih tinggi.

Selain itu, perempuan mengalami ancaman kesehatan pada kesehatan reproduksi dikarenakan perubahan prioritas pelayanan kesehatan di masa pandemi ini. Meskipun Kementerian Kesehatan (2020a) merekomendasikan penundaan kehamilan selama masa pandemi, pelayanan Keluarga Berencana (KB) tidak serta merta menjadi mudah bagi perempuan. Selama masa *physical distancing*, perempuan perlu melakukan janji temu untuk mendapatkan layanan KB (Kementerian Kesehatan RI, 2020a). Padahal akibat adanya relasi kuasa yang timpang di dalam rumah tangga, penggunaan KB lebih banyak bergantung pada perempuan. Pada tahun 2019, hanya 0,36 persen laki-laki yang melakukan vasektomi, dan hanya sebanyak 1,36 persen laki-laki yang menggunakan kondom sebagai alat penunda kehamilan (BPS, 2019b). Kondisi ini akan mempengaruhi tidak terpenuhinya kebutuhan perempuan terhadap akses layanan kesehatan reproduksi.

Secara global, pandemi COVID-19 telah menunjukkan dampaknya pada perekonomian, termasuk di Indonesia. Pada triwulan 1-2020, perekonomian Indonesia mengalami perlambatan sebesar 1,01 persen

dibandingkan dengan triwulan 4-2019 (BPS, 2020b). Kondisi ini merupakan dampak langsung dari terhentinya kegiatan perekonomian dikarenakan adanya aturan *social/physical distancing* yang diberlakukan sebagai protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Perlambatan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor jasa pendidikan (-10,39 persen) dan sektor administrasi pemerintahan (-8,54 persen). Padahal kedua sektor ini didominasi oleh perempuan. Pekerja perempuan pada jasa pendidikan mencapai hingga 7,95 persen, sedangkan pada jasa pemerintahan sebesar 2,84 persen (BPS, 2020e). Sebaliknya, pekerja laki-laki yang bekerja pada kedua sektor ini tidak sampai mencapai 4 persen (BPS, 2020e).

Pada kondisi Februari 2020, jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 6,88 juta atau 4,99 persen (BPS, 2020c). Kondisi pandemi yang dihadapi Indonesia berpotensi menambah jumlah pengangguran, bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan peningkatan jumlah pengangguran hingga 4,22 juta orang (Komalasari, 2020). Selain itu, perlambatan pada sektor jasa pendidikan dan jasa pemerintahan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun pemberhentian sementara tenaga kontrak/honorar (Sutrisna, 2020). Hal ini kemudian dapat berdampak pada meningkatnya potensi perempuan untuk kehilangan pekerjaannya. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi yang terjadi ini bisa meningkatkan jumlah pekerja informal. Padahal, perempuan yang bekerja pada sektor informal sebelum kondisi pandemi sudah mencapai hingga 61,80 persen (BPS, 2019a). Peningkatan pekerja informal pada perempuan tentunya berkaitan juga secara langsung dengan jaminan sosial yang tidak didapatkan oleh mereka. Selain itu, kemungkinan untuk bisa kembali ke bursa tenaga kerja akan lebih sulit karena mungkin akan ada keterbatasan pasar tenaga kerja (United Nations, 2020).

Sementara itu, perempuan yang tetap bisa bertahan pada pekerjaannya juga akan menghadapi masalah lain, yaitu beban ganda. Di Indonesia, narasi tanggung jawab utama perempuan adalah pada pekerjaan domestik (Mustajab dkk., 2020). Sedangkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah dan perusahaan memberlakukan kebijakan *Work From Home* (WFH/bekerja dari rumah) dan sekolah-sekolah memberlakukan kebijakan *School From Home* (SFH/sekolah dari rumah). Sehingga, perempuan yang melakukan WFH harus mampu mengalokasikan waktunya untuk mengurus rumah tangga, mendampingi anak belajar, sekaligus bekerja. Kondisi ini merupakan hasil dari timpangnya pembagian tugas (Alon dkk., 2020) serta rendahnya relasi kuasa perempuan dalam

rumah tangga. Ketimpangan peran gender yang terjadi dalam keluarga merupakan hasil dari norma patriarki yang masih banyak dianut oleh masyarakat Indonesia yang pada akhirnya menempatkan posisi laki-laki pada status yang lebih tinggi daripada perempuan (Obie, 2018; Putra dkk., 2019). Kondisi ini yang menyebabkan laki-laki merasa memiliki kuasa atas perempuan di dalam rumah tangganya serta berpotensi memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Nilan, Demartoto, Broom, & Germov, 2014; Obie, 2018; Putra dkk., 2019).

Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, kasus KDRT pun menjadi salah satu perhatian utama karena jumlahnya yang meningkat (United Nations, 2020). Hal ini dianggap merupakan salah satu dampak WFH, yakni perempuan yang berada pada rumah tangga dan mengalami KDRT akan terperangkap dan tidak memiliki ruang pribadi (United Nations, 2020) sehingga akan menyebabkan terulangnya KDRT. Selain itu, pengurangan pendapatan maupun PHK akibat COVID-19 yang dialami rumah tangga (BPS, 2020d) juga menjadi faktor yang berpotensi untuk memicu terjadinya kasus KDRT (Nilan dkk., 2014).

Selama tahun 2020, tercatat 3.217 kasus KDRT di Indonesia. Korban KDRT didominasi oleh perempuan (85,0 persen), sedangkan 87,8 persen pelaku didominasi oleh laki-laki (Kementerian PPA, n.d.). Risiko terjadinya KDRT bahkan lebih besar lagi pada keluarga yang pernah mengalaminya sebelum era pandemi (Kementerian Kesehatan RI, 2020b), sehingga bisa jadi jumlah kasus kekerasan ini belum tercatat semua. Bahkan, kondisi pandemi COVID-19 ini kemudian menjadi pendorong terjadinya peningkatan kasus KDRT karena perempuan tidak memiliki kesempatan pergi ke luar rumah dan meninggalkan pelaku kekerasan (Kementerian Kesehatan RI, 2020b; United Nations, 2020). Selain itu, dengan adanya kebijakan WFH, beberapa lembaga penanganan KDRT juga menerapkan sistem WFH (BBC News, 2020) dan sebagai konsekuensinya dapat memperlambat penanganan kasus KDRT.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan singkat diatas, perempuan mengalami kesulitan yang lebih tinggi dalam menghadapi COVID-19 dibandingkan dengan laki-laki, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Peranan perempuan dalam *care economy* membutuhkan perhatian lebih dalam untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 bagi perempuan. Selain itu, pelayanan kesehatan reproduksi yang terbatas selama masa pandemi COVID-19 perlu dipermudah meskipun

tetap dengan protokol kesehatan yang harus diikuti. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan reproduksi bagi perempuan. Selanjutnya, beberapa bukti dari perlambatan ekonomi di Indonesia juga telah menempatkan posisi perempuan pada kondisi yang lebih rentan. Perempuan dibayangi oleh kondisi pemutusan hubungan kerja dikarenakan terhentinya aktivitas perekonomian pada sektor yang didominasi oleh perempuan. Perempuan yang masih bekerja dengan kebijakan WFH pun mengalami beban ganda dalam rumah tangga. Sementara itu, kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya angka KDRT terhadap perempuan dan memperlambat respons penanggulangan kasus KDRT. Menanggapi kondisi ini, diperlukan adanya kebijakan yang responsif gender untuk menghindari kesenjangan gender yang semakin tinggi yang diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Alon, T. M., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). *The Impact of COVID-19 on Gender Equality*. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w26947>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2019a). Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin, 2015 - 2018. Retrieved May 29, 2020, from <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/16/1313/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin-2015---2018.html>
- _____. (2019b). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1dfd4ad6cb598cd011b500f7/statistik-kesejahteraan-rakyat-2019.html>
- _____. (2020a). [IPG] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2010-2019. Retrieved May 29, 2020, from <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2019.html>
- _____. (2020b). Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen. Retrieved May 29, 2020, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>
- _____. (2020c). Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99

- persen. Retrieved May 29, 2020, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>
- _____. (2020d). *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/01/669cb2e8646787e52dd171c4/hasil-survei-sosial-demografi-dampak-covid-19-2020.html>
- _____. (2020e). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/29/c21630ee39b9004459680923/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2019.html>
- _____. (2020f). *Statistik Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- BBC News. (2020). KDRT: Perempuan kian “terperangkap” di tengah pembatasan sosial Covid-19, “Saya tak mau menyerah tanpa perlawanan.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52713350>
- Begley, S. (2020). Which Groups Are Most at Risk from the Coronavirus? *Scientific American Journal*. <https://doi.org/10.1101/2020.02.17.20024166V3.FULL.PDF>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Peta Sebaran*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Infodatin Perawat 2017.Pdf* 1–12. http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin_perawat_2017.pdf
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Pandemi Covid 19*.
- Kementerian PPA. (n.d.). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2020*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komalasari, T.D. (2020, 12 Mei). *Proyeksi Bappenas: Penduduk Miskin Tahun 2020 Bertambah 2 Juta Orang*. PikiranRakyat.com. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01381177/proyeksi-bappenas-penduduk-miskin-tahun-2020-bertambah-2-juta-orang>
- Mustajab, D., Azies, B., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. A., & Hamid, M. A. (2020). Fenomena Bekerja dari Rumah sebagai Upaya Mencegah Serangan COVID-19 dan Dampaknya terhadap Produktifitas Kerja. *The International Journal of Applied Business TIJAB*, 4(1), 13–21. <https://e-journal.unair.ac.id/TIJAB/article/viewFile/18574/10248>
- Nilan, P., Demartoto, A., Broom, A., & Germov, J. (2014). Indonesian Men’s Perceptions of Violence Against Women. *Violence Against Women*, 20(7), 869–888. <https://doi.org/10.1177/1077801214543383>
- Obie, M. (2018). Violence Against Women in Muna Southeast Sulawesi Indonesia. *The Social Sciences*, 13(1), 154–159.
- Putra, I. G. N. E., Pradnyani, P. E., & Parwangsa, N. W. P. L. (2019). Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia. *Journal of Health Research*, 33(2), 90–105. <https://doi.org/10.1108/JHR-06-2018-001>
- Sutrisna, T. (2020, April 5). *Kisah Korban PHK Saat Wabah COVID-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/05/20223421/kisah-korban-phk-saat-wabah-covid-19-tanpa-pesangon-dan-sulit-dapat?page=all>
- Tim detikcom. (2020, April 26). *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- United Nations. (2020). *Policy brief: The Impact of COVID-19 on Women* (pp. 1–21). pp. 1–21. Retrieved from https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
- Wenham, C., Smith, J., Morgan, R., & Group, W. (2020). COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. *The Lancet*, 395, 846–848. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32990-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32990-3)

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PHK DAN PENDAPATAN PEKERJA DI INDONESIA

(THE IMPACT OF COVID-19 ON WORKER LAYOFFS AND INCOME IN INDONESIA)

Ngadi, Ruth Meilianna*, Yanti Astrelina Purba

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

*Korespondensi penulis: ruthmeilianna56@gmail.com

Abstract

The larger-scale social restrictions policy to handling the COVID-19 pandemic had an impact on the socio-economic of the community including job sustainability and income of workers. This study analyzes the impact of the COVID-19 on worker layoffs and income in Indonesia. This research uses an accidental sampling through the online survey. The results showed that COVID-19 had an impact on layoffs and decreased income, especially during the social distancing. The result showed that layoffs of workers in Indonesia amounted to 15.6 percent. Regarding income, about 31.0 percent of workers claim that their income has decreased by less than 50 percent and 8.6 percent of that has fallen above 50 percent. The government needs to conduct strict supervision of companies in each region. The role of the community is needed in overcoming existing problems by looking for new strategies that are utilizing technology and looking for new job opportunities, while still paying attention to health protocols.

Keywords: *COVID-19, worker, layoffs, income, Indonesia*

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Kebijakan tersebut mengubah aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan hiburan ditutup. Keadaan ini berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja. Pada fase awal *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan bahwa sekitar 25 juta pekerjaan di dunia dapat hilang disebabkan oleh pandemi COVID-19 (ILO, 2020a). Selanjutnya pada kuartal kedua tahun 2020 ILO memprediksi jam kerja seluruh pekerja akan menurun 10,5 persen atau setara dengan 305 juta pekerja penuh waktu dengan asumsi jam kerja penuh waktu adalah 48 jam perminggu (ILO, 2020c).

Oleh sebab itu, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD-UI) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan survei *online* tentang dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja. Survei dilakukan pada tanggal 24 April- 02 Mei 2020 dengan total responden sebanyak 1.112 buruh/karyawan/pegawai. Adapun metode *sampling* yang digunakan adalah *Accidental Sampling* dengan pembobotan. Penghitungan bobot variabel sampel menggunakan data Sakernas Agustus 2019. Bobot ini merepresentasikan besaran karakteristik populasi yang diwakili oleh setiap unit sampel. Pembobotan didasarkan pada variabel demografi jenis kelamin dan usia.

Tabel 1.
PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Lapangan Pekerjaan

Kategori	PHK (%)			Perubahan pendapatan (%)				n
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun <50%	Menurun 50%	Tetap/meningkat	Tidak ada pendapatan	
Total	15,6	13,8	1,8	31	8,6	45,3	15,3	100744
Jenis Kelamin								
Laki-laki	16,7	2,8	13,9	34,2	9,6	41,5	14,7	54.720
Perempuan	14,2	0,6	13,6	27	7,5	49,8	15,8	46.074
Usia								
15-24	34,5	1,1	33,5	22,5	8,1	40,3	29,2	10.701
25-34	13,8	2,1	11,7	33,3	7,2	47,5	12	33.379
35-44	13,7	2,1	11,7	33,5	8,6	43,5	14,4	26.524
45-54	16,2	0,9	15,3	29,4	7,5	43,1	20	18.679
55-64	7,4	2,9	4,5	26,4	11,6	56,1	5,9	10.509
65+	0	0	0	50	50	0	0	952
Jenis jabatan/pekerjaan								
Kepemimpinan dan ketatalaksanaan	10,3	2,8	7,5	29,7	7	52,9	10,5	15.077
Profesional, teknisi dan yang sejenis	7,9	2,7	16,8	43,8	12,7	26,5	17	11.033
Produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar	19,5	1,1	6,8	32,6	6,4	52,4	8,6	33.099
Tata usaha dan yang sejenis	15,6	0,4	15,2	27,7	8	50,7	13,6	15.129
Usaha jasa	28,3	2,7	25,5	23,6	9,8	38,2	28,4	18.383
Usaha penjualan	26,4	2,9	23,5	32,3	15,6	26,3	25,7	6.352
Usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	9	0	9	27,6	5	62,4	5	1.672

Sumber: Analisis data primer

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan pendapatan buruh/karyawan/pegawai selama masa PSBB di Indonesia. Persentase PHK buruh/pegawai/karyawan di Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 15,6 persen yang terdiri dari 1,8 persen PHK dengan pesangon dan 13,8 persen PHK tanpa pesangon.

Tabel 1 menunjukkan persentase yang hampir berimbang antara korban PHK tenaga kerja laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing 16,7 persen dan 14,2 persen. Persentase PHK tenaga kerja karena COVID-19 dari hasil penelitian ini tampak lebih besar dari prediksi ILO yaitu 10,5 persen pada kuarta kedua tahun 2020. Namun angka PHK tersebut hampir sama

dengan angka PHK di Amerika Serikat yang pada Juli 2020 sebesar 14,7 persen (Ziv, 2020). Bahkan Cox (2020) memprediksi pengangguran di Amerika Serikat akan mencapai 32,1 persen sebagai dampak COVID-19. Besarnya pengaruh COVID-19 dijelaskan oleh Ozili (2020) bahwa gangguan ekonomi tiba-tiba yang disebabkan oleh COVID-19 tidak hanya merusak tetapi juga memiliki dampak berlebih karena menciptakan guncangan permintaan dan penawaran di hampir setiap bidang usaha. Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap penurunan pendapatan pekerja yang tidak terkena PHK. Dari responden yang diteliti, terdapat 31,0 persen pekerja yang mengaku pendapatannya menurun kurang dari 50 persen dan 8,6 persen pekerja yang pendapatannya menurun di atas 50 persen.

Kelompok usia muda merupakan kelompok paling rentan terkena PHK sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Data penelitian menunjukkan terjadinya PHK yang sangat besar pada pekerja usia muda 15-24 tahun yaitu 34,5 persen (Tabel 1). Rentannya pekerja muda ini telah diprediksi oleh ILO (2020c) yang memperkirakan satu dari enam pekerja muda akan kehilangan pekerjaan pada masa pandemi COVID-19. Lebih lanjut, diperkirakan akan terjadi penurunan jam kerja hingga 23 persen pada seluruh pekerja muda. PHK pekerja muda yang tinggi akibat COVID-19 juga terjadi pada negara-negara maju di dunia. Montenovo dkk., (2020) menyatakan bahwa selama dua bulan pandemi COVID-19, pekerja muda di Amerika Serikat menurun 4,5 kali lebih besar dibanding selama resesi tahun 2007-2008.

Berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pekerja muda terhadap guncangan ekonomi. Sejak tahun 2003, Indonesia telah membentuk *Indonesia Youth Employment Network (IYEN)* yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran usia muda, bahkan inisiatif ini didukung oleh 17 kementerian (ILO, 2016). Namun implementasi dari program ini belum cukup berhasil menekan angka pengangguran pekerja usia muda.

COVID-19 telah menghantam semua sektor dan jenis pekerjaan di Indonesia dengan tingkat keparahan yang berbeda. Dcode (2020) memperkirakan terdapat beberapa sektor yang berpotensi kalah dan menjadi pemenang dalam jangka pendek akibat COVID-19. Layanan kesehatan, pengolahan dan perdagangan makanan, *e-commerce* dan teknologi informasi & komunikasi berpotensi menjadi pemenang, sedangkan pariwisata, transportasi, dan konstruksi menjadi sektor yang berpotensi kalah. Tabel 1 menunjukkan jenis pekerjaan/jabatan yang paling banyak terkena PHK adalah tenaga usaha jasa (28,3 persen) dan tenaga usaha penjualan (26,4 persen). Selain mengalami PHK, sebagian pekerja juga mengalami penurunan pendapatan. Dalam keseluruhan jenis jabatan, terdapat 24-44 persen pekerja yang pendapatannya menurun kurang dari 50 persen. Selain itu, terdapat 5-16 persen pekerja yang pendapatannya menurun hingga lebih dari 50 persen (Tabel 2).

Berdasarkan Tabel 2, terdapat sektor-sektor zona merah yang mengalami PHK cukup tinggi, yaitu sektor konstruksi (29,3 persen) dan sektor perdagangan,

rumah makan dan jasa akomodasi (28,9 persen). Kejadian PHK paling parah terjadi di sektor konstruksi karena seluruh korban PHK tidak mendapatkan pesangon. Keadaan hampir sama terjadi pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Pada sektor ini sekitar 26,1 persen pekerja yang terkena PHK tidak mendapatkan pesangon. Para korban PHK yang tidak mendapat pesangon ini umumnya berstatus sebagai pegawai tidak tetap atau karyawan kontrak yang upahnya berdasarkan output tertentu. Banyak tempat rekreasi yang tutup dan kegiatan konstruksi bangunan yang terhenti, sehingga karyawannya berhenti bekerja tanpa mendapatkan pesangon. PHK akibat COVID-19 juga terjadi di negara-negara lain di dunia. ILO memperkirakan bahwa sekitar 47 juta yang mewakili 54 persen dari semua pengusaha di seluruh dunia juga dihantam krisis karena COVID-19. Empat sektor yang sangat terpukul adalah (a) sektor perdagangan grosir dan eceran; dan perbaikan kendaraan bermotor, (b) manufaktur, (c) akomodasi dan makanan, (d) *real estate*, aktivitas bisnis dan administrasi (ILO, 2020c).

Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja bervariasi antar daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Wilayah dengan jumlah kasus PHK paling tinggi terjadi di Bali- Nusa Tenggara (39,9 persen) dan Banten (24,8 persen). Selain mengalami PHK, sebagian buruh/pekerja di Bali mengalami penurunan pendapatan di atas 50 persen (16,7 persen). Perekonomian Bali digerakkan oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pariwisata, industri pengolahan, dan pertanian (BPS Provinsi Bali, 2019). Beberapa usaha yang digerakkan oleh sektor pariwisata di Bali diantaranya adalah kegiatan biro perjalanan, transportasi, perhotelan, restoran dan rumah makan, kesenian dan budaya daerah, industri kerajinan rakyat, serta tempat hiburan dan rekreasi. Pandemi COVID-19 menyebabkan kinerja sektor ini lumpuh sehingga memPHK cukup banyak pekerja. Bahkan kasus PHK tanpa pesangon di provinsi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia (35,3 persen).

Banten juga menjadi provinsi dengan jumlah PHK cukup tinggi. Selain PHK, sebagian buruh/pegawai/karyawan juga mengalami penurunan pendapatan. Sekitar 10,1 persen responden mengaku mengalami penurunan pendapatan di atas 50 persen, sedangkan 39,2 persen responden pendapatannya

menurun kurang dari 50 persen. Berbeda dengan Bali, ekonomi Banten yang dominan digerakkan oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan mengalami penurunan kinerja sebagai dampak dari COVID-19 (BPS Provinsi Banten, 2019). Perselisihan hubungan industrial berupa PHK tanpa pesangon di

provinsi ini juga menempati posisi tertinggi ke-dua di Indonesia, yaitu sebesar 19,2 persen. Tingginya perselisihan industrial di wilayah ini menyebabkan Bali dan Banten masuk menjadi wilayah zona merah dalam hal kerawanan ketenagakerjaan.

Tabel 2.
PHK dan Perubahan Pendapatan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Sektor Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan

Kategori	PHK (%)			Perubahan pendapatan (%)				n
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun <50%	Menurun 50%	Tetap/ meningkat	Tidak ada pendapatan	
Sektor Pekerjaan								
Industri Pengolahan	22,2	18	4,3	46,9	8,5	31,2	13,4	10.523
Jasa Kemasyarakatan	7,9	7	0,8	31,4	8,8	51	8,8	35.804
Konstruksi/Bangunan	29,3	29,3	0	37,4	10,1	27	25,5	3.541
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	11,7	9,8	1,9	29,7	3,1	56,4	10,8	18.242
Listrik, Gas, dan Air Minum	28,6	24,1	4,5	14,3	0	57,1	28,6	1.841
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	28,9	26,1	2,8	27	18,6	22,1	32,4	14.156
Pertambangan dan Penggalian	11,2	11,2	0	35,4	0	50,7	13,9	2.657
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	4,1	4,1	0	19	5	71,9	4,1	5.515
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2,9	26,4	23,4	25,6	9,3	39,6	25,5	8.465
Lokasi Kerja								
Sumatera	21,1	17,6	3,4	23,8	9,2	48,6	18,3	13.920
Bali dan Nusa tenggara	39,9	35,3	4,6	17,5	16,7	23,6	42,2	4.815
Banten	24,8	19,2	5,6	39,2	10,1	27,5	23,2	4.294
DI Yogyakarta	7,6	7,6	0	18,3	1,5	72,6	7,6	4.093
DKI Jakarta	11,8	10,2	1,6	30,8	6,8	48,9	13,5	38.673
Jawa Barat	15,3	14,2	1	41,8	11	36,9	10,3	15.994
Jawa Tengah	8,5	8,5	0	32,6	12,4	47,4	7,7	6.594
Jawa Timur	10,4	10,4	0	28,7	8,6	48,5	14,2	6.084
Kalimantan	12,6	12,6	0	29,1	7,6	49,9	13,5	3.805
Lainnya	32,3	27,7	4,6	38,9	3,4	32	25,7	2.472

Sumber: Analisis data primer

DKI Jakarta yang menjadi barometer perekonomian Indonesia juga tidak terlepas dari PHK karyawan pada saat pandemi COVID-19. Sekitar 11,8 persen karyawan/buruh di Jakarta menjadi korban PHK. Sebagian karyawan yang tidak terkena PHK juga mengalami penurunan pendapatan. Tercatat 6,8 persen karyawan mengalami penurunan pendapatan 50 persen ke atas dan 30,8 persen mengalami penurunan pendapatan kurang dari 50 persen. Tampak gelombang

PHK di Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan Bali dan Nusa Tenggara. Meskipun demikian, 11,8 persen PHK karyawan tetap menjadi kejadian yang sangat merugikan dan perlu segera diantisipasi. Gelombang PHK dikhawatirkan akan semakin besar jika PSBB berlangsung dalam waktu lama karena sebagian besar kegiatan produksi barang dan jasa terhenti.

Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK perlu dilakukan dalam beberapa proses, diantaranya adalah musyawarah antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh. Jika tidak menghasilkan persetujuan, jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk penyelesaian perselisihan. Sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah di PHK, perusahaan wajib memberi uang pesangon, uang penghargaan, atau uang penggantian hak bagi pegawai (pasal 156 dan pasal 160-169). Lebih

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persennya tidak mendapatkan pesangon. Pekerja ter-PHK ini mayoritas dari kalangan pekerja usia muda 15-24 tahun. Beberapa sektor terparah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sektor konstruksi (29,3 persen), sektor perdagangan, rumah makan dan jasa (28,9 persen), dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (26,4 persen). PHK tanpa pesangon merupakan salah satu bentuk pelanggaran UU No.13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan.

Untuk mengatasi pelanggaran ini, pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan di masing-masing wilayah. Bentuk pengawasannya tidak hanya berupa *labour inspection*, tapi juga pengawasan yang bersifat mandatori. *Labour inspector*, sesuai dengan Konvensi ILO K-81 tidak boleh dihalangi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan jika ada surat perintah (ILO, 2009). Dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, Gubernur diminta untuk melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha.

Pandemi ini telah mengakibatkan banyak kerugian. Oleh karena itu, masyarakat perlu mencari strategi baru dengan memanfaatkan teknologi dan mencari peluang kerja baru, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tanpa melonggarkan PSBB, alternatif untuk menumbuhkan perekonomian di beberapa sektor perlu dipikirkan. Artinya, protokol kesehatan tetap berlaku, tapi roda ekonomi di beberapa sektor dapat lebih

lanjut, terdapat batasan-batasan yang membolehkan pengusaha untuk melakukan PHK, sehingga tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang. PHK tanpa pesangon juga merupakan salah satu pelanggaran dari undang-undang tersebut dan tergolong *industrial abuse*. Pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan pembenaran bagi perusahaan untuk membuat kebijakan yang secara normatif melanggar hak asasi pekerja untuk mendapatkan pesangon.

dihidupkan. Seperti misalnya pedagang di Salatiga yang tetap berdagang tetapi mereka menjaga jarak antar lapak dan pengunjung tetap menaati protokol kesehatan. Dalam hal ini, kurang lebih 90 persen pedagangnya telah menaati peraturan tersebut (Pemerintah Kota Salatiga, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali [BPS Provinsi Bali]. (2019). *Provinsi bali dalam angka 2019*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten [BPS Provinsi Banten]. (2019). *Provinsi Banten dalam angka 2019*. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Cox. (2020). *Coronavirus job losses could total 47 million, unemployment rate may hit 32%, fed estimates*. Retrieved May 17, 2020. <https://www.cnbc.com/2020/03/30/coronavirus-job-losses-could-total-47-million-unemployment-rate-of-32percent-fed-says.html>
- Dcode, E. (2020). *Infographics- decoding the economics of Covid-19*. <https://dcodeefc.com/infographics>
- International Labour Organization [ILO]. (2009). *K-81 Pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan*. Geneva: International Labour Organization.
- _____. (2016). *Youth employment policy summary Indonesia*. Geneva: International Labour Organization.
- _____. (2020a). *COVID-19 dan world of work: Impact and policy responses*. Geneva: International Labour Organization.

- ILO. (2020b). *ILO monitor: Covid-19 and the world of work* (2nd ed.). Geneva: International Labour Organization.
- ILO. (2020c). *ILO monitor: Covid-19 and the world of work* (3rd ed.). Geneva: International Labour Organization.
- Montenovo, L., Rojas, X., Schmutte, F., Simon, I., Weinberg, K., & Wing, B. (2020). Determinants of disparities in Covid-19 job losses. *NBER Working Paper Series*.
- Ozili, P., & Arun, T. (2020). Spillover of Covid-19: Impact on the global economy. *SSRN Electronic Journal*. <http://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>
- Pemerintah Kota Salatiga. (2020). *90% pedagang pasar pagi Salatiga taati protokol kesehatan "physical distancing."* Retrieved April 29, 2020). <http://salatiga.go.id/90-pedagang-pasar-pagi-salatiga-taati-protokol-kesehatan-physical-distancing/>
- Ziv, S. (2020, Mei 10). *Don't be fooled by official unemployment rate of 14.7%, The real figure is even scarier.* *forbes*. <https://www.forbes.com/sites/shaharziv/2020/05/10/dont-be-fooled-by-official-unemployment-rate-of-147-the-real-figure-is-even-scarier/#5181baa455dd>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

LESSONS FROM COVID-19: SMALL AND FINANCIALLY STRONG FAMILY

(PEMBELAJARAN DARI COVID19: KELUARGA KECIL DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN YG KUAT)

Thomas Soseco

Universitas Negeri Malang, Indonesia

Korespondensi penulis: thomas.soseco.fe@um.ac.id

Abstract

Households should small and but financially strong, especially to deal with a crisis where most families face a reduction in income but relatively constant expenditure. To maintain the standard of living, they need a buffer, measured from net wealth, i.e. total value of assets deducted by debts. There is no justification for how small the family size should be. For most households, higher net wealth is achieved when they have smaller household size, while only the poorest and richest households can get benefits from additional household members. However, we should also aware of the pseudo-increase of net wealth, i.e. households obtain an increasing net wealth because of additional household members but unable to push them to higher decile.

Keywords: wellbeing, total fertility rate, household's size, net wealth, debts

The pandemic COVID-19 reshapes the urgency of building small and financially strong families, as, during a crisis, most households face a reduction in income but relatively constant expenditure. The small household's size paradigm is a contrary position of the old proverb *banyak anak banyak rezeki* (more children mean more blessings/sustenance/luck). However, this proverb never mentions the ideal number of children but implicitly mentions that *rezeki* is attached to each child, and parents should never worry about his/her future. Therefore, the paradigm should be dynamic as well, i.e. rather than decide the ideal number of children, we should mention the benefits of having a small household's size.

Small and Financially Strong Households

A small household's size is encouraged by the *Keluarga Berencana* (family planning) programme that significantly cut half of the total fertility rate (TFR) in

four decades, from 5.666 in 1960 to 2.512 in 2000. However, slower progress occurs after 2000, make Indonesia's TFR is the highest among neighbour countries, e.g. Malaysia, Singapore, and Thailand. At the household level, higher TFR reflects higher financial challenges. Families with more household members will have higher expenditure (with the same standard of living) or a lower standard of living (with the same expenditure level) than smaller families. Unfortunately, large families sometimes earn money at a similar level with small families; make lower savings and asset accumulation for them.

Household's inability to maintain a standard of living can wider the gap between the rich and poor (Soseco, 2010, 2018, 2019). When inequality becomes too high, it harms the economy, deters investment, makes a less-resilient economy, and even brings about political and social instability (Ostry & Berg, 2011; Wah, 2000). Other impacts of inequality are for example health issues, crime, and education (Wilkinson & Pickett,

2009). Children who have poor parents are highly likely to be trapped in low net wealth conditions, as their parents did. On the other hand, the richest people can easily generate more wealth through inheritance, monopoly, and cronyism (Oxfam, 2018).

During a crisis, families need a buffer to maintain their living standards. The short-term emergency financial sources usually borrowing from other parties or withdraw savings. While for the longer period e.g. in a prolonged crisis, households earn money from wealth conversion (i.e. sell their property, farm, vehicles, jewellery). Households should also manage their debts carefully because debts will reduce the total value of household wealth. High wealth but if accompanied with high debts will leave a small amount of net wealth for families or even negative net wealth.

Wealth is an objective measurement to replaces the abstract concept, *rezeki*. Theoretically, more monetary or non-monetary *rezeki* means a household's ability to obtain higher income, savings, and asset ownership. Wealth can also reflect wellbeing, i.e. purchasing power to buy goods and services (Fitzsimmons & Leach, 1994; Wakita, Fitzsimmons, & Liao, 2000; Williams & Manning, 1972). Moreover, wealth can also be inherited, makes wealthy parents usually have wealthy children (Oliver & Shapiro, 1990). People with higher incomes generally have more wealth, but these measures are not interchangeable, i.e. people with more wealth do not mean always have a high income. (Filmer & Pritchett, 2001; Gibson, 2017; Oliver & Shapiro, 1990).

Comparing to income, wealth is better to reflect wellbeing as households tend to conceal their income (e.g. for security reasons or to avoid tax) or prefer not to report irregularly received-income. (Birdsall, 2010; Brown & Gray, 2014). Besides, income is a transitory character, meaning that past income does not necessarily reflect future income or wellbeing (Oliver & Shapiro, 1990). Wealth also better than expenditure to reflect wellbeing as households will always have an expenditure even though they have zero income; to pay their expenses, households can use convert their assets (Friedman, 1957). This idea also supported by McKenzie (2005), Birdsall (2010), Senik (2014), Rothwell and Robson (2018), and Clementi, Dabalen, Molini, and Schettino (2018). More specifically, the Expenditure report usually biased downward for the top

and bottom of the distribution (Brown & Gray, 2014; Clementi *et al.*, 2018; Ward, 2013).

Focus is then aimed at the household level as household members can enjoy high wealth even though the wealth is registered under other household members. Besides, social stratification cannot easily be recognized from individuals' attributes but households' attributes. (Filandri & Olagnero, 2014; Parkin, 1971; Wakita *et al.*, 2000). A more specific approach to measure financial strength is through net wealth that is obtained from total wealth deducted by debts (Fitzsimmons & Leach, 1994). Then, the equivalence factor plays a role, i.e. to adjust net wealth with the number of household members (Clementi, Gallegati, & Kaniadakis, 2012).

The Benefits of Small Household Size

The benefits of a small household's size can be revealed by investigating the relationship between the household's size and household's net wealth over time. From the observation for 1993-2014, only the richest (decile 10) and the poorest households (decile 1 and 2) have a positive effect while households in deciles 3-9 have a negative impact.

For the richest households (decile 10), additional family members increase household's net wealth as children from this decile usually have characteristics that enable them to get higher income and net wealth (e.g. better health, education, or experience). Besides, they usually married with spouses from the same socio-economic class, allowing them to preserve and inherit high net wealth. While for the poorest households (decile 1 and 2), additional family members increase their net wealth as children from these classes usually have low education and enter the workforce earlier than others. Besides, they tend to marry at an early age, driven by an image that marriage is a financial solution. For deciles 3-9, additional family member reduces their net wealth because the rising expenditure is not easily covered by the increasing income. Larger household's size prohibits themselves to find other occupation, move temporary, or relocate permanently. Besides, households usually use debts to finance their large expenses (e.g. buy property or vehicles) resulting in a negative component of net wealth.

CONCLUSION

We ought to be aware of the pseudo-increase of net wealth, i.e. households able to increase their net wealth but unable to push them to higher decile. As the household's relative position is affected by responses from other households, there will be three alternative conditions. First, the increase of household's net wealth keeps it to the same decile as other households experience a similar increase. Second, the increase of household's net wealth pushes it to higher decile as other households receive smaller net wealth increases. Third, the increase of household's net wealth drags it down to lower decile as other households enjoy a higher increase in net wealth. To be considered as wealthier than others, one household should significantly increase its net wealth, allow it to move to a higher class, and leave other households in the same decile. Therefore, poverty reduction is not achieved just from increasing household's net wealth but also enabling them to move to higher decile.

The above explanation should lead us to the urgency of the small household's size. More children are not always can make family wealthier than before, as it is only valid for the richest (decile 10) and poorest households (decile 1 and 2). For families outside those classes, more children make them less wealthy than before. The increase of household's net wealth should also consider other households' performance; otherwise, the household will enjoy a pseudo-increase of net wealth and its position will remain unchanged or even dragged down to the lower class.

To sum up, small and financially strong families is important as it gives benefits in building net wealth for most families. Besides, it is also beneficial to minimize the pseudo-increase of net wealth. This paradigm should be our focus to build better families, especially to cope with a future crisis.

REFERENCES

- Birdsall, N. (2010). *The (Indispensable) Middle Class in Developing Countries; or, The Rich and the Rest, Not the Poor and the Rest* (Working Papers 207). Center for Global Development
- Brown, S., & Gray, D. (2014). *Household Finances and Well-Being: An Empirical Analysis of Comparison Effects* (IZA DP No. 8530). Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor
- Clementi, F., Dabalén, A. L., Molini, V., & Schettino, F. (2018). *We Forgot the Middle Class!: Inequality Underestimation in a Changing Sub-Saharan Africa*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3243750>
- Clementi, F., Gallegati, M., & Kaniadakis, G. (2012). A generalized statistical model for the size distribution of wealth *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2012(12), 1-25. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2012/12/P12006>
- Filandri, M., & Olagnero, M. (2014). Housing Inequality and Social Class in Europe. *Housing Studies*, 29(7), 977-993. <https://doi.org/10.1080/02673037.2014.925096>
- Filmer, D., & Pritchett, L. H. (2001). Estimating Wealth Effects without Expenditure Data-or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India. *Demography*, 38(1), 115-132. <https://doi.org/10.2307/3088292>
- Fitzsimmons, V., & Leach, L. J. (1994). Net Worth Change: Beginning and Expanding Life Cycle Stages. *Journal of Financial Counseling and Planning* 5(1)
- Friedman, M. (1957). *A Theory of the Consumption Function*: National Bureau of Economic Research, Inc.
- Gibson, L. (2017). *Towards a more equal Indonesia*. OXFAM International. <https://oxf.am/2FK0Pae>

- McKenzie, D. J. (2005). Measuring inequality with asset indicators. *Journal of Population Economics*, 18(2), 229-260. <https://doi.org/10.1007/s00148-005-0224-7>
- Oliver, M. L., & Shapiro, T. M. (1990). Wealth of a Nation: A Reassessment of Asset Inequality in America Shows at Least One Third of Households Are Asset-Poor. *The American Journal of Economics and Sociology*, 49(2), 129-151.
- Ostry, J. D., & Berg, A. (2011). *Inequality and Unsustainable Growth; Two Sides of the Same Coin?* : International Monetary Fund
- Oxfam. (2018). Reward work, not wealth: To end the inequality Crisis, we must build an economy for ordinary working People, not the rich and powerful. [*Oxfam Briefing Paper*]
- Parkin, F. (1971). *Class inequality and political order*. London: MacGibbon & Kee
- Rothwell, D., & Robson, J. (2018). The prevalence and composition of asset poverty in Canada: 1999, 2005, and 2012. *International Journal of Social Welfare*, 27(1), 17-27. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12275>
- Senik, C. (2014). Wealth and happiness. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(1), 92-108. <http://doi.org/10.1093/oxrep/gru004>
- Soseco, T. (2010). Perkiraan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia dengan Indeks Theil. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2, 110-116.
- _____. (2018). The Composition and Distribution of Household Wealth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10(2), 153-167.
- _____. (2019). *Application of Dagum Type III Model to Measure Net Wealth Inequality in Indonesia* Paper presented at the Asian and Australasian Society of Labour Economics 2019 Conference, Singapore
- Wah, C. K. (2000). Prosperity or inequality: deconstructing the myth of home ownership in Hong Kong. *Housing Studies*, 15(1), 28-43. <https://doi.org/10.1080/02673030082450>
- Wakita, S., Fitzsimmons, V. S., & Liao, T. F. (2000). Wealth: Determinants of Savings Net Worth and Housing Net Worth of Pre-Retired Households. *Journal of Family and Economic Issues*, 21(4), 387-418. <https://doi.org/10.1023/a:1026432705410>
- Ward, P. (2013). Measuring the Level and Inequality of Wealth: An Application to China. *Review of Income and Wealth*, 60(4), 613-635. <https://doi.org/10.1111/roiw.12063>
- Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). *The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger*. New York: Bloomsbury Press.
- Williams, F. L., & Manning, S. L. (1972). Net Worth Change of Selected Families 1. *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 1(2), 104-113. <https://doi.org/10.1177/1077727x7200100205>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PRODUKTIVITAS SELAMA *WORK FROM HOME*: SEBUAH ANALISIS PSIKOLOGI SOSIAL

(*PRODUCTIVITY DURING WORK FROM HOME: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL ANALYSIS*)

Agung Minto Wahyu^{*}, Mochammad Sa'id

Jurusan Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang

^{*}Korespondensi penulis: agungminto98@gmail.com

Abstract

The spread of the COVID-19 pandemic requires each country to limit activities of its people outside the home by doing Work from Home (WFH). The purpose of this paper is to reveal the impact of WFH on worker productivity in the perspective of social psychology. The analysis shows that during WFH, worker productivity can increase due to the effects of social facilitation. Workers perceive the presence of others as triggers to increase their productivity. Conversely, workers' productivity can also decrease during working together with others because the presence of other people is perceived as a threat. On the other hand, job demands, distractors, and facilitators can activate the latent personality trait of an individual so that it manifests into a new work behavior during WFH. Strategies to maintain productivity is to use brainstorming, break down work teams into smaller, as well as the application of Nominal Group Technique.

Keywords: *productivity, work from home, pandemic, COVID-19, social psychology*

Sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization/WHO* (WHO, 2020), *Corona Virus Diseases-19* (COVID-19) telah menjadi permasalahan bersama bagi seluruh negara di dunia. WHO (2020) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya permasalahan kesehatan, melainkan telah menjadi permasalahan multi-sektoral, seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hingga psikologis. Konsekuensi yang ditimbulkan juga bukan hanya sebatas konsekuensi kesehatan saja, melainkan etdari itu, WHO kemudian memberikan mandat kepada seluruh negara untuk bekerja dengan melibatkan banyak mitra di semua sektor. Lebih lanjut, WHO juga menekankan pada setiap individu untuk terlibat dalam perjuangan melawan pandemi ini.

Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini.

Salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 adalah melalui pembatasan aktivitas di luar rumah (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Hal tersebut mengharuskan sebagian besar pekerja melakukan pekerjaannya dari rumah atau kerja dari rumah (KDR)/ *work from fome* (WFH). KDR merupakan pekerjaan berbayar yang dilakukan dari jarak jauh, biasanya lebih banyak dilakukan dari rumah (Crosbie & Moore, 2004). Meskipun demikian, masih ada beberapa pekerjaan yang belum bisa menerapkan sistem KDR sehingga terpaksa harus bekerja di luar rumah. Di Indonesia sendiri, himbauan

untuk melakukan KDR diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sejak 15 Maret 2020, bersamaan dengan mulai merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia (Ratriani, 2020).

Bekerja selama pandemi ini tentu memberikan perubahan dalam kultur kerja yang membuat pekerja perlu melakukan penyesuaian. Sebelum adanya KDR era pandemi, sebagian besar pekerjaan dilakukan menggunakan interaksi tatap muka, termasuk ketika melakukan kolaborasi maupun bekerja dengan tim. Di sisi lain, pekerjaan dan kehidupan rumah adalah suatu hal yang terpisah. Sebab, bekerja memerlukan waktu dan suasana khusus, terlebih ketika akan bertemu dengan rekan kerja profesional (Singh & Kumar, 2020). Akan tetapi, pandemi yang terjadi saat ini mampu mengubah kultur bekerja yang sebelumnya sulit untuk diubah. Perubahan yang menonjol di antaranya adalah fleksibilitas jam kerja. Selain itu, individu juga dapat menentukan area kerja yang didesain sendiri sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya dari rumah. Selain itu, seluruh aktivitas pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara daring. Perubahan-perubahan kultur tersebut kemudian disebut sebagai sebuah kenormalan baru (Mustajab dkk., 2020).

KDR memiliki dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, KDR dapat memberikan fleksibilitas waktu bagi pekerja sehingga menghasilkan keseimbangan hidup yang lebih baik (Crosbie & Moore, 2004). Selain itu, KDR juga memberikan keuntungan bagi perusahaan karena biaya operasional yang dikeluarkan untuk pekerja semakin berkurang. Survei emailanalytics.com menunjukkan bahwa 77 persen pekerja KDR memiliki produktivitas kerja yang meningkat (Suryanto, 2020). Pemerintah sendiri sebenarnya juga sudah menerapkan KDR sejak tahun 2018 yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana di dalamnya telah diatur mengenai KDR.

Di sisi lain, survei McKinsey (Afriyadi, 2020) dan YouGov & USA Today (Schrotenboer, 2020) melaporkan fakta yang berbeda, dimana KDR justru dapat menurunkan produktivitas kerja sebesar 25 persen. Hal tersebut terjadi salah satunya karena KDR sering membuat para pekerja harus melakukan

pekerjaannya di sepanjang waktunya tanpa henti. Penelitian Williams (2020) menyatakan bahwa jam kerja di Amerika Serikat meningkat 40 persen atau setara 3 jam lebih lama daripada waktu bekerja di kantor sebelumnya. Selain itu, Larson (2020) juga mengemukakan penyebab lain menurunnya produktivitas selama KDR. Pertama, kurangnya pengawasan terhadap pekerja sehingga menyebabkan hilangnya motivasi kerja. Kedua, banyaknya distraktor yang membuat pekerja kehilangan fokus untuk bekerja. Ketiga, sering terjadi miskomunikasi. Keempat, masalah keamanan data. Perbedaan hasil-hasil riset/kajian mengenai dampak KDR terhadap produktivitas pekerja di atas membuat topik ini relevan untuk terus dikaji. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan sudut pandang psikologi sosial.

Dalam pandangan psikologi sosial, peningkatan produktivitas kerja dipengaruhi oleh adanya *social facilitation*. *Social facilitation* merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan produktivitas individu ketika sedang bekerja dengan orang lain daripada ketika bekerja sendirian (Forsyth, 2010; Zajonc, 1965). Dalam konteks KDR ini, proses interaksi dengan rekan kerja dapat dilakukan menggunakan media daring. Hal tersebut relevan dengan pendapat Soekanto (2012) yang menjelaskan bahwa interaksi dengan orang lain terjadi tidak hanya ketika tatap muka secara langsung, melainkan juga dapat terjadi secara tidak langsung.

Ada empat pandangan teori dari Forsyth (2010) yang dapat menjawab proses terjadinya *social facilitation* dalam konteks KDR. Pertama, teori *drive processes* yang memandang bahwa kehadiran orang lain ketika individu sedang melakukan pekerjaan tertentu akan direspon sebagai sebuah tantangan (Zajonc, 1965). Oleh karena itu, individu akan berusaha untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Ketika dalam kondisi KDR, individu akan selalu menjaga keterhubungannya dengan rekan-rekan yang lain (Agung, 2020). Maka dari itu, individu yang mengerjakan tugasnya dari rumah akan merasa tertantang ketika sedang terhubung dengan orang lain melalui media *daring*. Dengan demikian, besar kemungkinan *output* pekerjaan yang dihasilkan menjadi lebih produktif.

Pandangan kedua yaitu *motivational process* yang menyatakan bahwa individu akan berusaha untuk mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik di hadapan orang lain karena memiliki kekhawatiran terhadap penilaian atau evaluasi orang lain terhadap dirinya (Cottrell, 1972). Kekhawatiran tersebut berasal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa orang lain adalah sumber dari sebagian besar penghargaan dan hukuman yang diterima. Selama KDR, individu akan tetap terkoneksi dengan rekan-rekannya melalui berbagai media daring (Anggraeni, 2020). Selama masih ada keterhubungan tersebut, individu sangat mungkin berada pada posisi dimana orang lain melakukan penilaian atau evaluasi terhadapnya. Dalam posisi tersebut, individu akan cenderung berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya agar mendapatkan evaluasi atau penilaian yang baik dari atasan atau rekan-rekannya. Motivasi untuk mendapatkan evaluasi atau penilaian yang baik tersebut akan membuat individu melakukan *self-presentation*. *Self-presentation* merupakan upaya individu untuk mengendalikan impresi orang lain mengenai dirinya (Forsyth, 2010). Individu berusaha untuk menampilkan dirinya secara positif, serta berusaha untuk menutupi karakteristik negatif yang dimilikinya. Salah satunya yaitu dengan berupaya untuk mengerjakan tugasnya sebaik dan seproduktif mungkin.

Pandangan ketiga yaitu *cognitive process* yang beranggapan bahwa ketika individu sedang bekerja di hadapan orang lain, ia harus membagi perhatiannya antara mengerjakan tugasnya atau memperhatikan orang lain (Forsyth, 2010). Dalam kondisi tersebut, individu cenderung berusaha untuk lebih fokus mengerjakan tugas-tugasnya daripada berfokus pada orang lain (Baron, 1986). Selama KDR, sangat memungkinkan jika individu lebih memilih fokus untuk mengerjakan tugasnya meskipun secara bersamaan sedang melakukan *teleconference* dengan rekan-rekannya. Muller & Butera (2007) memaparkan bahwa preferensi fokus individu terhadap tugasnya sebenarnya juga dipicu oleh kekhawatiran untuk dievaluasi.

Pandangan keempat yaitu *personality process*. Pandangan tersebut erat kaitannya dengan *social orientation theory*. Individu yang memiliki orientasi sosial positif akan merespon kehadiran orang lain

dengan cara yang positif yaitu berupaya meningkatkan produktivitasnya. Sebaliknya, individu yang memiliki orientasi sosial negatif akan merespon kehadiran orang lain secara negatif sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas (Uziel, 2007). Dalam konteks KDR, memungkinkan bagi individu yang memiliki orientasi sosial positif untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan cara mengerjakan tugas-tugasnya dan menjalin interaksi dengan rekan kerjanya yang lain melalui media daring secara bersama-sama. Di sisi lain, individu yang memiliki orientasi negatif akan memanfaatkan KDR dengan membatasi interaksi dengan rekan kerja agar dapat lebih fokus mengerjakan tugas-tugasnya. Hal ini dikarenakan individu dapat bekerja secara individual tanpa harus bergabung dengan kelompoknya (Agung, 2020).

Selain peningkatan produktivitas, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa KDR justru dapat menjadi pemicu menurunnya produktivitas pekerja. Hal ini dipengaruhi oleh adanya *social loafing*, yaitu kecenderungan berkurangnya produktivitas seseorang ketika bekerja dengan orang lain. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, tingginya anonimitas di dalam kelompok. Hal tersebut terjadi jika tugas-tugas yang diberikan sangat abstrak sehingga sulit untuk dilakukan pembagian tugas. Apalagi jika tingkat pengawasannya rendah sehingga kontribusi dari masing-masing anggota tidak dapat teridentifikasi. Dalam konteks KDR, hal ini sangat mungkin terjadi.

Penyebab kedua adalah fenomena *free riding*, yaitu upaya untuk mengurangi kontribusi dalam mengerjakan tugas-tugas kolektif karena telah ditangani oleh anggota lainnya. Hal tersebut terjadi karena individu berpikir bahwa timnya akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan meskipun dirinya tidak memberikan kontribusi (Hoffman & Rogelberg, 2001). Stieg (2020) melansir bahwa dalam kondisi KDR banyak pekerja yang menjadi kurang produktif ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang bersifat tim sehingga lebih sering menjadi penunggang pasif di dalam tim tersebut. Laporan Bloom (2020) juga menunjukkan bahwa selama KDR ini produktivitas pekerja menurun cukup drastis yaitu sekitar 50 persen.

Faktor ketiga adalah tidak adanya standar baku yang dapat digunakan untuk membedakan hasil pekerjaan pribadi dengan pekerjaan tim. Penetapan tingkat standar keluaran yang diharapkan juga dapat berpengaruh terhadap produktivitas (Klocke, 2007). Dalam konteks KDR, penetapan standar yang terlalu tinggi dapat membuat target yang ditetapkan sulit untuk tercapai oleh tim. Namun sebaliknya, target yang terlalu rendah akan membuat beberapa individu mampu menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan timnya. Hal ini dapat membuat sebagian anggota tim menjadi tidak produktif. Penelitian Coworking Resources (2019) menunjukkan bahwa pekerja menjadi lebih apatis terhadap pekerja lain dalam timnya ketika tugas yang dikerjakan terlalu mudah. Hal ini disebabkan pekerja percaya bahwa pekerja lain dalam tim akan mampu mengerjakan tanpa bantuannya.

Selain *social loafing*, penurunan produktivitas kerja juga dapat dilihat dari pandangan teori *the Ringelmann effect* yang menyatakan bahwa produktivitas kerja individu dapat menurun karena kurangnya motivasi untuk bekerja dan kesulitan untuk berkoordinasi di dalam suatu tim (Forsyth, 2010). Dalam KDR, kesulitan berkoordinasi tersebut sering terjadi ketika mengalami kendala saat menggunakan media komunikasi daring. Hal ini sejalan dengan Adam (2016) yang menyatakan bahwa produktivitas pekerja saat ini sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi.

Selain pandangan-pandangan di atas, permasalahan produktivitas kerja selama KDR juga dapat dianalisis dengan teori aktivasi sifat (*trait activation theory*) (Tett & Burnett, 2003). Teori ini berpandangan bahwa tuntutan kerja (*job demands*), *distractors*, dan *facilitators* dapat mengaktifkan sifat kepribadian (*personality trait*) laten individu sehingga termanifestasi menjadi sebuah perilaku kerja. Dalam pandangan teori ini, tuntutan kerja yang telah diatur dalam uraian jabatan dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan kinerja individu (Tett dkk., 2013; Tett & Burnett, 2003). Akan tetapi, peningkatan kinerja tersebut tergantung pada penghargaan (*rewards*) yang akan didapatkannya dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam konteks KDR, tuntutan kerja dan

penghargaan yang rinci akan membuat individu berusaha untuk membentuk perilaku kerja laten yang baru sehingga mendukung kemampuan bekerjanya di rumah secara optimal. Di antaranya adalah kemampuan disiplin diri, bekerja sama tanpa bertemu langsung, rapat secara daring, dan perilaku mempertahankan konsentrasi di depan gawai.

Berbanding terbalik dengan tuntutan kerja, *distractors* justru memiliki kecenderungan untuk berkontribusi negatif terhadap kinerja seseorang (Tett dkk., 2013). Dalam konteks KDR, seringnya ajakan dari keluarga untuk berinteraksi ketika sedang berada dalam jam kerja membuat individu terganggu. Ajakan untuk berinteraksi di jam kerja tersebut membuat individu berpotensi kehilangan fokus kerjanya dan mengakibatkan menurunnya produktivitas. Tett dan Burnett (2003) menyatakan bahwa distraktor terkadang tidak dapat dideteksi sebagai pengganggu oleh pekerja, misalnya dalam kasus ajakan untuk berinteraksi dengan keluarga ketika jam kerja. Pekerja menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang positif untuk dilakukan, padahal ajakan tersebut membuat pekerja berpotensi kehilangan fokus untuk bekerja.

Di sisi lain, *facilitators* secara unik dapat memberikan penguatan terhadap efek aktivasi atau deaktivasi *trait personality*. *Facilitators* akan mengaktifkan *trait personality* jika individu sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan kerja. Akan tetapi, *facilitators* akan melakukan deaktivasi terhadap *trait personality* jika individu sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan *distractors* (Tett & Burnett, 2003). Dalam konteks KDR, misalnya terdapat *facilitators* yang berupa ajakan untuk berdiskusi secara daring mengenai tugas pekerjaan dengan rekan kerja. Apabila diskusi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan kerja, ia akan dapat membantu individu untuk mempermudah pekerjaannya dan berkontribusi positif bagi kinerjanya. Di sisi lain, apabila ajakan untuk berdiskusi secara daring tersebut dilakukan dengan maksud lain di luar pekerjaan, hal tersebut akan menjadi *distractor* yang dapat mengganggu fokus kerjanya (Ziegler dkk., 2014).

KESIMPULAN

Social facilitation memandang bahwa individu akan berupaya meningkatkan produktivitasnya ketika bekerja dengan orang lain. Terdapat beberapa pandangan yang dapat menjelaskan pemicu timbulnya *social facilitation* dalam masa KDR, yaitu *drive process*, *motivational process*, *cognitive process*, dan *personality process*. Di sisi lain, berkurangnya produktivitas seseorang selama KDR dapat disebabkan oleh *social loafing* yang memandang bahwa individu akan kehilangan produktivitasnya ketika bekerja di hadapan orang lain. Penyebabnya adalah pertama karena tingginya anonimitas di dalam tim, kedua karena adanya *free riding*, ketiga adalah penetapan standar target *output* yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selain itu, produktivitas seseorang juga dipengaruhi oleh *job demands*, *distractors*, dan *facilitators* yang memiliki kemampuan untuk mengaktivasi atau melakukan de-aktivasi terhadap *personality trait* laten sehingga dapat membentuk perilaku kerja baru. Perilaku kerja baru yang bersifat positif maupun negatif tersebut kemudian akan menentukan produktivitas selama KDR.

Untuk mempertahankan produktivitas individu dalam tim selama KDR dapat dilakukan dengan melakukan *brainstorming*. Hasil penelitian Singh & Kumar (2020) mengungkap bahwa kemampuan melakukan *brainstorming* dan berpikir kritis untuk mengambil keputusan secara cepat perlu dimiliki pekerja di masa pandemi ini. *Brainstorming* dapat digunakan untuk memunculkan solusi-solusi baru yang bersifat *out of the box*. Selama KDR, hal ini dapat dilakukan melalui diskusi-diskusi rutin dengan rekan-rekan kerja secara daring. Untuk memunculkan kreativitas dalam membuat solusi, sesi diskusi harus dibangun dengan sikap terbuka setiap anggota. Tujuannya adalah agar dapat mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya dari seluruh anggota. Setiap anggota juga dihimbau untuk senantiasa mendukung ide-ide yang muncul. Selain itu, tidak diperkenankan terlebih dahulu untuk melakukan kritik atau evaluasi terhadap ide apapun yang muncul. Sebab semua ide yang telah terkumpul dianggap berharga. Dalam proses penyampaian ide atau gagasan, setiap anggota tim juga dapat diberikan jadwal terstruktur secara bergantian (Forsyth, 2010). Hal tersebut sangat relevan mengingat selama KDR pekerja hanya dapat berkomunikasi melalui media

daring. Jika tidak terstruktur dengan baik, maka akan sulit untuk mencapai target solusi kreatif yang diharapkan. Paulus & Brown (2007) menyatakan ada tiga strategi untuk meningkatkan efektivitas curah pendapat (*brainstorming*). Pertama, setiap anggota dihimbau untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, memberikan jeda di sela-sela diskusi sehingga tidak terkesan terburu-buru. Ketiga, pemimpin dalam tim kerja tersebut diharapkan bersedia sepenuhnya untuk memfasilitasi jalannya curah pendapat tersebut.

Alternatif lain untuk menjaga produktivitas kerja selama KDR yaitu dengan cara membagi anggota tim menjadi tim-tim yang lebih kecil (Forsyth, 2010). Dengan begitu, setiap anggota akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi di dalam tim kecil. Di sisi lain, pada saat-saat tertentu tim juga dapat memanfaatkan *Nominal Group Technique* (NGT). NGT merupakan metode yang dilakukan dengan cara meminimalkan bekerja bersama dengan orang lain untuk sementara waktu dengan tujuan meminimalisasi *social loafing* akibat ketergantungan terhadap orang lain. Selama KDR, NGT dapat dilakukan dengan melakukan pembagian tugas dalam tim. Lalu, masing-masing individu menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya untuk kemudian dilaporkan kepada tim setelah selesai dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2016). Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia melalui Peningkatan Produktivitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 71–84. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.205>
- Afriyadi, A. D. (2020, April 9). *WFH Kurangi Produktivitas? Tangkis Pakai Cara Ini*. Detik News. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4971346/wfh-kurangi-produktivitas-tangkis-pakai-cara-ini>
- Agung, A.M.L. (2020, Maret 17). Tantangan Kerja dari Rumah dan Cara Menyasikannya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/183124765/tantangan-kerja-dari-rumah-dan-cara-menyasikannya?page=all>

- Anggraeni, L. (2020, April 16). *Jaga Komunikasi via WhatsApp Selama di Rumah*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/wkBYYaDb-jaga-komunikasi-via-whatsapp-selama-di-rumah>
- Baron, R. S. (1986). Distraction-Conflict Theory: Progress and Problems. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19, 1–40. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60211-7](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60211-7)
- Bloom, N. (2020, Maret 30). *The Productivity Pitfalls of Working from Home in The Age of COVID-19*. Stanford News. <https://news.stanford.edu/2020/03/30/productivity-pitfalls-working-home-age-covid-19/>
- Cottrell, N. B. (1972). Social Facilitation. In C. G. McClintock (Ed.), *Experimental Social Psychology* (pp. 185–236). New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Coworking Resources. (2019, Maret 14). *The Negative Effects of Working From Home on Company Culture*. <https://www.coworkingresources.org/blog/the-negative-effects-of-working-from-home-on-company-culture>
- Crosbie, T., & Moore, J. (2004). Work–life Balance and Working from Home. *Social Policy and Society*, 3(3), 223–233. <https://doi.org/10.1017/S1474746404001733>
- Forsyth, D. R. (2010). *Group Dynamics (5th Ed)*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Hoffman, J. R., & Rogelberg, S. G. (2001). All Together Now? College Student’s Preferred Project Group Grading Procedures. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 5, 33–40. <https://doi.org/10.1037/1089-2699.5.1.33>
- Klocke, U. (2007). How to Improve Decision Making in Small Groups: Effects of Dissent and Training Interventions. *Small Group Research*, 38, 437–468. <https://doi.org/10.1177/1046496407301974>
- Larson, B. (2020). *Companies Can Help Employees Working Remotely During The Covid-19 Pandemic*. <https://news.northeastern.edu/2020/03/12/heres-how-companies-can-help-employees-working-remotely-in-light-of-the-covid-19-pandemic/>
- Muller, D., & Butera, F. (2007). The Focusing Effect of Self-evaluation Threat in Coaction and Social Comparison. *Journal of Personality and Social Psychology*, 93, 194–211. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.2.194>
- Mustajab, D., Bauw, A., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. A., & Hamid, M. A. (2020). Working from Home Phenomenon as an Effort to Prevent COVID-19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity. *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 4(1), 13–21. <http://dx.doi.org/10.20473/tijab.V4.I1.2020.13-21>
- Paulus, P. B., & Brown, V. R. (2007). Toward More Creative and Innovative Group Idea Generation: A Cognitive-Social-Motivational Perspective of Brainstorming. *Social and Personality Psychology Compass*, 1, 248–265. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00006.x>
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175612/Perpres%20Nomor%2095%20Tahun%202018.pdf>
- Ratriani, V. R. (2020, Maret 16). Jokowi Instruksikan Bekerja dari Rumah, Ini Arti WFH. *Kompas News*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/195035165/jokowi-instruksikan-bekerja-dari-rumah-ini-arti-work-from-home>
- Schrotenboer, B. (2020, Mei 4). *Working at Home had a Positive Effect on Productivity during the Pandemic, Survey Says*. USA Today. <https://www.usatoday.com/story/money/2020/05/04/coronavirus-pandemic-might-game-changer-working-home/3061862001/>
- Singh, M. K., & Kumar, V. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Working Culture: An Exploratory Research Among Information Technology (IT) Professionals in Bengaluru, Karnataka (India). *Journal of Xi'an University of Architecture and Technology*, 12(5), 3176–3184.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Stieg, C. (2020, March 12). *Working from Home Actually Makes you Better at Some Tasks and Worse at Others, Here's What You Need to Know?* CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/03/12/study-how-working-from-home-boosts-and-hurts-productivity-creativity.html>
- Suryanto. (2020, Mei 1). Pekerja Ingin WFH Diadopsi Perusahaan meski Pandemi Corona Usai. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/1456635/pekerja-ingin-wfh-diadopsi-perusahaan-meski-pandemi-corona-usai>
- Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A Personality Trait-Based Interactionist Model of Job Performance. *Journal of Applied Psychology*, 88(3), 500–517. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.3.500>
- Tett, R. P., Simonet, D. V., Walser, B., & Brown, C. (2013). Trait Activation Theory: Applications, Developments, and Implications for Person–Workplace Fit. In N. D. Christiansen & R. P. Tett (Eds.), *Handbook of Personality at Work* (pp. 71–100). United Kingdom: Roudledge.
- Uziel, L. (2007). Individual Differences in the Social Facilitation Effect: A Review and Meta-Analysis. *Journal of Research in Personality*, 41, 579–601. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.06.008>
- World Health Organization [WHO]. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). Isolation, Quarantine, Social Distancing and Community Containment: Pivotal Role for Old-Style Public Health Measures in the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Outbreak. *Journal of Travel Medicine*, 27(2), 1–4. <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa020>
- Williams, J. C. (2020, Mei 11). *The Pandemic Has Exposed the Fallacy of the "Ideal Worker."* Harvard Business Review. <https://hbr.org/2020/05/the-pandemic-has-exposed-the-fallacy-of-the-ideal-worker>
- Zajonc, R. B. (1965). Social Facilitation. *Science, New Series*, 149(3681), 269–274. <https://doi.org/10.1126/science.149.3681.269>
- Ziegler, M., Bensch, D., Maaß, U., Schult, V., Vogel, M., & Bühner, M. (2014). Big Five Facets as Predictor of Job Training Performance: The Role of Specific Job Demands. *Learning and Individual Differences*, 29, 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2013.10.008>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)
e-ISSN : 2502-8537 (Online)

MEMPERSIAPKAN KETAHANAN KELUARGA SELAMA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI COVID-19

(PREPARING FOR FAMILY RESILIENCE DURING ADAPTATION OF NEW HABITS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD)

Maulana Rezi Ramadhana

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom
Wellness Center, Universitas Telkom

*Korespondensi penulis: rezimaulana@telkomuniversity.ac.id

Abstract

Changes in family dynamics during the isolation period of COVID-19 have an impact on family resilience in preparing for the adaptation of new habits in Indonesia. This study examines emotional reactions and family resilience, using family demographic groups, namely family type, parent's occupational type, and a residential area used as study variables. The sample came from 318 overseas student families who had reunited with families from 23 cities and districts in West Java Province. Simple frequency data analysis were used to present related situations. The results of the study showed that family type, family socioeconomic (parents' occupation), and the type of residential area of the family showed differences in positive emotions, negative emotions and were significant to family resilience during COVID-19 isolation. The implications of this study lead to the function of families in strengthening family resilience to prepare for the adaptation of new habits in Indonesia.

Keywords: *family resilience, emotion, COVID-19, adapt to new habits, Indonesia*

Aktivitas masyarakat telah berubah sejak pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan protokol isolasi mandiri dalam pencegahan penularan coronavirus (COVID-19), diantaranya dengan mengalihkan aktivitas kerja dan belajar dari rumah (Yunus & Rezki, 2020) serta pembatasan sosial berskala besar (Pakpahan, 2020) di beberapa daerah di Indonesia. Isolasi mandiri merupakan pemisahan dan pembatasan gerakan dari orang yang berpotensi tertular virus sehingga mengurangi risiko menularkan penyakit kepada orang lain (CDC, 2017; Manuell & Cukor, 2011). Meski himbauan protokol isolasi mandiri telah disosialisasikan, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan mengingat kebijakan pembatasan ini jauh dari cerminan budaya di masyarakat (Djalante dkk., 2020).

Dampak protokol isolasi mandiri selama masa pandemi COVID-19 ini telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, mulai dari kesehatan fisik dan kesehatan mental (Ho dkk., 2020; Liu dkk., 2020; Setiati & Azwar, 2020; C. Wang dkk., 2020; Yang dkk., 2020), kesehatan masyarakat dan lingkungan (Dong & Bouey, 2020; Tsai & Wilson, 2020), gaya hidup dan komunikasi (Dani & Mediantara, 2020), sampai dengan masalah relasi sosial (Tanoue dkk., 2020). Pada level individu, dampak isolasi pun dihubungkan dengan gangguan seperti depresi (Hawryluck dkk., 2004), stres (DiGiovanni dkk., 2004), kemarahan (Marjanovic dkk., 2007), kebingungan (Pan dkk., 2005), ketakutan (Caleo dkk., 2018), kesedihan (Wang dkk., 2011), kecemasan (Desclaux dkk., 2017), dan gangguan emosional

lainnya (Yoon dkk., 2016) yang berdampak pada kehidupan keluarga.

Fungsi keluarga di masa isolasi COVID-19 ini penting dalam pertahanan dan perlindungan anggota keluarga, selain mendorong pada penyesuaian terhadap kebiasaan baru, mencapai identitas baru, dan membangun koneksi baru (Buzzanell, 2018; Walsh, 2016). Emosi yang muncul pada suatu keluarga dapat memengaruhi tekanan yang muncul pada keluarga tersebut (Folkman & Moskowitz, 2000), dan terkait dengan ketahanan keluarga dalam kesehatan maupun psikologis (Affleck & Tennen, 1996). Ketahanan keluarga adalah hal yang penting selama masa isolasi COVID-19 dalam mempersiapkan kebiasaan baru, karena ketahanan keluarga memengaruhi kehidupan anggota keluarga (Carr, 2015) serta berkontribusi pada aspek ekonomi, pengasuhan, pendidikan, dan sosialisasi. Selain itu, ketahanan keluarga dapat melindungi anggota yang berisiko (Patterson, 2002) serta berfungsi untuk mencegah risiko masalah di keluarga (Puspitawati dkk., 2018).

Melalui studinya, Walsh (1995) telah mengelompokkan dimensi ketahanan keluarga, yaitu keyakinan keluarga, pola pengelolaan keluarga, dan komunikasi keluarga. Berbagai penelitian tentang ketahanan keluarga pun banyak melibatkan aspek demografi keluarga dalam konteks situasi krisis yang berbeda, seperti pada pengungsi di Korea Utara (Nam dkk., 2016), pada kondisi keluarga dengan orang tua berpenyakit demensia (Deist dkk., 2017), pada kondisi anak penyandang skizofrenia di Afrika Selatan (Bishop & Greef, 2015), dan pada situasi bencana alam badai katrina di Amerika Serikat (Hackbart dkk., 2012). Meskipun penelitian sebelumnya tentang konteks ketahanan keluarga telah tersedia, belum jelas konteks ketahanan keluarga pada situasi COVID-19 saat ini. Tulisan ini memfokuskan pada reaksi emosi dan ketahanan keluarga berdasarkan aspek demografi keluarga selama masa isolasi COVID-19.

Kuesioner secara daring tentang reaksi emosi positif-negatif (Ekman, 2005; Fredrickson, 2003) dan ketahanan keluarga (Walsh, 1996) diberikan kepada 318 orang tua sampel keluarga dari mahasiswa rantau yang telah berkumpul bersama keluarga. Mereka berasal dari 23 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Faktor demografi keluarga dikelompokkan berdasarkan tipe keluarga (Sharma, 2013), yaitu 72,6

persen berasal dari keluarga inti (*nuclear family*), 17 persen keluarga inti yang tinggal bersama dengan saudara-saudara kandung (*joint family*), dan 10,4 persen keluarga inti yang tinggal bersama dengan orang tua, saudara dan lebih dari dua generasi lain dalam satu rumah (*extended family*). Status sosial ekonomi keluarga dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua, yaitu wiraswasta (29,2 persen), pegawai swasta (23,3 persen), pegawai BUMN (23,3 persen), pegawai Aparatur Sipil Negara (12,6 persen), pegawai honorer (6,6 persen), dan TNI/Polisi (4,4 persen). Selain itu, jenis pemukiman keluarga (Sharp & Clark, 2008) terdiri dari 50,9 persen keluarga yang tinggal di kawasan pemukiman subdaerah kota dan terdekat dari pusat kota (*suburban*), 33,6 persen keluarga yang tinggal di kawasan pemukiman yang melingkari subdaerah kota (*suburban fringe*), dan 15,4 persen keluarga yang tinggal di kawasan pemukiman terletak di antara kota dan desa (*rural urban fringe*). Seluruh informasi dikumpulkan selama dua puluh tujuh hari, dengan analisis menggunakan frekuensi sederhana untuk menyajikan situasi yang terkait.

Reaksi emosi selama masa isolasi COVID-19 pada sebagian besar sampel keluarga lebih sering muncul dalam bentuk emosi positif. Berdasarkan tipe keluarga, *nuclear family* lebih merasakan harapan tumbuh bersama, kegembiraan, dan kecemasan, hal yang berbeda dengan *joint family* yang lebih merasakan ketenangan, kemarahan, dan kesedihan. Sementara tipe *extended family* lebih dominan merasakan kedua warna emosi (baik positif maupun negatif), seperti ungkapan rasa syukur, kasih sayang, semangat, kebosanan, keputusan, dan ketakutan. Berdasarkan pekerjaan orang tua, pegawai honorer lebih dominan dalam reaksi emosi negatif, termasuk kecemasan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan keputusan, sementara kebosanan dan ketenangan lebih sering dirasakan oleh orang tua yang bekerja sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. Keluarga dengan orang tua yang berprofesi sebagai TNI/Polisi lebih menyikapi rasa syukur, semangat, dan penuh harapan, hal yang berbeda dengan orang tua pegawai BUMN yang lebih merasakan kasih sayang dan kegembiraan selama masa isolasi.

Berdasarkan area pemukiman tinggal keluarga, baik emosi positif maupun negatif lebih sering muncul pada keluarga yang tinggal di kawasan *suburban fringe* (seperti kasih sayang, penuh harapan, semangat,

gembira, kesedihan, dan kemarahan), sedangkan pada keluarga *rural urban fringe* lebih sering muncul rasa syukur, ketenangan, ketakutan, dan keputusan,

sementara keluarga *suburban* lebih merasakan kecemasan dan kebosanan.

Tabel 1. Distribusi frekuensi variabel emosi dan ketahanan keluarga berdasarkan aspek demografi keluarga (n=318)

Variabel	Tipe keluarga			Pekerjaan Orangtua						Area Tinggal		
	NF	JF	EF	1	2	3	4	5	6	RUF	SUF	SUB
Emosi negatif	23,1%	23,3%	23,6%	27,1%	21,8%	18,9%	23,8%	19,9%	28,6%	22,3%	24,9%	22,9%
<i>Cemas</i>	35,1%	29,6%	13,1%	25,0%	21,6%	19,7%	28,6%	26,9%	33,3%	21,5%	27,3%	29,0%
<i>Sedih</i>	21,0%	26,5%	25,2%	30,0%	21,6%	17,1%	28,6%	15,1%	33,3%	16,2%	33,6%	22,9%
<i>Marah</i>	25,9%	36,2%	27,2%	27,5%	27,0%	23,7%	35,7%	26,9%	38,1%	32,4%	34,1%	23,0%
<i>Putus asa</i>	15,7%	11,3%	19,4%	17,5%	13,5%	15,8%	14,3%	12,9%	19,0%	16,4%	16,4%	13,7%
<i>Takut</i>	17,1%	14,2%	21,2%	17,5%	12,2%	13,2%	21,4%	17,2%	23,8%	23,2%	10,1%	19,2%
<i>Bosan</i>	23,7%	22,0%	35,5%	45,0%	35,1%	23,7%	14,3%	20,4%	23,8%	24,0%	27,8%	29,4%
Emosi positif	70,0%	70,7%	73,7%	68,3%	76,4%	71,1%	77,4%	71,3%	65,1%	64,6%	75,6%	74,3%
<i>Kasih sayang</i>	75,0%	80,0%	83,6%	82,5%	87,8%	81,6%	78,6%	83,9%	85,7%	70,9%	86,1%	81,7%
<i>Rasa syukur</i>	67,6%	83,1%	85,6%	80,0%	81,1%	73,7%	85,7%	80,6%	71,4%	83,6%	72,8%	79,9%
<i>Ketenangan</i>	71,0%	82,8%	76,1%	82,5%	77,0%	68,4%	71,4%	79,6%	81,0%	79,4%	74,0%	76,4%
<i>Gembira</i>	58,5%	50,8%	54,7%	47,5%	66,2%	65,8%	57,1%	52,7%	38,1%	39,4%	64,7%	59,9%
<i>Semangat</i>	70,2%	62,0%	81,1%	65,0%	74,3%	72,4%	85,7%	62,4%	66,7%	65,2%	74,9%	73,3%
<i>Penuh harapan</i>	77,9%	65,2%	61,2%	52,5%	71,6%	64,5%	85,7%	68,8%	47,6%	49,0%	80,9%	74,4%
Ketahanan Keluarga	83,5%	83,8%	61,1%	78,0%	77,6%	75,4%	81,4%	75,4%	69,1%	69,1%	82,0%	77,4%
Keyakinan bersama keluarga	88,6%	89,0%	66,1%	81,7%	82,9%	81,6%	85,7%	84,2%	71,4%	71,3%	89,4%	83,0%
<i>Membuat makna</i>	90,3%	92,7%	66,0%	85,0%	85,1%	84,2%	85,7%	91,4%	66,7%	71,8%	92,1%	85,1%
<i>Harapan positif</i>	90,2%	89,3%	67,7%	80,0%	81,1%	81,6%	92,9%	82,8%	76,2%	71,8%	91,6%	83,7%
<i>Spiritualitas</i>	85,2%	85,0%	64,7%	80,0%	82,4%	78,9%	78,6%	78,5%	71,4%	70,1%	84,5%	80,2%
Pengelolaan Keluarga	85,7%	86,4%	63,4%	80,0%	81,5%	79,4%	81,0%	76,0%	73,0%	70,7%	85,2%	79,5%
<i>Fleksibilitas</i>	90,6%	92,4%	64,7%	85,0%	83,8%	84,2%	78,6%	82,8%	81,0%	71,8%	91,8%	84,0%
<i>Keterhubungan</i>	82,6%	84,5%	61,2%	75,0%	81,1%	75,0%	85,7%	73,1%	66,7%	71,8%	79,8%	76,7%
<i>Dukungan sosial</i>	83,8%	82,2%	64,2%	80,0%	79,7%	78,9%	78,6%	72,0%	71,4%	68,3%	84,1%	77,9%
Komunikasi Keluarga	77,5%	77,4%	55,1%	73,3%	69,8%	66,7%	78,6%	68,1%	63,5%	65,9%	73,1%	71,1%
<i>Kejelasan komunikasi</i>	78,8%	79,9%	58,1%	77,5%	66,2%	57,9%	85,7%	69,9%	76,2%	69,2%	76,7%	70,9%
<i>Emosi terbuka</i>	72,0%	74,6%	52,1%	67,5%	67,6%	65,8%	71,4%	63,4%	61,9%	63,3%	66,9%	68,6%
<i>Penyelesaian masalah</i>	81,7%	77,7%	55,1%	75,0%	75,7%	76,3%	78,6%	71,0%	52,4%	65,0%	75,7%	73,8%

Keterangan :

Jenis keluarga : NF=Nuclear Family, JF=Joint Family, EF=Extended Family

Pekerjaan orangtua : 1=ASN, 2=Pegawai BUMN, 3=Kary.Swasta, 4=TNI/Polisi, 5=Wiraswasta, 6=Peg.Honorir

Area tinggal : RUF=Rural Urban Fringe, SUF=Suburban Fringe, SUB=Suburban

Berdasarkan dimensi ketahanan keluarga, meski umumnya memiliki perbedaan yang tidak signifikan, namun keyakinan keluarga lebih dimiliki oleh tipe *joint family*, keluarga dengan pekerjaan orang tua TNI/Polisi, dan keluarga yang tinggal di *suburban fringe*. Pola pengelolaan keluarga lebih dimiliki pada keluarga tipe *joint family*, keluarga dengan pekerjaan orang tua pegawai BUMN, dan keluarga yang tinggal di kawasan *suburban fringe*. Sementara itu, komunikasi keluarga lebih dimiliki pada tipe *nuclear family*, *joint family*, keluarga dengan profesi TNI/Polisi, dan keluarga *suburban fringe*. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa ketahanan keluarga yang lebih kuat dimiliki oleh *joint family* dan *nuclear family*. Sementara berdasarkan pekerjaan orang tua, walaupun dengan perbedaan yang

tidak signifikan, profesi orang tua TNI/Polisi lebih memiliki ketahanan keluarga yang kuat dibandingkan pekerjaan lainnya, sedangkan pegawai Aparatur Sipil Negara, karyawan BUMN, wiraswasta, dan karyawan swasta memiliki ketahanan keluarga yang lebih kuat daripada pegawai honorir. Berdasarkan area permukiman keluarga, kawasan *suburban fringe* memiliki ketahanan keluarga yang lebih kuat dibandingkan *suburban* dan *rural urban fringe*.

Nuclear family dipandang lebih memiliki orientasi komunal daripada tipe keluarga lainnya, sehingga lebih menunjukkan kenyamanan dan keterlibatan dalam aktivitas di rumah di masa isolasi COVID-19. Meski lebih merasakan kecemasan, jenis keluarga ini juga menyikapi suasana kegembiraan dan penuh harapan

bersama anggota keluarganya, yang mungkin terkait dengan harapan positif, dukungan sosial, dan penyelesaian masalah bersama dalam meningkatkan ketahanan keluarganya. *Extended family* merupakan jenis keluarga dengan ukuran anggota yang besar di keluarga, dengan jumlah intensitas dan frekuensi interaksi yang lebih tinggi dari jenis keluarga lainnya, yang mungkin akan turut pula mempengaruhi warna emosi (baik positif maupun negatif) yang ditemukan dalam studi ini. Keluarga ini juga lebih bersifat mendorong partisipasi anggota di keluarga (Jansen, 2017), yang mungkin dijelaskan oleh munculnya kasih sayang, rasa syukur, dan semangat bersama keluarga dalam studi ini. Meskipun demikian, keluarga ini tidak menunjukkan ketahanan keluarga yang lebih kuat dari jenis keluarga lainnya.

Joint family adalah karakteristik keluarga yang memodifikasi kedua tipe yang dapat mendorong dukungan emosi dan perlindungan dari anggota keluarga inti maupun bukan keluarga inti. Corak pengambilan keputusan pada keluarga ini dapat secara otonom, namun tetap mempertimbangkan kekerabatan dengan anggota lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan fleksibilitas dan dukungan sosial dalam pola pengelolaan keluarga serta menumbuhkan komunikasi keluarga yang lebih terolah, sehingga ketahanan keluarga mereka lebih kuat dari jenis keluarga lainnya selama masa isolasi.

Temuan ini menjelaskan bahwa ada perbedaan reaksi emosi dan ketahanan keluarga berdasarkan tipe keluarga. Latar belakang pekerjaan orang tua sebagai bagian dari sosial ekonomi keluarga turut pula memengaruhi perbedaan reaksi emosi dan ketahanan keluarga. Karakteristik patuh terhadap aturan dan nilai-nilai kedisiplinan di keluarga pada orangtua yang berprofesi sebagai TNI/Polisi mungkin terkait dengan sikap positif di keluarga, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan dan komunikasi mereka dalam menguatkan ketahanan keluarganya. Temuan ini mirip dengan studi tentang fungsi keluarga militer yang lebih tangguh dalam mengatasi stres keluarga, kesehatan fisik, dan kesehatan psikologis setiap anggota keluarga (Meadows dkk., 2016). Hal yang berbeda ditemukan pada keluarga pegawai honorer yang diduga berhubungan dengan masalah kepastian kesejahteraan (Juliani, 2019), sehingga keluarga ini lebih rentan mengalami emosi negatif, dan menjadi tantangan dalam

meningkatkan keyakinan keluarga, pengelolaan, dan interaksi di antara anggota keluarga mereka.

Interaksi keluarga merupakan salah satu coping keluarga dalam mempertahankan hubungan anggota (Afifi, Merrill, & Davis, 2016). Dalam pertukaran antargenerasi di keluarga, pemikiran yang tidak diharapkan mungkin dapat terjadi selama masa isolasi COVID-19, sehingga terjadi turbulensi tekanan emosional yang berdampak pada suasana hati anggota keluarga ketika merespons situasi. Munculnya kecemasan keluarga dalam studi ini mungkin menjelaskan penelitian sebelumnya tentang risiko kecemasan yang lebih tinggi pada keluarga yang tidak suka tinggal di rumah selama masa isolasi (Oosterhoff dkk., 2020). Sementara ketahanan keluarga yang lebih kuat dimiliki oleh keluarga *suburban fringe*.

Sebagai keluarga yang tinggal di jalur tepi subdaerah perkotaan, anggota keluarga ini dinilai memiliki mobilitas yang tinggi dan cenderung lebih jauh dari pusat keramaian yang memungkinkan terjadi efek keluarga menjadi lebih kohesif. Hal lain mengindikasikan bahwa sistem keyakinan keluarga mungkin relatif lebih solid, pola keluarga yang terkelola, dan komunikasi keluarga yang lebih solutif dibandingkan dengan keluarga *suburban* dan *rural-urban fringe* yang lebih rentan terhadap situasi lingkungan dan keramaian karena dekat dengan pusat kota. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan area tinggal keluarga memengaruhi perbedaan reaksi emosi dan ketahanan keluarga.

KESIMPULAN

Studi ini mengarah pada dua temuan. Pertama, reaksi emosi negatif lebih dirasakan oleh tipe *extended family*, orang tua yang bekerja sebagai pegawai honorer, dan keluarga yang tinggal di kawasan *suburban fringe*, sedangkan emosi positif lebih dirasakan oleh tipe *extended family*, orang tua dengan pekerjaan TNI/Polisi, dan keluarga yang tinggal di kawasan *suburban fringe*. Kedua, keluarga yang memiliki ketahanan yang lebih kuat dimiliki oleh tipe *joint family*, *nuclear family*, orang tua dengan pekerjaan TNI/Polisi, dan keluarga yang tinggal di kawasan *suburban fringe*, sedangkan tantangan dalam ketahanan keluarga dimiliki oleh tipe *extended family*, orang tua

dengan pekerjaan honorer, dan keluarga yang tinggal di kawasan *rural urban fringe*.

Kesimpulan akhir dari tulisan ini adalah reaksi emosi keluarga (positif dan negatif) yang muncul terkait dengan ketahanan keluarga mereka selama masa isolasi COVID-19, dan perbedaan tipe keluarga, tingkat sosial ekonomi keluarga (pekerjaan orang tua) dan jenis area pemukiman keluarga menunjukkan perbedaan yang bermakna dalam ketahanan keluarga selama masa isolasi COVID-19.

Keterbatasan dalam studi ini adalah jumlah sampel keluarga yang masih kecil, dan sebaran demografi

keluarga yang kurang representatif sehingga dapat memengaruhi hasil pada temuan studi. Hal ini dapat menjadi saran untuk penelitian di masa depan. Meskipun demikian, temuan ini penting sebagai gambaran dalam meningkatkan fungsi perlindungan dan sosialisasi keluarga, melalui penerapan kepatuhan dan kedisiplinan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental dalam menguatkan ketahanan keluarga, mempersiapkan identitas keluarga yang baru, dan memelihara hubungan keluarga yang terkelola dengan tetap menjaga keterbukaan komunikasi dan privasi antaranggota keluarga, sebagai persiapan dalam menghadapi adaptasi dengan kebiasaan baru di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affleck, G., & Tennen, H. (1996). Construing Benefits from Adversity: Adaptational Significance and Dispositional Underpinnings. *Journal of Personality*, 64(4), 899–922. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1996.tb00948.x>
- Affifi, T. D., Merrill, A. F., & Davis, S. (2016). The theory of resilience and relational load. *Personal Relationships*, 23(4), 663–683. <https://doi.org/10.1111/pere.12159>
- Bishop, M., Greeff, A. P. (2015). Resilience in Families in Which a Member Has Been Diagnosed With Schizophrenia. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 2015, 22, 463–471
- Buzzanell, P. M. (2018). Communication Theory of Resilience. In *Engaging Theories in Family Communication* (pp. 98–109). <https://doi.org/10.4324/9781315204321-9>
- Caleo, G., Duncombe, J., Jephcott, F., Lokuge, K., Mills, C., Looijen, E., Theoharaki, F., Kremer, R., Kleijer, K., Squire, J., Lamin, M., Stringer, B., Weiss, H.A., Culli, D., Di Tanna, G.L., & Greig, J. (2018). The factors affecting household transmission dynamics and community compliance with Ebola control measures: A mixed-methods study in a rural village in Sierra Leone. *BMC Public Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5158-6>
- Carr, K. (2015). Communication and Family Resilience. In *The International Encyclopedia of Interpersonal Communication*, 1–9. <https://doi.org/10.1002/9781118540190.wbeic198>
- Control for Disease Control and Prevention [CDC]. (2017). Quarantine and Isolation. *Cdc*. <https://www.cdc.gov/quarantine/index.html>
- Dani, J. A., & Mediantara, Y. (2020). Covid-19 Dan Perubahan Komunikasi Sosial. *Persepsi*, 3(1), 94–102. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v3i1.4510>
- Deist, M. D. & Greeff, A. P. (2016). Resilience in Families Caring for a Family Member Diagnosed with Dementia. *Educational Gerontology*, 41: 93–105
- Desclaux, A., Badji, D., Ndione, A. G., & Sow, K. (2017). Accepted monitoring or endured quarantine? Ebola contacts' perceptions in Senegal. *Social Science and Medicine*, 178, 38–45. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.02.009>
- DiGiovanni, C., Conley, J., Chiu, D., & Zaborski, J. (2004). Factors influencing compliance with quarantine in Toronto during the 2003 SARS outbreak. *Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science*, 2(4), 265–272. <https://doi.org/10.1089/bsp.2004.2.265>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M.S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L.A., Suriarti, G.A.K., & Warsilah, H.

- (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science* 6, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Dong, L., & Bouey, J. (2020). Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China. *Emerging Infectious Diseases*, 26(7). <https://doi.org/10.3201/eid2607.200407>
- Ekman, P. (2005). Basic Emotions. In *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 45–60). <https://doi.org/10.1002/0470013494.ch3>
- Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. *American Psychologist*, 55(6), 647–654. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.6.647>
- Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. *American Scientist*, 91(4), 330–335. <https://doi.org/10.1511/2003.4.330>
- Hackbarth M, Pavkov T, Wetchler J, Flannery M. (2012). Natural disasters: an assessment of family resiliency following Hurricane Katrina. *J Marital Fam Ther.* 38(2), 340-351. <http://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2011.00227.x>
- Hawryluck, L., Gold, W. L., Robinson, S., Pogorski, S., Galea, S., & Styra, R. (2004). SARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, Canada. *Emerging Infectious Diseases*, 10(7), 1206–1212. <https://doi.org/10.3201/eid1007.030703>
- Ho, C. S., Chee, C. Y., & Ho, R. C. (2020). Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic. *Annals of the Academy of Medicine, Singapore*, 49(1), 1–3.
- Jansen, K. (2017). Extended Family Relationships: How They Impact the Mental Health of Young Adults. <https://doi.org/10.13023/ETD.2017.102>
- Juliani, H. (2019). Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 314-325.
- Liu, J. J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., & Lu, L. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. *The Lancet Child and Adolescent Health*, Vol. 4, pp. 347–349. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30096-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30096-1)
- Manuell, M. E., & Cukor, J. (2011). Mother Nature versus human nature: Public compliance with evacuation and quarantine. *Disasters*, 35(2), 417–442. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2010.01219.x>
- Marjanovic, Z., Greenglass, E. R., & Coffey, S. (2007). The relevance of psychosocial variables and working conditions in predicting nurses' coping strategies during the SARS crisis: An online questionnaire survey. *International Journal of Nursing Studies*, 44(6), 991–998. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.02.012>
- Meadows, S. O., Beckett, M. K., Bowling, K., Golinelli, D., Fisher, M. P., Martin, L. T., Meredith, L. S., & Osilla, K. C. (2016). Family Resilience in the Military: Definitions, Models, and Policies. *Rand health quarterly*, 5(3), 12.
- Nam, B., Kim, J. Y., DeVylder, J. E., & Song, A. (2016). Family functioning, resilience, and depression among North Korean refugees. *Psychiatry Research*, 245, 451–457.
- Oosterhoff, B., Palmer, C. A., Wilson, J., & Shook, N. (2020). Adolescents' Motivations to Engage in Social Distancing during the COVID-19 Pandemic: Associations with Mental and Social Health. *Journal of Adolescent Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.05.004>
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi bagi usaha mikro, kecil dan Menengah. *JlHI: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Patterson, J. M. (2002). Understanding family resilience. *Journal of Clinical Psychology*, Vol. 58, pp. 233–246. <https://doi.org/10.1002/jclp.10019>
- Puspitawati, H., Herawati, T., & Sarma, M. (2018). Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.14203/JKI.V13I1.283>
- Setiati, S., & Azwar, M. K. (2020). COVID-19 and Indonesia. *Acta Medica Indonesiana*, 52(1), 84–89.
- Sharma, R. (2013). The family and family structure classification redefined for the current times.

- Journal of Family Medicine and Primary Care*, 2(4), 306. <https://doi.org/10.4103/2249-4863.123774>
- Sharp, J. S., & Clark, J. K. (2008). Between the country and the concrete: Rediscovering the rural-urban fringe. *City and Community*, 7(1), 61–79. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6040.2007.00241.x>
- Tanoue, Y., Nomura, S., Yoneoka, D., Kawashima, T., Eguchi, A., Shi, S., Harado, N., & Miyata, H. (2020). Mental health of family, friends, and co-workers of COVID-19 patients in Japan. *Psychiatry Research*, 113067. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113067>
- Tsai, J., & Wilson, M. (2020). COVID-19: a potential public health problem for homeless populations. *The Lancet Public Health*, Vol. 5, pp. e186–e187. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30053-0](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30053-0)
- Walsh, F. (1996). The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge. *Family Process*, 35(3), 261–281. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1996.00261.x>
- Walsh, F. (2016). Family resilience: a developmental systems framework. *European Journal of Developmental Psychology*. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>
- Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph17051729>
- Wang, Y., Xu, B., Zhao, G., Cao, R., He, X., & Fu, S. (2011). Is quarantine related to immediate negative psychological consequences during the 2009 H1N1 epidemic? *General Hospital Psychiatry*, 33(1), 75–77. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2010.11.001>
- Yang, Y., Li, W., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., & Xiang, Y. T. (2020). Mental health services for older adults in China during the COVID-19 outbreak. *The Lancet Psychiatry*, Vol. 7, p. e19. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30079-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30079-1)
- Yoon, M. K., Kim, S. Y., Ko, H. S., & Lee, M. S. (2016). System effectiveness of detection, brief intervention and refer to treatment for the people with post-traumatic emotional distress by MERS: A case report of community-based proactive intervention in South Korea. *International Journal of Mental Health Systems*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s13033-016-0083-5>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT: MENGELOLA KECEMASAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

(*SOCIETY MENTAL HEALTH: MANAGING ANXIETY DURING PANDEMIC COVID-19*)

Deshinta Vibriyanti

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

*Korespondensi penulis: akuchie2@gmail.com

Abstract

The spread of the COVID-19 pandemic around the world not only has physical health impacts but also mental health. One of the effects of a pandemic on mental health that is feelings of anxiety about being exposed to viruses and the uncertainty of conditions during a pandemic. Anxiety needs to be managed properly so that it can still make alertness, but not excessive so that it causes worse mental health disorders. This paper aims to explain how to manage anxiety during a pandemic for the society with a literature study approach. From the perspective of social psychology, this paper concludes that managing anxiety at a proportional level, is the result of repeated perception of situations. The selection of information received during a pandemic is the key to managing anxiety. Next, adapt to the changes that occur so that can through a mentally healthy life in a pandemic.

Keywords: *society mental health, anxiety, managing anxiety, COVID-19, adaptation*

Coronavirus disease 2019 atau disebut juga COVID-19 saat ini menjadi pandemi hampir di seluruh negara di dunia. Wabah pandemi ini memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis individu dan masyarakat (Banerjee, 2020; Brooke dkk., 2020; Zhang dkk., 2020). Menurut Brooks dkk. (2020), dampak psikologis selama pandemi diantaranya gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*), kebingungan, kegelisahan, frustrasi, ketakutan akan infeksi, insomnia dan merasa tidak berdaya. Bahkan beberapa psikiatris dan psikolog mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan hingga berat dapat terjadi dalam kondisi pandemik ini. Bahkan kasus *xenofobia*¹ dan kasus bunuh diri karena ketakutan terinfeksi virus sudah mulai bermunculan.

Para ahli telah bersepakat bahwa kesehatan fisik dan mental saling terkait yang harus dikelola secara seimbang. Keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental di masa pandemi juga telah menjadi perhatian oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan buku pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial (DKJPS) pada pandemi COVID-19.

Merujuk pada kebijakan Badan Kesehatan Dunia (WHO), buku ini merupakan salah satu panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi Orang Sehat, Orang Dengan Pantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Pasien Dengan Pengawasan (PDP), Pasien COVID-19, dan kelompok rentan (Kementerian Kesehatan RI,

¹ Ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap asing, Dalam konteks

pandemi yaitu ketakutan pada warga negara asal pandemi atau dimana negara kasus pandemi yang tinggi.

2019). Jika mengacu pada struktur usia penduduk maka kelompok rentan yang terdampak pada kesehatan jiwa dan psikososial akibat infeksi COVID-19 diantaranya adalah perempuan, anak dan remaja, dan lanjut usia (lansia).

Mengutip salah satu hasil kaji cepat Survei Ketahanan Keluarga di masa pandemi yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), dari sebanyak 66 persen responden perempuan yang sudah menikah menunjukkan bahwa gangguan psikologis yang paling banyak dialami adalah mudah cemas dan gelisah (50,6 persen), mudah sedih (46,9 persen), dan sulit berkonsentrasi (35,5 persen) (Sunarti, 2020). Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat perempuan memegang peran yang sangat penting dalam mengelola rumah tangga. Anak-anak dan remaja pun tidak luput dari dampak kebijakan pembatasan penyebaran virus melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Ruang gerak yang terbatas dan minimnya interaksi dengan teman sebaya selama masa pandemi dapat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa mereka.

Begitu juga dengan kelompok lansia. Kerentanan lansia disebabkan oleh proses degeneratif yang menyebabkan menurunnya imunitas tubuh sehingga lansia rentan terinfeksi penyakit, termasuk virus *corona*. Di tengah kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian, lansia mudah dihindangi perasaan cemas berlebihan yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik. Situasi yang demikian kompleks dan penuh tekanan secara psikologi dari setiap kelompok usia membutuhkan perhatian dan penanganan yang cepat sehingga tidak menjadi gangguan jiwa yang lebih serius. Kelompok rentan yang disebutkan di atas adalah potret umum kondisi masyarakat saat ini.

Tulisan ini secara singkat akan mengulas tentang kesehatan mental masyarakat khususnya tentang mengelola kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka/literatur, tulisan ini menggunakan perspektif psikologi sosial dalam menjelaskan proses terjadinya kecemasan, gejala-gejala yang timbul dan cara mengelola kecemasan tersebut.

Proses Terjadinya Kecemasan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Pada dasarnya semua gangguan kesehatan mental diawali oleh perasaan cemas (*anxiety*). Menurut Sadock dkk. (2010) kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai suatu stimulus yang berbahaya (*stressor*). Pada tingkatan tertentu kecemasan dapat menjadikan seseorang lebih waspada (*aware*) terhadap suatu ancaman, karena jika ancaman tersebut dinilai tidak membahayakan, maka seseorang tidak akan melakukan pertahanan diri (*self defence*). Sehubungan dengan menghadapi pandemi Covid-19 ini, kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan *awareness* namun tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan kejiwaan yang lebih buruk.

Dalam prosesnya (Gambar 1), seseorang melakukan *evaluative situation* yaitu menilai ancaman virus Covid-19 berdasarkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman masa lalu yang dimiliki. Jika *stressor* dinilai berbahaya maka reaksi kecemasan akan timbul. Reaksi kecemasan ini ada yang bersifat sesaat (*state anxiety*) dan ada yang bersifat permanen (*trait anxiety*) (Lazarus, 1991).

Reaksi kecemasan akan berbeda pada setiap individu. Untuk sebagian orang reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh reaksi fisiologis. Namun pada orang-orang tertentu, kompleksitas respons dalam kecemasan dapat melibatkan reaksi fisiologis sesaat seperti detak jantung menjadi lebih cepat, berkeringat, sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal dan gejala lainnya. Setelah seseorang mulai merasakan kecemasan maka sistem pertahanan diri selanjutnya akan menilai kembali ancaman diiringi dengan usaha untuk mengatasi, mengurangi atau menghilangkan perasaan terancam tersebut. Seseorang dapat menggunakan pertahanan diri (*defence mechanism*) dengan meningkatkan aktifitas kognisi atau motorik.

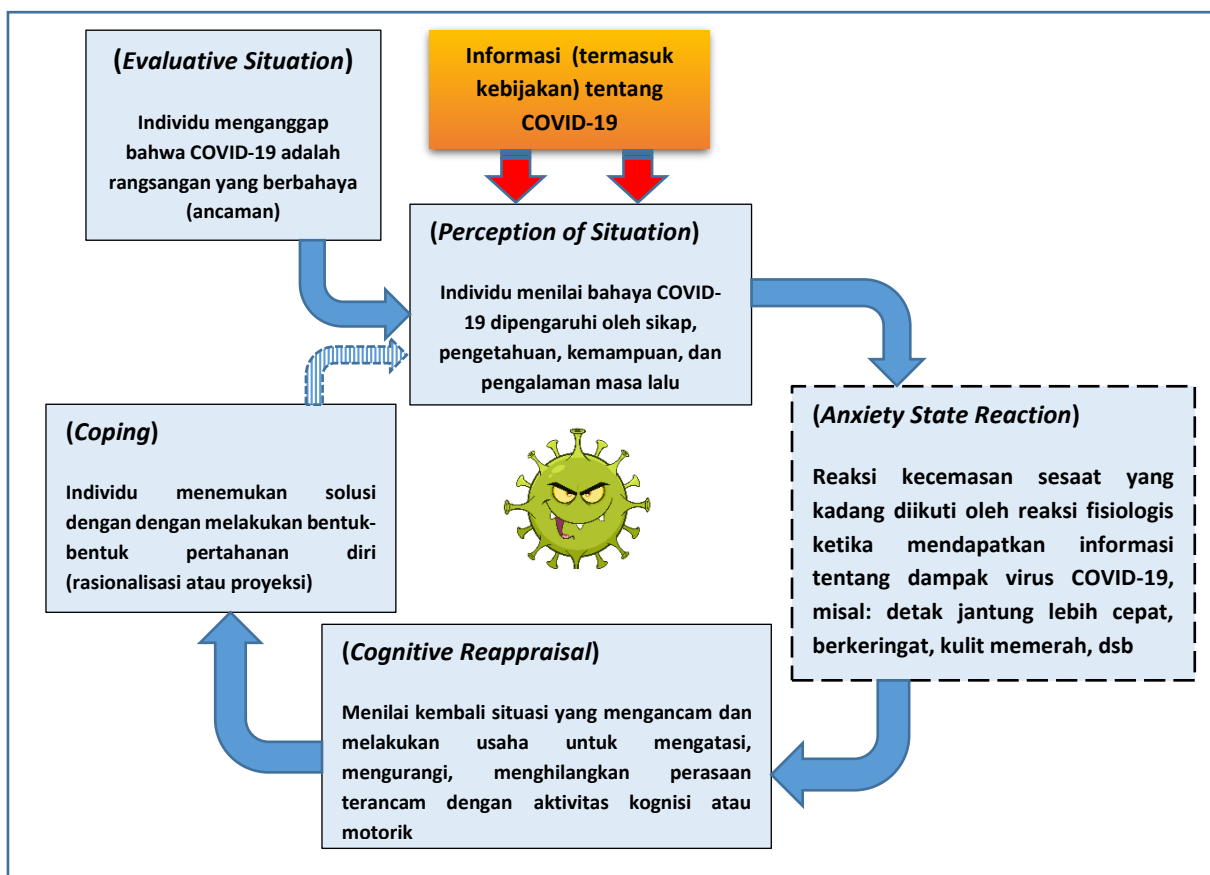
Kecemasan biasanya berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali (*uncontrolled*), sehingga individu akan berfokus pada tindakan yang terkendali (Shin & Newman, 2019). Dalam konteks pandemi ini contoh tindakan yang terkendali yang dilakukan antara lain berolahraga, meditasi, melukis, bermain musik, berkebun, memasak, membaca buku, menonton film, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas tersebut sesuai dengan ketertarikan dan kemampuan individu sebagai

strategi yang tangguh dan protektif untuk mengatasi stres, kecemasan, dan panik (Wood & Runger, 2016).

Tahapan terakhir dalam menghadapi kecemasan yaitu menemukan solusi (*coping*) dengan bentuk pertahanan diri seperti rasionalisasi. Rasionalisasi tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal dijadikan masuk akal, akan tetapi merasionalkan. Rasionalisasi tidak dimaksudkan untuk ‘membujuk’ atau memanipulasi orang lain, melainkan ‘membujuk’ dirinya sendiri agar dapat menerima keterbatasan diri sendiri. Sebagai contoh, seorang pegawai yang pada

masa pandemi ini melakukan kerja dari rumah (*work from home*) akan melakukan rasionalisasi bahwa memiliki kinerja yang kurang optimal. Bekerja di rumah di masa pandemi bukan sekedar pindah ruang kerja. Rasionalisasi ini bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, sebagai upaya menjaga kesehatan mental diri sehingga tidak menimbulkan frustrasi, rasa bersalah, dan perasaan tidak berdaya.

Gambar 1. Proses Seorang Individu Mengatasi Kecemasan terhadap Ancaman Virus COVID-19



Sumber: Modifikasi dari Konsep Kecemasan Spielberger dkk. (1983)

Pada dasarnya mengelola kecemasan agar tetap pada tingkatan yang proporsional, merupakan hasil dari proses penilaian (*perception of situation*) yang terjadi berulang kali. Proses penilaian dapat berubah seiring seseorang terpapar oleh informasi. Perubahan penilaian ini kemudian berdampak pada bentuk *coping*. Pada awal-awal masa pandemi COVID-19, tindakan membeli kebutuhan secara berlebihan (beli panik/*panic buying*) merupakan salah satu contoh penilaian individu terhadap ancaman kelangkaan bahan kebutuhan pokok.

Mungkin saja keputusan untuk beli panik ini dilakukan karena input informasi dari media digabung dengan pengalaman masa lalu ketika ketersediaan bahan-bahan pokok menipis pada masa krisis moneter. Namun beli panik kemudian tidak berlangsung lama karena dianggap tidak efektif lagi.

Mengelola Kecemasan

Pemberitaan yang mendadak dan hampir terus menerus mengenai pandemi akan membuat siapa pun menjadi cemas. Menilai tingkat bahaya akan COVID-19 melalui penyeleksian informasi yang diterima dan kebijakan menjadi kunci mengelola kecemasan. Informasi dan kebijakan dapat mempengaruhi penilaian seseorang terhadap ancaman (COVID-19) dan kemudian mempengaruhi respons kecemasan yang ditimbulkan.

Beberapa tips dalam menjaga kesehatan mental adalah mengurangi menonton, membaca atau mendengarkan berita yang membuat kecemasan meningkat. Carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya dan utamakan membuat rencana praktis melindungi diri dan orang-orang terdekat. Usahakan mencari berita hanya 1-2 kali dalam satu hari dan pada waktu yang spesifik. Banyaknya terpapar *misinfodemik* mengakibatkan kesalahan dalam strategi *coping* yang diambil. *Misinfodemik* adalah istilah yang digunakan untuk misinformasi yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan cukup lazim untuk COVID-19. Mencari informasi terkait menjaga kesehatan mental di masa pandemi di berbagai sumber online juga suatu langkah yang positif (Banerjee, 2020). Pilihlah situs jaringan kesehatan mental yang valid dan terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, WHO, biro konsultasi psikologi, atau sumber-sumber yang bersifat keagamaan/religius.

Beradaptasi dengan Kondisi Pandemi

Saat ini, belum ada perkiraan akurat tentang berapa lama situasi COVID-19 akan bertahan, jumlah orang di seluruh dunia yang akan terinfeksi, atau berapa lama hidup orang akan terganggu (Suicide Awareness Voices of Education, 2020; Zandifar & Badrfam, 2020). Karena kehidupan harus tetap berjalan, maka langkah awal yang dilakukan adalah penerimaan (*acceptance*). Penerimaan berarti memberi ruang kesadaran yang penuh kepada diri bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah kenyataan. Jika kita sudah menerima bahwa kondisi sekarang bukanlah kondisi normal, maka kita siap untuk beradaptasi.

Adaptasi merupakan kemampuan individu agar dapat melakukan penyesuaian diri pada suatu tempat atau lingkungan yang dipandang sebagai suatu hal yang baru. Adaptasi dapat juga diartikan sebagai proses penyesuaian diri dalam mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi dapat juga mengubah

lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri (Gerungan, 1996). Kemampuan setiap orang untuk beradaptasi pun berbeda-beda.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan dan cara seseorang beradaptasi seperti, kepribadian, usia, pengalaman, proses belajar, kondisi fisik, dan lingkungan (Ali & Asrori, 2011). Oleh karena perbedaan kemampuan beradaptasi pada setiap individu tersebut maka proses adaptasi akan berujung kesuksesan beradaptasi atau kegagalan beradaptasi. Kesuksesan beradaptasi akan melahirkan daya lenting atau resiliensi pada diri seseorang. Sedangkan kegagalan beradaptasi akan berdampak pada penurunan kondisi kesehatan mental.

KESIMPULAN

Kecemasan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ketika berada pada kondisi penuh tekanan seperti di masa pandemi COVID-19. Salah kunci penting mengelola kecemasan adalah pada penyeleksian informasi yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Informasi tersebut hendaklah bersal dari sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas di bidangnya. Jika mulai merasa memiliki gejala gangguan mental ringan, langkah awal adalah minta pertolongan pada lingkungan terdekat yang dipercaya, bisa pasangan, orangtua, kakak, atau sahabat. Jika hal tersebut kurang berhasil maka meminta bantuan pihak yang kompeten seperti ahli kejiwaan juga merupakan jalan keluar yang baik. Beberapa praktisi kesehatan mental seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan klinik-klinik kesehatan mental lainnya menawarkan dukungan daring (*online*) atau kunjungan ke rumah melalui konseling dan psikoterapi .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Asrori, M. (2011). *Psikologi remaja - Perkembangan Peserta Didik*. Cetakan ketujuh. PT. Bumi Aksara
- Banerjee D. (2020). The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists can play. *Asian J. Psychiatr.* <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102014>.
- Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G.J.

- (2020). The Psychological Impact Of Quarantine And How To Reduce It: Rapid Review Of The Evidence. *Lancet*, 395 (10227), 912–920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Gerungan, W.A. (1996). *Psikologi Sosial*. Eresco
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-2019)*. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/Pedoman-dukungan-keswa-psikososial-covid-19.pdf>
- Lazarus, R. S. (1991). *Emotion and adaptation*. Oxford University Press.
- Sadock, J.B., & Sadock, A.V. (2010). *Kaplan & Sadock Buku Ajar Psikiatri Klinis*. Edisi ke-2. EGC
- Shin, K.E. & Newman, M.G.(2019). Self- And Other-Perceptions Of Interpersonal Problems: Effects Of Generalized Anxiety, Social Anxiety, And Depression. *Anxiety Disord.*, 65, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.04.005>
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Consulting Psychologists Press.
- Sunarti, E. (2020, 19 Juni). *Paparan Hasil Survey Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19*. Webinar The 14th IPB Strategic Talks COVID-19 Series: Mencegah Krisis Keluarga Indonesia di Masa Pandemi COVID-19
- Wood W. & Rüniger D. (2016). Psychology of habit. *Annu.*, 67, 289–314. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033417>
- Zandifar, A & Badrfam, R. (2020). Iranian Mental Health During The COVID-19 Epidemic. *Asian J Psychiatr.* 51 (101990) <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.101990>
- Zhang, J., Wu, W., Zhao, X., & Zhang, W. (2020). Recommended Psychological Crisis Intervention Response to The 2019 Novel Coronavirus Pneumonia Outbreak In China: A Model Of West China Hospital. *Precision Clinical Medicine*, 3 (1), 3–8, <https://doi.org/10.1093/pcmedi/pbaa006>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

DINAMIKA PERUBAHAN RELASI KIAI SANTRI PADA 'NGAJI ONLINE' DI MASA PAGEBLUK COVID-19

THE DYNAMICS OF CHANGE IN RELATION KIAI SANTRI ON 'NGAJI ONLINE' IN THE COVID-19 PANDEMIC

Samsul Arifin

Pusat Pengembangan Psikologi dan Konseling Berbasis Pesantren;
Fakultas Dakwah, Universitas Ibrahimy Situbondo

Korespondensi penulis: goessyam@gmail.com

Abstract

This paper reveals the dynamics of the changing therapeutic relationship of the kiai with students (santri) in learning (ngaji) from face-to-face to online models in the time of COVID-19. The research method is ethnographic-hermeneutic. In the face-to-face learning system, therapeutics occur because of the warm relationship by looking directly at the kiai's face which makes the students feel calm. In the "Ngaji Online" the therapeutic system switches to environmental settings that make students feel safe and comfortable. In the "Ngaji Online" system, the warmth of relationships begins to weaken. However, this weakness can be covered up because the spiritual relationship between the kiai and the students still feels strong. This spiritual relationship is the key to therapeutic for the Islamic boarding school.

Keywords: *dynamics, therapeutic, ngaji online, COVID-19*

Pada ramadan zaman pagebluk COVID-19, terdapat perubahan dinamika model pengajian yang dilakukan komunitas pondok pesantren. Dinamika dari model tatap muka di kompleks pesantren menjadi *Ngaji Online* di rumah santri masing-masing. Perubahan tersebut juga mengubah konstruksi barokah (*barokah*) dalam relasi terapeutik antara kiai dengan para santri. Tulisan ini berupaya mengungkap relasi hubungan terapeutik antara kiai dengan para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo di tengah-tengah masa pagebluk COVID-19 pada kegiatan *Ngaji Online* Ramadan.

Dengan model *Ngaji Online*, para santri mengalami perubahan perilaku dalam memahami makna *barokah*. *Barokah* yang semula dimaknai sebagai bertambahnya karunia kebaikan dan kebahagiaan yang memancar dari perasaan teduh di sisi kiai, beralih kepada

perasaan aman dan nyaman yang berasal dari setting lingkungan dunia maya. Memperoleh barokah kiai merupakan salah satu perilaku penting para santri. Barokah dapat diperoleh dengan berkhidmah kepada kiai dan mengikuti pengajian yang diajar kiai. Bagi para santri, barokah ini menjadi kunci dalam hubungan terapeutik dan kesehatan mental para santri (Arifin, 2020; Arifin & Munfaridah, 2018; Arifin & Zaini, 2019).

Terdapat beberapa perbedaan para pakar konseling tentang terjadinya terapeutik. Bagi kalangan humanis, perubahan terapeutik terjadi ketika terdapat keterbukaan diri dalam konteks hubungan yang saling mempercayai antara kiai dan santri, dengan penekanan pada kualitas hubungan yang merupakan *core condition* (Corey, 2009; Gillon, 2007; Rogers, 1942). Bagi kalangan *behavioral*, kualitas hubungan antara

kai dan santri memang suatu keharusan. Namun fokus utamanya, bukan kepada kualitas relasi tapi kepada proses intervensi (Corey, 2009; McLeod, 2003).

Bagaimana dengan relasi terapeutik kiai-santri? Komunitas pesantren dalam mendidik para santri menekankan harmoni kualitas hubungan antara kiai dengan santri atau sebaliknya. Para santri percaya, dengan menjaga kualitas hubungan, kehidupan mereka akan barokah. Karena itu, para santri akan tetap menjaga hubungan dengan kiai sampai kapanpun (Arifin, 2014a, 2020). Kiai juga memperhatikan kualitas kepribadiannya dalam membangun hubungan dengan para santri. Dalam pandangan pesantren, harus ada keseimbangan antara kualitas keilmuan dan integritas kepribadian (Arifin, 2018, 2019, 2020; Arifin & Zaini, 2018).

Relasi terapeutik kiai-santri pada kegiatan pengajian mengalami dinamika. Sebelum masa pagebluk COVID-19, komunitas pesantren mengadakan pengajian secara tatap muka untuk mengisi liburan menjelang dan selama Ramadan. Biasanya para santri banyak yang tidak pulang. Mereka mengikuti pengajian beberapa kitab kuning. Namun pada masa pagebluk COVID-19, pesantren mengubah sistem pengajiannya dari tatap muka menjadi pengajian kitab secara daring atau *Ngaji Online* yang diikuti para santri di rumah masing-masing. Padahal selama di pesantren, para santri dibatasi dalam menggunakan internet. Karena itu, fenomena perubahan tingkah laku manusia di dunia daring amat menarik dan penting untuk dikaji. Namun penelitian dalam konteks *cyber-psychology* masih tergolong minim (Takwin, 2020).

Kalangan pesantren melakukan *Ngaji Online* dengan mempertimbangkan: pertama, sebagai bentuk ketaatan kepada *ulul amri*—yang dalam konteks pandemi COVID-19—pemerintah, ulama, dan para dokter¹. Pemerintah menetapkan untuk menjaga jarak sosial dan jarak fisik. Kedua, karakteristik COVID-19 yang dapat menular melalui kontak antar-manusia (Meng, Hua, & Bian, 2020; Li dkk., 2020).

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada liburan Ramadan kemarin, memajukan kegiatan *Ngaji Online* di bulan Sya'ban (9 April 2020) serta mengoptimalkan penggunaan media berbasis internet dan televisi kabel (Gambar 1). Para santri

yang di rumah, mengikuti pengajian secara daring melalui Radio DBS FM, Dakwah Media, Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo TV, dan Tanwirul Afkar.

Gambar 1. Pamflet elektronik tentang *Ngaji Online*



Sumber: (Fakultas Dakwah Sukorejo, 2020; S3TV, 2020)

Jadwal *Ngaji Online* di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo antara lain setelah shalat Subuh sampai pukul 08.00 WIB, waktu dhuha (pukul 08.00 – 10.30 WIB), setelah shalat dhuhur, setelah shalat asar, dan setelah shalat tarawih. Para pembaca kitab yaitu para kiai, ibu nyai, dan ustadz senior. Kitab yang menjadi kajian meliputi bidang fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, nahwu, dan *sharraf*. Para santri bebas memilih kitab yang dikaji. Namun mereka wajib mengikuti *Ngaji Online*, paling tidak, satu buah kitab. Kitab yang dikaji berbahasa Arab, ketika *Ngaji Online* oleh sang pembicara diterjemahkan perkata dan diberi penjelasan singkat. Para santri mencatat terjemahan tersebut dan (bila perlu) menulis penjelasan di pinggir kitabnya. Biasanya di pertengahan Ramadan kitab-kitab tersebut sudah selesai dikaji.

¹ wawancara K.H. Afifuddin Muhajir, 15 April 2020

Hubungan santri kepada kiai pada *Ngaji Online* mengalami perubahan orientasi. Ketika mengikuti pengajian kitab secara tatap muka, para santri menemukan keteduhan dan ketenangan saat mereka menatap wajah sang kiai. Mereka merasa tenang dan damai berada di sekitar kiai². Karena itu, para santri berlomba-lomba untuk berada di dekat sang kiai

Namun ketika mengikuti *Ngaji Online*, para santri mengalami perubahan “rasa”. Mereka lebih merasa aman dan nyaman. Mereka merasa aman karena tidak perlu khawatir tertular penyakit COVID-19. Mereka merasa nyaman karena dapat mengaji sambil “santai” minum secangkir kopi di kamar masing-masing.

Salah satu kelemahan *Ngaji Online* adalah kesulitan dan keterbatasan dalam membina hubungan baik dan hangat, antara kiai dengan santri. Para santri tidak dapat lagi menatap langsung wajah sang kiai dan mengantre bersalaman dengan kiai³. Hubungan terapeutik ini tidak seakrab dan sehangat dalam konteks tatap muka (Samsul & Risma, 2020). Padahal hubungan terapeutik yang memancar dari *congruence*, *accurate empathy*, dan *unconditional positive regard* sang kiai merupakan salah satu kunci dalam proses penyembuhan atau perasaan positif (Corey, 2009; Rogers, 1942).

Kelemahan dalam kehangatan hubungan tersebut, dalam tradisi pesantren, dapat ditutupi dengan ikatan *ruhaniyah* atau spritual yang telah terjalin antara kiai dan santri. Para santri yang mengikuti pengajian model tatap muka ataupun daring (*online*), masih memiliki hubungan *ruhaniyah* dengan kiai. Mereka tidak sekadar mengandalkan hubungan *lahiriyah*; baik melalui tatap muka maupun daring, namun mereka tetap memelihara hubungan *ruhaniyah*.

Ikatan *ruhaniyah* antara kiai dengan santri menjadi penekanan di pesantren. Kiai As’ad, salah satu pendiri Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo mengatakan, seorang kiai harus “asambung”—hatinya harus menyatu—dengan para santri. Begitu pula, seorang santri harus *asambung* dengan kainya. Umpamanya, dengan saling mendoakan dan *istiqomah* membaca doa yang diajarkan di pesantren. Dari sinilah nantinya, muncul barokah; sehingga pesan-pesan sang kiai akan selalu diingat dan tetap melekat di hati para santri

(Arifin, 2014b, 2014a; Hasan, 2003; Ibrahimy & Arifin, 2018).

Menurut Kiai Azaim, jalinan komunikasi antara kiai dan santri meliputi aspek *jasadi* yaitu silaturahmi fisik dan ruhani yaitu keilmuan (Ibrahimy & Arifin, 2019). Hubungan antara santri dengan kiai, terdapat empat katagori. Pertama, *asanding-asambung*; yaitu secara *jasadi* dan ruhani berdekatan dan berinteraksi. Kedua, *asanding-tak asambung*; yaitu secara *jasadi* mereka berdekatan tapi ruhaninya tidak berinteraksi. Ketiga, *tak asanding-asambung*; yaitu secara *jasadi* mereka berjauhan tapi ruhaninya selalu berinteraksi. Keempat, *tak sinding-tak asambung*; baik *jasadi* maupun ruhani tidak berinteraksi dan berjauhan (Ibrahimy & Arifin, 2019). Dilihat dari katagori ini, para santri yang mengikuti *Ngaji Online* dapat dikatagorikan sebagai kelompok ketiga. Proses terapeutik pada pengajian dapat dilihat pada Gambar 2.

Dengan demikian, pada sistem pengajian tatap muka, terapeutik terjadi karena hubungan kehangatan dengan cara memandang langsung wajah kiai yang membuat para santri merasa teduh dan tenang. Pada sistem *Ngaji Online* terapeutik beralih ke setting lingkungan yang membuat para santri merasa aman dan nyaman. Walhasil, kehangatan hubungan yang membuat santri merasa teduh beralih kepada intervensi lingkungan yang membuat santri merasa aman. Dalam sistem *Ngaji Online*, kehangatan hubungan mulai melemah. Kelemahan ini, dapat ditutupi karena ikatan *ruhaniyah* antara kiai dengan santri yang masih terasa kuat.

Gambar 2. Proses terapeutik pada pengajian



² Wawancara Zainul, 17 April 2020

³ Wawancara Shofi, 17 April 2020

KESIMPULAN

Pondok pesantren sangat merespons perkembangan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam masalah pagebluk COVID-19. Di antaranya, dengan mengubah layanan pengajian dari sistem tatap muka menjadi daring. Kegiatan yang biasanya terjadi secara tatap muka antara kiai dengan santri di kompleks pesantren menjadi kegiatan dunia maya jarak jauh di rumah santri masing-masing. Tentu, juga terdapat pergeseran terapeutik dalam konteks hubungan tersebut.

Pertama, pada sistem pengajian tatap muka, terapeutik terjadi karena hubungan kehangatan dengan cara memandang langsung wajah kiai yang membuat para santri merasa teduh dan tenang. Kedua, pada sistem *Ngaji Online* terapeutik beralih ke setting lingkungan yang membuat para santri merasa aman dan nyaman. Dengan demikian, kehangatan hubungan yang

membuat santri merasa teduh beralih kepada intervensi lingkungan yang membuat santri merasa aman. Dalam sistem *Ngaji Online*, kehangatan hubungan mulai melemah. Ketiga, kelemahan dalam *Ngaji Online*, dapat ditutupi karena hubungan *ruhaniyah* atau ikatan spiritual antara kiai dengan santri yang masih terasa kuat. Hubungan *ruhaniyah* ini menjadi kunci dalam terapeutik bagi kalangan pondok pesantren.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada K.H.R. Ach. Azaim Ibrahimy, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, pengurus pesantren, dan Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah (Iksass) yang telah membantu dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2014a). *Sang Pelopor: Kisah Tiga Kiai dalam Mengelola Bekas Bajingan*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Arifin, S. (2014b). *Wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid*. Pena Salsabila.
- _____. (2018). Komunikasi Kiai Pesantren: Pemberdayaan Komunitas Bajingan Perspektif Komunikasi Konseling. *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, (April), 330–338. Surabaya: Kopertis IV.
- _____. (2019). Hidup Berkat dan Sehat: Kearifan Kiai Pesantren dalam Memperbaiki Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam Kitab Al-Adzkar Al-Yaumiyyah. In S. Al Qutuby & I. Y. M. Lattu (Eds.), *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (pp. 58–83). Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press.
- _____. (2020). *At-Tawazun: Psikologi dan Konseling Berbasis Pesantren untuk Membentuk Karakter Khaira Ummah*. Literasi Nusantara.
- Arifin, S., & Munfaridah, H. (2018). Pengembangan Desain Konseling Berbasis Pesantren dengan Pendekatan Service-Learning. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 08(02), 110–132.
- Arifin, S., & Zaini, A. (2018). Dakwah Inklusif di kalangan Bajingan: Membedah Komitmen Bekas Bajingan dalam Membangun Peradaban Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Dakwah*, XIX(1), 29–50.
- _____. (2019). Transformative Da'wah Through Counseling for the Career Development of Coffee Farmer Groups in the Tourism Village Banyuwangi. *Jurnal Konseling Religi*, 10(2), 215–231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/kr.v10i2.6480>
- Corey, G. (2009). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Belmont: Thomson Higher Education.
- Gillon, E. (2007). *Person-Centred Counselling Psychology: An Introduction*. London: SAGE Publications Ltd.
- Hasan, S. A. (2003). *Kharima Kiai As'ad di Mata Umat*. Yogyakarta: LKIS.
- Ibrahimy, A. A., & Arifin, S. (2018). *Kiai Fawaid As'ad: Kepribadian, Pemikiran, dan Perilaku Politik*. Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Ibrahimy, A. A., & Arifin, S. (2019). *Risalah Hati: Trilogi Biografi Nyai Zainiyah As'ad*. Situbondo: Tanwirul Afkar.

- Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., Ren, R., Leung, K.S.M., Yau, E.H.Y., Wong, J.Y., Xing, X., Xiang, N., Wu, Y., Li, C., Chen, Q., Li, D., Liu, T., Zhao, J.,... Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *The New England Journal of Medicine*, 382 (13), 1199-1207. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316>.
- McLeod. (2003). *An Introduction to Counselling Third Edition*. New York,: Open University Press.
- Fakultas Dakwah Sukorejo. (2020). *Ngaji Online Kitab "Syarah Waroqod" Bersama KH Afifuddin Muhajir 28-04-2020*. <https://web.facebook.com/fd.unib>
- Meng, L., Hua, F., & Bian, Z. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine. *Journal of Dental Research*, 2019, 1–
7. <https://doi.org/10.1177/0022034520914246>
- Rogers, C. R. (1942). *Counseling and Psychotherapy Newer Concepts in Practice*. Cambridge: The Ribersibe Press.
- S3TV. (2020, April 10). *Live Streaming "Pengajian Tafsir Jalalain Jum'at" 10 April 2020*. <https://web.facebook.com/s3televisi/>
- Samsul, A., & Risma, A. F. (2020). The Model of Development Therapeutic Speech in the Digital Era: A Study of " Interpretation of Al- Mishbah " for Cyber-Counseling Services. *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Islamic Studies, AICIS 2019, 1-4 October 2019, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291647>
- Takwin, B. (2020). Pesan dari Editor-in-Chief: Tantangan Psikologi Siber. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(01), 3–4. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.02>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

KESENJANGAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA DARURAT COVID-19: TELAAH DEMOGRAFI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELAJAR DARI RUMAH

(INEQUALITY OF EDUCATION SERVICES IN INDONESIA DURING THE EMERGENCY PHASE OF COVID-19: DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF IMPLEMENTATING HOME LEARNING POLICY)

Indah Pratiwi^{1*}, Bakti Utama²

¹Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

²Alumni Pascasarjana Antropologi Universitas Gajah Mada

*Korespondensi penulis: ip_indah87@yahoo.com

Abstract

One of the effects of the COVID-19 pandemic on the education sector in Indonesia is the closure of schools. To ensure education services continue, the government issued a policy of learning home (Belajar dari Rumah/BDR) through online/distance learning. This paper aims to describe the implementation of the BDR for learning quality. To that aim, we have conducted telephone interviews with school principals and teachers from frontier, outermost and remote regions (3T) and non-3T regions. By looking at demographics perspective, implementation of BDR has six variations are a) learning by interactive virtual classroom b) learning assignment by social media c) learning in teacher's or student's home d) learning by using TV/radio e) learning by 'mouth-to-mouth' messages and f) learning stopped. The variations generate different quality of learning and will produce an increasing education inequality in Indonesia.

Keywords: *home learning, COVID-19, education inequality, education emergency, online learning.*

Sejak pasien COVID-19 pertama terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020, perhatian terhadap masalah penyebaran pandemi semakin menguat (Portal Informasi Indonesia, 2020). Sejumlah studi segera dilakukan untuk mengetahui kemungkinan dampak penyebaran COVID-19 (Suryahadi dkk., 2020., Revindo dkk., 2020). Untuk menghadapi kemungkinan dampak tersebut, berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah. Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bergerak cepat dengan mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah (BDR) melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam

Masa Darurat Penyebaran COVID-19 (Kemendikbud, 2020).

Tulisan singkat ini berupaya melihat kemungkinan implikasi kebijakan BDR pada masa darurat COVID-19. Terdapat dua hal yang menjadi titik tolak tulisan ini. *Pertama*, sebagaimana disebutkan Afriansyah, akses menjadi kata kunci dalam pembelajaran daring (Afriansyah, 2020). Menurut Afriansyah, terdapat tiga variabel yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran daring, yaitu: umur, akses terhadap komputer dan internet, serta kesenjangan digital. *Kedua*, ketika kebijakan BDR ini dilakukan, kondisi infrastruktur

pendukung pembelajaran daring di Indonesia belum merata. Statistik pendidikan Indonesia menunjukkan hanya 46,33 persen sekolah yang memiliki jaringan internet (Solihin dkk., 2018). Artinya, masih banyak sekolah yang selama ini belum terpapar dan terbiasa menggunakan teknologi ini. Cakupan layanan sinyal kuat yang hanya menjangkau 66,22 persen wilayah Indonesia, serta kemampuan menggunakan perangkat digital yang hanya 28,43 persen (BPS, 2018) juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Dengan kondisi ini, kebijakan BDR diimplementasikan oleh sekolah dengan beragam cara.

Dengan menyandingkan temuan Afriansyah (2020) dan karakteristik ragam implementasi kebijakan BDR tersebut, kami melihat bahwa meskipun upaya responsif Kemendikbud patut diapresiasi, namun kebijakan ini juga memiliki potensi untuk memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran di Indonesia. Untuk membangun argumentasi ini, kami menggunakan perspektif demografi (Thomas, 2018), yaitu melihat atribut demografi yang melekat pada guru dan siswa untuk menelaah implementasi dan implikasi kebijakan BDR.

Secara umum kebijakan BDR sudah terlaksana di semua jenjang sekolah formal di Indonesia, namun implementasi kebijakan tersebut cukup bervariasi. Kami telah mewawancarai sejumlah kepala sekolah dan guru melalui telepon baik yang berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) maupun non-3T. Hasilnya, kami menemukan enam variasi implementasi kebijakan BDR. *Pertama*, di wilayah dengan akses internet dan perangkat digital yang memadai serta didukung oleh guru dan siswa yang terampil menggunakan perangkat digital, adaptasi proses belajar dari rumah dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran biasanya dilakukan melalui kelas di ruang maya (*interactive virtual classroom*) dan mengoptimalkan aplikasi belajar daring (*online classroom*).

Kedua, di sekolah-sekolah dengan akses internet dan perangkat digital yang memadai namun tidak didukung dengan keterampilan digital guru/siswa, BDR hanya dapat dilakukan secara terbatas. Proses pembelajaran berupa penugasan dan pembimbingan oleh guru umumnya dilakukan melalui aplikasi media sosial *WhatsApp*.

Ketiga, beberapa sekolah di kawasan 3T yang guru/siswanya tidak terjangkau internet memindahkan proses belajar dari sekolah ke rumah guru ataupun siswa. Agustina Arloy guru SD Kristen Rebi dari Kepulauan Aru, Maluku mengatakan: “*Di sini tidak ada jaringan listrik, Ibu. Saya numpang isi (charg) HP di kampung sebelah, setiap hari sa suruh siswa belajar ke rumah*”. Dengan kondisi serba terbatas ini, pembelajaran pada akhirnya dilakukan di rumah guru.

Keempat, beberapa sekolah yang juga tanpa jaringan internet melaksanakan BDR hanya dengan memanfaatkan TV/radio untuk menyebarkan penugasan dari guru misalnya di Kabupaten Wamena. Pembelajaran dari TV sebetulnya merupakan bagian dari upaya Kemendikbud dalam mengurangi kesenjangan kualitas belajar selama BDR. Namun hasil wawancara kami menunjukkan hanya sedikit wilayah tertinggal yang dapat menikmati program tersebut karena ketersediaan jaringan listrik yang tidak memadai, rendahnya daya jangkau program serta faktor kemiskinan. Untuk menyalahi keterbatasan akses sebagian guru menggunakan varian kelima yaitu mengandalkan “pesan berantai” (*‘mouth to mouth’ message*). Aktivitas belajar seperti ini biasanya digunakan hanya sebatas mengumpulkan/menyampaikan tugas kepada siswa. Praktik semacam ini ditemukan di Kabupaten Halamahera Timur dan sebagian wilayah Papua. *Terakhir*, terdapat juga beberapa sekolah yang menjalankan kebijakan BDR dengan meliburkan sepenuhnya tanpa pembelajaran. Kondisi semacam ini terjadi karena tempat tinggal siswa menyebar dan kondisi geografis yang sulit dijangkau misalnya di Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Selain itu, peran anak sebagai faktor produksi dalam ekonomi rumah tangga turut menjadi tantangan BDR di masa pandemi (Utama dkk., 2018).

Keragaman implementasi kebijakan belajar dari rumah ini tentu saja berpengaruh pada kualitas pembelajaran. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menilai bahwa setidaknya terdapat tiga kriteria yang menentukan kualitas pembelajaran jarak jauh. *Pertama*, kurikulum yang mendukung siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini implementasi kurikulum pembelajaran jarak jauh sangat ditentukan oleh adanya modul/pelajaran dan interaksi guru-siswa yang

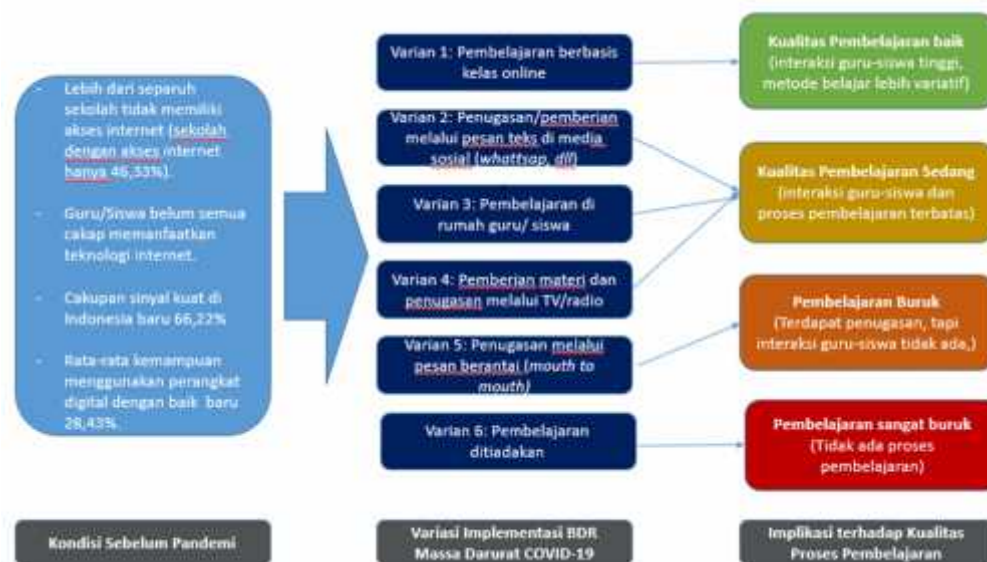
memadai untuk memastikan setiap siswa mendapat informasi secara utuh. *Kedua*, kesiapan SDM profesional yang mendukung siswa dan guru untuk mendayagunakan keterampilan jarak jauh. *Ketiga*, perangkat atau alat yang digunakan oleh siswa/guru dalam mengakses konten pendidikan termasuk alat komunikasi dan media ajar (Reimers dkk., 2020).

Berdasarkan tiga kriteria OECD di atas, kami menilai bahwa proses pembelajaran yang paling efektif selama kebijakan BDR dilaksanakan terjadi pada varian pertama. Hal ini ditandai dengan kesiapan perangkat dan kemampuan guru-siswa dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan kedua hal itu, guru dapat menyiapkan materi lebih optimal serta memiliki ruang interaksi untuk menyampaikan materi tersebut dengan lebih leluasa. Kualitas proses pembelajaran di bawahnya adalah varian kedua hingga keempat. Pada varian kedua, meskipun perangkat guru-siswa tampak siap namun tanpa kemampuan mengoptimalkan media digital yang memadai, ruang penyampaian materi pembelajaran menjadi terbatas. Pada varian ketiga, meskipun transfer pengetahuan tetap terjadi, namun keterbatasan perangkat pembelajaran membuat

proses pembelajaran tidak optimal. Selain itu, di masa pandemi pembelajaran secara langsung sangat berisiko bagi keselamatan guru-siswa.

Selanjutnya, pada pembelajaran TV/radio meskipun kurikulum tersedia dan transfer pengetahuan bisa saja terjadi, namun guru tidak dapat memastikan bahwa siswa menerima informasi dengan benar. Varian kelima yaitu “penugasan melalui pesan berantai” dapat dikatakan menghadirkan proses pembelajaran yang buruk karena pembelajaran hanya dilakukan melalui distribusi soal ke siswa/warga kemudian akan disampaikan ke siswa lainnya. Terakhir, kondisi yang paling buruk tentu saja adalah ketika proses pembelajaran dihentikan sebagaimana varian keenam. Peningkatan di atas menunjukkan bahwa hanya sekolah-sekolah yang mampu mengoptimalkan teknologi digital yang dapat menyelenggarakan pembelajaran lebih efektif pada masa darurat pandemi ini. Ilustrasi dari keragaman implementasi kebijakan bdr di tingkat sekolah dan implikasinya terhadap kualitas proses pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Keragaman Implementasi Kebijakan BDR di Tingkat Sekolah dan Implikasinya Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran



Setidaknya terdapat tiga hambatan yang menyebabkan kesenjangan ini bisa terjadi. *Pertama*, akses terhadap teknologi internet di Indonesia belum merata. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan pemerataan jangkauan seluler layanan

jaringan 3G dan 4G sampai saat ini baru berada di angka 76 persen (Kominfo, 2020). *Kedua*, keterbatasan kepemilikan perangkat digital. Pada masyarakat miskin perangkat digital merupakan barang mewah. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia hanya diangka 68 persen dengan konsentrasi di wilayah perkotaan (APJII, 2019). Hal ini juga terkait dengan hambatan ketiga yaitu tingkat penguasaan dalam memanfaatkan teknologi digital masih timpang. Dalam hal ini, karakteristik usia menjadi aspek penting. Hasil temuan APJII menunjukkan pengguna internet yang berusia di atas 45 tahun cenderung mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital. Hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan, guru yang berusia 45 tahun ke atas kurang dapat mengoptimalkan media daring dibanding kategori usia di bawahnya (APJII, 2019). Sementara pada sisi peserta didik, siswa pada usia pendidikan dasar relatif lebih sulit memanfaatkan teknologi (karena membutuhkan pendampingan orang tua) dibanding siswa pada usia di atasnya.

KESIMPULAN

Kebijakan BDR oleh Kemendikbud selayaknya ditempatkan sebagai kebijakan mitigasi bencana di tengah penyebaran pandemi COVID-19. Artinya, pertimbangan untuk menyelamatkan nyawa menjadi yang terpenting. Meskipun demikian, pemenuhan hak pendidikan berkualitas bagi anak tidak bisa diabaikan. Dengan melihat keragaman implementasi BDR, semakin lama kebijakan ini dilakukan, kesenjangan kualitas belajar siswa akan semakin tinggi. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan. Dalam jangka pendek, Kemendikbud perlu membuka kemungkinan alternatif metode pembelajaran dari rumah misalnya melalui kerjasama dengan radio komunitas, radio swasta, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, dan penggerak literasi. Sementara dalam jangka panjang, penguatan kemampuan digital bagi guru dan pemerataan fasilitas teknologi informasi (TI) di seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2020). *Covid-19, Transformasi Pendidikan dan Berbagai Problemnnya*. <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19-transformasi-pendidikan-dan-berbagai-problemnnya>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2019). *Laporan Hasil Survei Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2019*. <https://apji.or.id/survei2018s/kirimlink>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2018). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. [kominfo] (2019, April). *Refarming Buka Peluang Layanan 4G Lebih Merata*. SIARAN PERS NO. 74/HM/KOMINFO/04/2019
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud]. (2020, Maret). *Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19*. <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J., & Touminen, S. (2020). *Supporting Continuation of Teaching and Learning during the COVID-19 Pandemic*. OECD <http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf>
- Revindo, M.D., Sabrina, S., & Sowwam, M. (2020, April). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pariwisata Indonesia: Tantangan, Outlook, dan Respon Kebijakan. *Briefing note*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. <https://www.lpem.org/id/briefing-note-april-2020-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pariwisata-indonesia-tantangan-outlook-dan-respon-kebijakan/>
- Portal Informasi Indonesia .(2020, Maret 2). *Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Solihin, L., Utama, B., & Pratiwi, I. (2018). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 2018 Laporan Penelitian Peningkatan Literasi Melalui Instrumen Indeks Literasi Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadama, D. (2020, April). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. SMERU

Working Paper.
http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf

Thomas, R.K.(2018). *Concept, Methods and Practical Application in Applied Demography An Introductory Textbook*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-65439-3>

Utama, B., Pratiwi,I., Atmadiredja, G., & Nurahmah, D. (2017). *Laporan Penelitian Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

WABAH VIRUS KORONA DAN MOMENTUM EVALUASI REZIM KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

(COVID-19 PANDEMIC AND MOMENTUM OF FOOD SECURITY EVALUATION IN INDONESIA)

Anggalih Bayu Muh. Kamim

Alumnus Departemen Politik & Pemerintahan, FISIPOL UGM

Korespondensi penulis: anggalih.bayu@yahoo.co.id

Abstract

This study will explore the production approach of the food security regime in Indonesia, which increasingly marginalized peasant during the COVID-19 pandemic. The production approach emphasizes the role of global governance by encouraging trade liberalization and the large role of corporations to control the supply chain from upstream to downstream creating vulnerability to peasant. The COVID-19 pandemic has led to a decline in market share of peasant agricultural products due to the closure of the wholesale market that supplies hotels and restaurants. The results of the study show that government policy during the COVID-19 pandemic increasingly benefited food corporations by easing operating hours for modern retailers and fixing selling prices that benefited corporations. Meanwhile, peasant are increasingly marginalized during the Corona virus outbreak in the operation of the food security regime with restrictions on the operation of traditional markets, price adjustments at the farm level, and the involvement of agribusiness application companies that are envisaged to help marketing, but in reality do not necessarily give selling prices which is beneficial due to the low bargaining power of peasant.

Keywords: COVID-19 pandemic, peasant, food security regime.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis rezim ketahanan pangan melalui pendekatan produksi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan bergantung pasokan pangan dari mekanisme pasar bebas. Akibatnya petani dan peternak semakin terpinggirkan termasuk di masa wabah virus korona.

Pendekatan produksi pangan menekankan pada peran tata kelola global dengan mendorong liberalisasi perdagangan semakin menunjukkan masalah yang ditimbulkan selama masa wabah korona dengan terpinggirkannya petani dan peternak (Sonnino dkk., 2014). Pendekatan produksi yang memberikan peran besar kepada korporasi untuk menguasai rantai pasokan dari hulu-hilir juga dianggap dapat memarjinalkan petani kecil untuk mampu melakukan “penyesuaian struktural” (Lawrence, 2017). Kerentanan tersebut

semakin dihadapi petani selama merebaknya wabah virus Korona karena adanya gangguan terhadap rantai pasokan dari tingkat petani.

Liputan mendalam yang dilakukan oleh *Tirto.id* menunjukkan bahwa petani dan peternak komoditas cabai, jagung, ayam ras dan beberapa hasil lainnya kehilangan pangsa pasar karena pembatasan jam operasional pasar tradisional serta, penurunan permintaan dari hotel/restoran dan pembeli yang memilih berada di rumah (Hidayat, 2020). Petani yang selama ini mengantungkan penjualan hasil pertaniannya dari pasar induk/pasar tradisional terancam kehilangan sumber penghidupan dari penurunan permintaan ini, akibatnya hampir semua sub sektor pertanian mengalami penurunan indeks harga yang diterima petani, sedangkan indeks harga yang

dibayarkan petani mengalami kenaikan (Pancawati, 2020). Di tengah masa panen ini, pasar induk tidak lagi menyuplai hasil pertanian ke hotel dan restoran (Sari, 2020).

Pemerintah berusaha mengatasi permasalahan menurunnya pangsa pasar petani selama merebaknya wabah dengan mendorong penjualan hasil pertanian secara daring. Pemerintah mengajak perusahaan Gojek untuk memfasilitasi perdagangan hasil pertanian selama masa pandemi virus Korona melalui aplikasi Toko Tani ("Pasar Swalayan Boleh", 2020). Akan tetapi, langkah perdagangan melalui aplikasi tidak lantas membuat harga jual menguntungkan petani akibat minimnya daya tawar mereka di hadapan perusahaan. Petani terpaksa menerima harga jual yang rendah, agar hasil panennya laku di tengah masa pandemi Korona (Sibuea, 2020).

Masalah utamanya bukan pada efisiensi rantai pemasaran hasil pertanian, tetapi sejak awal menurut Abadi (2020) kebijakan tentang harga acuan hasil pertanian di tingkat petani terbilang rendah. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2020 dianggap lebih menguntungkan korporasi pangan karena dapat menekan biaya produksi dari harga acuan yang rendah tersebut akibatnya petani jagung di Kabupaten Dompu sempat melakukan aksi protes pada tanggal 6 Mei 2020 dan tanggal 18 Mei 2020 (Abadi, 2020).

Meskipun pasar tradisional yang menjadi sarana distribusi hasil pertanian menghadapi kebijakan pemberlakuan pembatasan jam operasional, kenyataannya supermarket dan minimarket tetap buka dan menerima keuntungan besar di masa pandemi. Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Nomor 317/M-DAG/SD/04/2020 tentang Kelancaran Pasokan Barang bagi Masyarakat di Tengah Pandemi Virus Corona mengatur kelonggaran waktu bagi operasi toko modern ("Harga Ayam Anjlok", 2020).

Pandemi Korona telah merubah kegiatan jual-beli khususnya masyarakat perkotaan. Konsumen yang tetap tinggal di rumah merubah pola konsumsinya dengan belanja di minimarket maupun supermarket terdekat atau pesan melalui aplikasi (Budiawati, 2020). Perilaku belanja masyarakat yang berlebihan karena kekhawariran di masa pandemi dan mendekati Bulan Ramadhan menjadi penyebab utama minimarket dan supermarket dibanjiri pembeli (Hirawan & Verselita, 2020; Sandi, 2020).

Kajian DBS Group menunjukkan kenaikan omzet penjualan di minimarket dan supermarket sebesar 50% dibandingkan keadaan normal. Hal berbeda terlihat pada retail modern *department store* yang tidak menjual bahan pangan justru menghadapi penurunan omzet bahkan mengalami penutupan (Aria, 2020).

Meskipun harga produk pangan di supermarket dan minimarket relatif tinggi selama masa wabah virus Korona, kenyataannya petani dan peternak lokal tidak mendapat pembagian pangsa pasar yang sama. Di tengah anjloknya harga jual produk pertanian di tingkat petani dan peternak, petani dipaksa berhadapan dengan perusahaan besar yang sudah memiliki jaringan bisnis dari hulu ke hilir ("Penyuluh dan Petani Tetap", 2020). Penulis telah melacak beberapa perusahaan mitra penyuplai berbagai jejaring bisnis supermarket dan minimarket di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Data Beberapa Perusahaan Penyuplai Hasil Pangan ke Supermarket/Minimarket di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Produk yang Dijual di Supermarket
1	RUM Seafood	Ikan Hidup, Ikan Segar, Ikan Beku.
2	PT Jaya Utama Santikah	Makanan dan Minuman.
3	PT Indofresh	Buah-buahan dan sayuran impor dan lokal.
4	CV. Segar Jaya	Ikan Air Tawar
5	PT Ganesha Abaditama	Olahan Rempah-Rempah dan Bumbu.
6	UD. Perdana Jaya	Hasil Bumi dan Bumbu.
7	Toko Sae Frozen Food	Makanan beku baik sayuran, daging, ikan, dll.
8	CV. Indonesia Poseidon	Sayuran dan Makanan Beku.
9	PD.Andro Marine Asiatic	Olahan Tangkapan Laut.
10	PT. Karya Baru Indonesia	Hasil bumi.
11	UD. Star	Ayam potong dalam bentuk <i>fresh</i> maupun <i>frozen</i> .
12	CV. Agro Darma Bumi	Rempah-rempah.

Sumber: (Indonetwork, 2020; Indotrading, 2020).

Persaingan petani dengan perusahaan pangan bertambah parah pada masa wabah virus Korona dan menjadi buah simalakama dari rezim ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah memilih melibatkan asosiasi pengusaha seperti Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hipindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), dan Gabungan Pengusaha

Makanan dan Minuman (Gapmmi) untuk menjamin pasokan pangan (Ridhoi, 2020). Pasar-pasar tradisional tempat petani menggantungkan penjualannya harus menghadapi berbagai kendala karena PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar), akibatnya penjualan hasil pertanian di masa panen tidak terserap di pasar dan menyebabkan jatuhnya harga jual petani (Sari, 2020). Sementara supermarket dan minimarket tetap diberi keleluasaan untuk diperbolehkan membuka jam operasionalnya.

Petani dan peternak sejak lama telah terpinggirkan oleh Rantai Pasokan Pangan, di mana berbagai korporasi membangun sistem rantai pasokan sejak dari hulu dan hilir yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal untuk meminimalkan biaya dalam sebuah proses produksi (Setiawan, 2016). Korporasi pangan telah menguasai pasar dan memiliki daya tawar politik yang lebih kuat dibandingkan petani dan peternak (Khudori, 2010). Pendekatan produksi pada rezim ketahanan pangan menyebabkan korporasi diuntungkan disebabkan lebih siap untuk melakukan “penyesuaian struktural” dibandingkan dengan para petani kecil yang tidak cukup memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memperoleh teknologi pemasaran dan produksi (Lawrence, 2017). RPP menjadi bagian dari mekanisme rezim ketahanan pangan yang mendorong ketersediaan dan ketercukupan pangan dapat dipenuhi dari mana pun (Sasongko, 2006).

Rezim ketahanan pangan mereduksi persoalan pangan menjadi masalah distribusi dan perdagangan dibandingkan menggugat kontrol terhadap sistem produksi dan konsumsi. Rezim ketahanan pangan lah yang menyebabkan berbagai korporasi di Indonesia dapat menguasai rantai produksi pangan dari hulu ke hilir dengan dalih menciptakan ketersediaan dan ketercukupan (Bachriadi, 2014). Selama merebaknya wabah virus Korona pun, kebijakan pangan yang dibuat oleh pemerintah masih bergantung pada RPP yang dikuasai oleh korporasi.

Pemerintah mengantungkan penyediaan pangan melalui impor dengan mengandeng berbagai korporasi untuk mengatasi problem “ketersediaan pangan” yang mereka yakini (Ridhoi, 2020). Padahal di tengah wabah Korona, hasil panen petani dan peternak justru melimpah dan tidak terserap pasar. Pemerintah yang lebih tertarik dengan jejaring korporasi dalam

penyediaan pangan menyebabkan jatuhnya harga di level petani dan peternak (Susanti, 2020). Dominasi penguasaan pasar oleh korporasi pangan juga menyebabkan penentuan harga pasaran sama sekali tidak melibatkan petani dan peternak. Studi Kementerian Perdagangan sebenarnya telah menunjukkan 85% rantai produksi ayam ras telah dikuasai oleh korporasi yang mendominasi dalam penentuan harga di pasaran (Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2016).

KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan kerapuhan dari rezim ketahanan pangan di Indonesia yang bergantung pada pasokan pangan dari korporasi. Begitu juga dengan virus Korona yang semakin memperparah kerentanan petani. Korporasi pangan yang menguasai rantai pasokan pangan dari hulu-hilir mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah bahkan dalam kondisi merebaknya virus Korona ini. Pemerintah memprioritaskan mengandeng asosiasi usaha untuk menjamin pasokan pangan selama pandemi, memberikan kelonggaran jam operasional pada jejaring gerai-gerai toko modern mitra korporasi pangan dan memberikan pengaturan harga penjualan yang menguntungkan.

Sementara itu, petani semakin dianaktirikan selama wabah virus Korona dalam bekerjanya rezim ketahanan pangan dengan adanya pembatasan pada operasional pasar-pasar tradisional, pengaturan harga di tingkat petani, dan pelibatan perusahaan aplikasi agribisnis yang dibayangkan akan membantu pemasaran, tetapi kenyataannya tidak serta merta memberikan harga jual yang menguntungkan akibat rendahnya daya tawar petani.

Upaya memutus ketergantungan pada korporasi pangan menjadi penting, demi memastikan petani sebagai garda terdepan produksi pangan tercukupi kesejahteraannya apalagi selama masa pandemi. Upaya membangun jejaring antara petani dan konsumen untuk mencapai daulat pangan dapat dilakukan dengan mencontoh langkah Gerakan Lumbung Agraria yang diinisiasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dengan cara:

Pertama, aksi donasi pangan dari petani, yakni kegiatan serikat tani menyisihkan hasil panen mereka ke Lumbung Agraria untuk diberikan secara langsung ke kelompok rentan terdampak krisis ekonomi karena COVID-19; *Kedua*, aksi pangan sehat dan ekonomis, yakni usaha menghubungkan antara produsen pangan skala kecil (petani, organisasi tani lokal, serikat) dengan konsumen prioritas seperti buruh, miskin kota, nelayan dan pekerja informal yang rentan terdampak COVID-19; *Ketiga*, aksi donasi publik gotong royong bersama petani; dan terakhir, aksi jaga desa-kota memutus rantai penyebaran virus Korona (Putri, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. (2020, Mei 21). Ironi Petani Jagung di Tengah Pandemi Covid-19. *Katadata.id*. <https://katada.id/ironi-petani-jagung-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Aria, P. (2020, April 24). Pandemi Mengubah Lanskap Gerai Retail, Siapa yang Diuntungkan? *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/telaah/2020/04/24/pandemi-mengubah-lanskap-gerai-retail-siapa-yang-diuntungkan>
- Bachriadi, D. (2014). Adakah Jalan untuk Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria di Indonesia?. dalam H. Bernstein & D. Bachriadi (Eds.), *Tantangan Kedaulatan Pangan* (pp. 1–35). ARC Books.
- Budiawati, A. D. (2020, April 22). Supermarket dan Minimarket Nikmati Panen Selama Pandemi Corona. *Dream.co.id*. <https://www.dream.co.id/dinar/selama-corona-supermarket-dan-minimarket-lebih-dilirik-200421t.html>
- Harga Ayam Anjlok Diduga Ulah Mafia, Peternak: Tolong Kami Satgas Pangan. (2020, April 6). *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/06/19344261/harga-ayam-anjlok-diduga-ulah-mafia-peternak-tolong-kami-satgas-pangan>
- Hidayat, R. (2020, April 15). Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19. *Tirto.id*. <https://tirto.id/nasib-buram-petani-dan-peternak-di-tengah-pandemi-covid-19-eNpo>
- Hirawan, F. B., & Verselita, A. A. (2020). *Kebijakan Pangan di Masa Pandemi COVID-19*. CSIS. <https://www.csis.or.id/publications/kebijakan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19>
- Indonetwork. (2020, April 28). Daftar Perusahaan Supplier, Importir, Toko dan Distributor Agrobisnis. *Indonetwork.co.id*. <https://www.indonetwork.co.id/agrobisnis-produk-pangan/perusahaan>
- Indotrading. (2020, April 28). Supplier Produk Supermarket. *Indotrading.com*. <https://www.indotrading.com/company/produk-supermarket>
- Khudori. (2010). Kondisi Pertanian Pangan Indonesia. *Pangan*, 19(3), 211–232. <https://doi.org/10.33964/jp.v19i3.141>
- Lawrence, G. (2017). Re-evaluating food systems and food security: A global perspective. *Journal of Sociology*, 53(4), 774–796. <https://doi.org/10.1177/1440783317743678>
- Pancawati, D. (2020, Juni 6). Produk Pangan dalam Pusaran Pandemi Covid-19. *Kompas* <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/05/06/produk-pangan-dalam-pusaran-pandemi-covid-19/>
- Pasar Swalayan Boleh Beroperasi Lebih Larut, Lampau Pukul 22.00. (2020, April 6). *tribunnews.com*. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/05/pasar-swalayan-boleh-beroperasi-lebih-larut-lampau-pukul-2200>
- Penyuluh dan Petani Tetap Bekerja Sediakan Pangan di Tengah Wabah Virus Corona. (2020, April 6). *Jpnn.com*. <https://www.jpnn.com/news/penyuluh-dan-petani-tetap-bekerja-sediakan-pangan-di-tengah-wabah-virus-corona?page=2>
- Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2016). *Kajian kebijakan Persaingan Usaha di Sektor Perunggasan*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/KAJIAN_KEBIJAKAN_PERSAINGAN_USAHA_DI_SEKTOR_PERUNGGAN.pdf
- Putri, B.U. (2020, April 12). Gerakan Solidaritas Lumbung Bantu Warga Terdampak Covid-19. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1330741/gerakan-solidaritas-lumbung-bantu-warga-terdampak-covid-19>

- Ridhoi, M. A. (2020, April 6). Pasokan Pangan Dunia Putri, B.U. (2020, April 12). Gerakan Solidaritas Lumbung Bantu Warga Terdampak Covid-19. Tempo.co.
<https://nasional.tempo.co/read/1330741/gerakan-solidaritas-lumbung-bantu-warga-terdampak-covid-19>
- Terguncang Covid-19, Bagaimana di Indonesia?. *Katadata.co.id*.
<https://katadata.co.id/berita/2020/04/06/pasokan-pangan-dunia-terguncang-covid-19-bagaimana-di-indonesia>
- Sandi, F. (2020, Maret 31). Pengusaha Ritel Kipas-Kipas, Corona Bikin Omzet Melejit. *CNBC Indonesia.com*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200331165831-4-148839/pengusaha-ritel-kipas-kipas-corona-bikin-omzet-melejit>
- Sari, P.S. (2020, April 14). Harga Cabe Anjlok Petani Menangis Dimasa Pandemi Virus Corona (Covid-19). *Berita Sumbar*.
<https://beritasumbar.com/harga-cabe-anjlok-petani-menangis-dimasa-pandemi-virus-corona-covid-19/>
- covid-19/
- Sasongko, T. H. (2006). Jeratan Pangan Global. *Jurnal Analisis Sosial*, 11(1), 57–81.
- Setiawan, B. (2016, April 11). Sistem Pangan: Mau Makan Apa dan Makan Siapa?. *Indoprogres.com*.
<https://indoprogres.com/2016/04/sistem-pangan-mau-makan-apa-dan-makan-siapa/>
- Sibuea, P. (2020, April 21). Darurat Pangan Saat Pandemi Covid-19. *Kontan.co.id*.
<https://analisis.kontan.co.id/news/darurat-pangan-saat-pandemi-covid-19>
- Sonnino, R., Faus, A. M., & Maggio, A. (2014). Sustainable Food Security: An Emerging Research and Policy Agenda. *Int. J. of Soc. of Agr. & Food*, 21(1), 173–188.
- Susanti, R. (2020, April 15). Peternak Bingung, Harga Ayam Anjlok hingga Rp 6.000 Per Kg di Tengah Wabah Corona. *Kompas.com*.
<https://regional.kompas.com/read/2020/04/15/06524081/peternak-bingung-harga-ayam-anjlok-hingga-rp-6000-per-kg-di-tengah-wabah-covid-19/>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PROFIL PENDUDUK TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 DAN MENINGGAL: KASUS INDONESIA DAN DKI JAKARTA

(THE PROFILE OF POPULATION THAT CONFIRMED POSITIVE FOR COVID-19 AND DIED: INDONESIA AND DKI JAKARTA CASES)

Deny Hidayati

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi penulis: denyhidayati001@gmail.com

Abstract

This paper discusses the population that confirmed positive for COVID-19 and died in Indonesia and DKI Jakarta, which is epicentre of corona virus transmission in this country. The trend of population confirmed positive COVID-19 continues to increase and fluctuate every day, while the percentage of population deaths tends to decline. The paper using secondary data revealed that male residents were more vulnerable to COVID-19 than women. The number of male population confirmed positive corona virus is higher and the percentage of death is much higher. Covid-19 attacks all age groups, but the population is over 46 years, especially 60 years and above, more vulnerable than other age groups. Infants, toddlers and children who are detected positively have a low percentage, but the quantity is quite large. The population risk reduction policy for COVID-19 is indispensable for all residents with priority given to more vulnerable groups in Indonesia and DKI Jakarta.

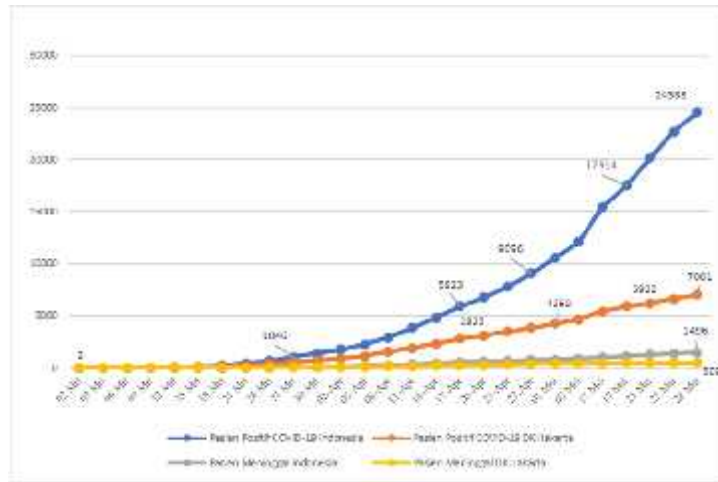
Keywords: *population, sex, age group, vulnerable, COVID-19*

Paper ini mendiskusikan profil penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan yang meninggal dunia di tingkat nasional (Indonesia) dan provinsi (DKI Jakarta) yang menjadi lokasi pertama terdeteksinya penduduk positif virus korona dan episentrum penularan COVID-19 di negeri ini. Profil penduduk difokuskan pada variabel utama demografi, yaitu jenis kelamin dan kelompok umur. Pemahaman tentang profil penduduk diperlukan untuk mengetahui kelompok rentan COVID-19 agar dapat dilakukan penanganan dan upaya mitigasi tepat sasaran untuk memutus penyebaran virus korona. Paper ini menggunakan data sekunder, terutama dari situs resmi pemerintah di tingkat nasional (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia) dan DKI Jakarta (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta). Pengumpulan data juga

dilakukan melalui *desk review* hasil-hasil penelitian dan referensi yang relevan.

Tren penduduk Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat sejak pertama diumumkan, dari 2 orang pada 2 Maret 2020 menjadi 24.538 orang tanggal 28 Mei 2020 (Gambar 1). Peningkatan jumlah penduduk berfluktuasi setiap harinya dengan penambahan kasus positif tertinggi sebanyak 973 orang terjadi 21 Mei 2020. Tingginya penambahan kasus positif menurut pemerintah terkait dengan semakin masif dan tersebarnya kegiatan test COVID-19. Tetapi sebagian *stakeholders* mengungkapkan banyaknya penambahan penduduk positif karena rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan persiapan Idul Fitri yang berdampak pada banyaknya kerumunan warga di bandara, stasiun, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.

Gambar 1. Tren Penduduk Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Meninggal di Indonesia dan DKI Jakarta, 2 Maret – 28 Mei 2020



Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 29 Mei 2020

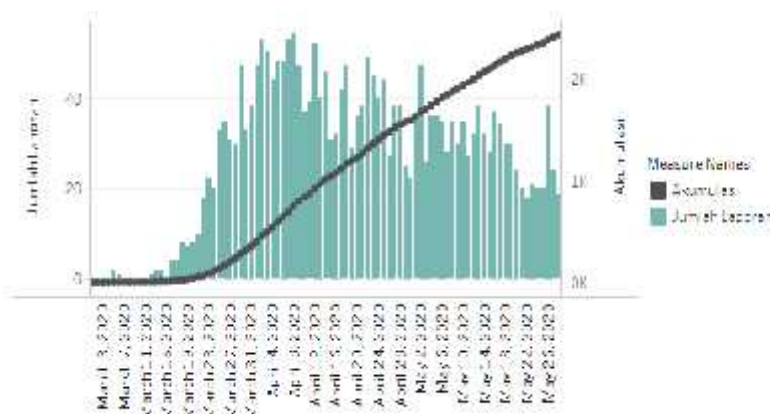
Penduduk yang positif COVID-19 tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak berada di DKI Jakarta, mencapai 7.001 orang atau 28,5 persen tanggal 28 Mei 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 2020). Dari grafik pada Gambar 1 diketahui awal terdeteksinya COVID-19, garis kurva penduduk yang positif di Indonesia dan Jakarta jaraknya sangat berdekatan, karena Jakarta merupakan pusat penyebaran virus korona di Indonesia. Namun sebulan kemudian jarak kedua garis kurva tersebut mulai menjauh dan semakin melebar. Kondisi ini mengindikasikan pertambahan jumlah penduduk positif COVID-19 di Indonesia sangat signifikan dan menyebar luas sampai ke seluruh provinsi, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Jumlah kematian penduduk yang diumumkan pemerintah terus meningkat, namun tren persentasenya terus menurun pada periode 2 Maret - 28 Mei 2020. Pada fase awal terdeteksinya COVID-19, kematian penduduk sangat tinggi, yaitu 9,5 persen pada 2 April 2020 dan hanya turun sedikit menjadi 9,0 persen pada 16 April 2020. Pada akhir April kematian masih tinggi, bahkan tertinggi di Asia Tenggara (CSIS, 2020; Wahyuni, 2020; Wong dkk., 2020). Kematian terus menurun mencapai 6,1 persen pada 28 Mei 2020, seiring dengan gencarnya informasi tentang pentingnya melaksanakan *physical* dan *social distancing* serta mulai dilaksanakannya PSBB di DKI Jakarta (10 April 2020), Jawa Barat (15 April 2020 untuk Bogor, Depok dan Bekasi), Banten (18 April untuk Tangerang Raya).

Kematian penduduk di Jakarta mempunyai pola serupa dengan di Indonesia, tren persentasenya juga menurun dalam periode tersebut. Namun, persentase kematian di ibukota lebih tinggi daripada di Indonesia, yaitu 10,5 persen pada 2 April 2020. Persentase ini turun sedikit menjadi 9,2 persen pada 2 Mei 2020, dan terus menurun meskipun persentasenya masih tinggi (7,3 persen) pada 28 Mei 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 2020).

Angka kematian penduduk karena COVID-19 di Indonesia masih dalam perdebatan. Sebagian *stakeholders*, terutama IDI, pakar epidemiologi, praktisi, dan pemerhati kesehatan, memperkirakan kematian penduduk yang positif jauh lebih tinggi (Djalante dkk., 2020; Wahyuni, 2020; WHO, 2020a). Mereka beranggapan data kematian dari pemerintah kurang transparan. Pemerintah hanya menghitung jumlah kematian berdasarkan jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif, sedangkan kematian penduduk dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Penduduk Dalam Pengawasan (PDP) yang hasil tesnya belum keluar serta kematian penduduk dengan gejala-gejala COVID-19 tidak masuk dalam perhitungan. Perkiraan mereka tentang lebih banyaknya kematian juga didukung data akumulasi pemakanan di DKI Jakarta yang naik drastis sejak akhir Maret, dari 89 pada 23 Maret 2020 menjadi 456 tanggal 2 April 2020 dan 2.432 pada 28 Mei 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, 2020). (Gambar 2).

Gambar 2. Akumulasi Pemakaman Jenazah dengan Protap Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, 2020

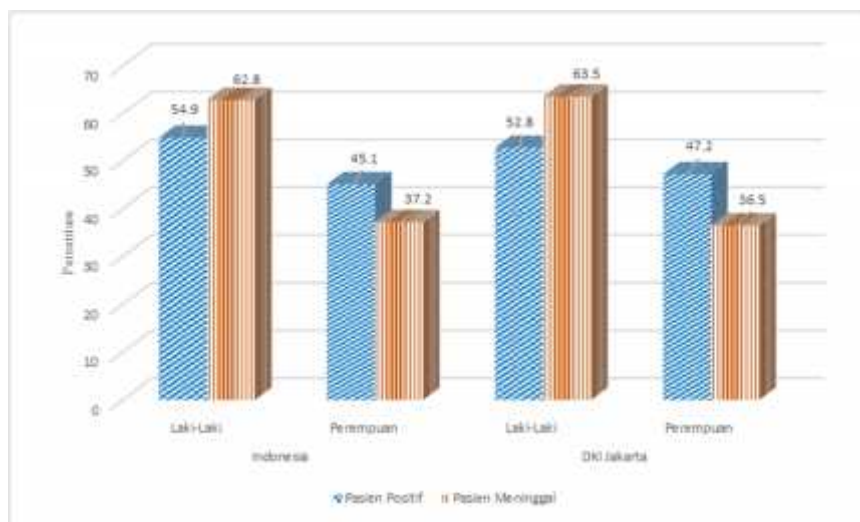


Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, [29 Mei 2020](#)

COVID-19 menyerang menjangkit semua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Grafik pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa laki-laki mendominasi penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan meninggal di Indonesia. Penduduk laki-laki yang positif mencapai lebih dari separuh total mereka yang

terdeteksi positif tersebut. Keadaan laki-laki jauh lebih buruk daripada perempuan. Laki-laki yang meninggal jauh lebih banyak, persentasenya berbeda signifikan dengan perempuan. Namun perempuan tetap perlu waspada, karena persentase yang terkonfirmasi positif masih tinggi.

Gambar 3. Distribusi Penduduk Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Meninggal Menurut Jenis Kelamin di Indonesia dan DKI Jakarta, 2 Maret – 28 Mei 2020



Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 29 Mei 2020

Dominasi penduduk laki-laki yang positif COVID-19 dan meninggal di tingkat nasional juga terjadi di DKI Jakarta. Dari Gambar 3 diketahui bahwa laki-laki yang positif virus korona di Jakarta persentasenya lebih

rendah dari di Indonesia. Seperti di Indonesia, kematian laki-laki sangat tinggi, hampir dua pertiga total penduduk yang meninggal di Jakarta.

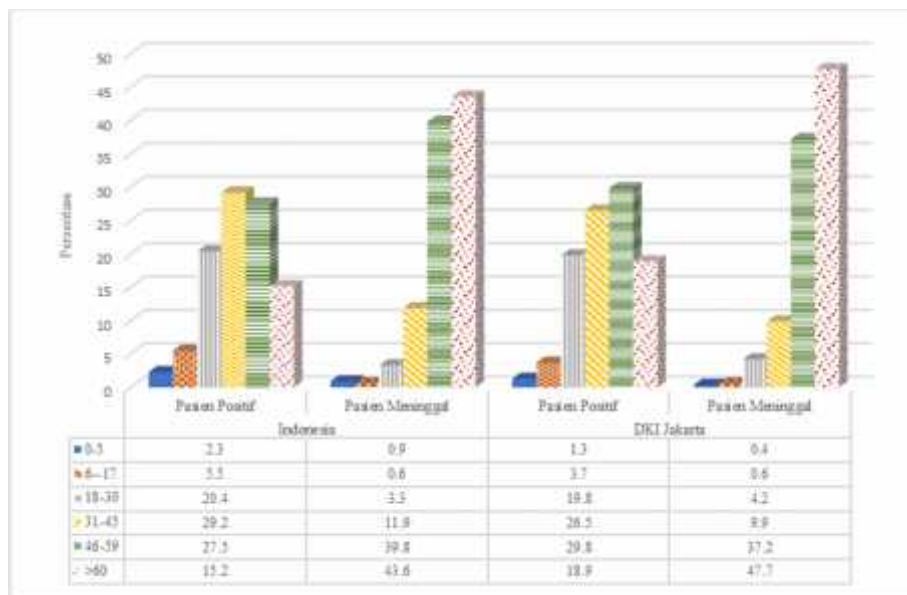
Gambaran di Indonesia dan DKI Jakarta mengindikasikan penduduk laki-laki jauh lebih rentan terhadap COVID-19 daripada perempuan. Kondisi ini menurut beberapa pakar kesehatan terkait dengan faktor biologis dan gaya hidup. Secara biologis tingkat imunitas laki-laki lebih rendah daripada perempuan, karena itu perempuan relatif lebih kuat bertahan dari virus korona. Sedangkan gaya hidup berhubungan dengan kebiasaan laki-laki yang lebih sering merokok, sehingga penyakit saluran pernafasan laki-laki kondisinya sering lebih buruk daripada perempuan. (Alon dkk., 2020; Lawton, 2020; Mahase, 2020; Promislow & Phil, 2020; Wenham dkk., 2020). Selain itu, laki-laki lebih terekspose COVID-19, mereka cenderung lebih banyak berada di luar rumah, baik untuk bekerja maupun keperluan lainnya.

COVID-19 juga menyerang semua kelompok umur penduduk, mulai dari bayi-balita sampai dengan lanjut usia (lansia) dengan persentase yang bervariasi menurut kelompok umur (Gambar 3). Penduduk yang terkonfirmasi positif virus korona di Indonesia mengelompok pada tiga kelompok umur, yaitu: 18-30

tahun, 31-45 tahun dan 46-59 tahun dengan persentase tertinggi pada umur 31-45 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk terdeteksi COVID-19 terkonsentrasi pada kelompok umur produktif. Mereka lebih terpapar COVID-19 karena banyak berada di luar rumah untuk bekerja. Sebaliknya, penduduk terdeteksi positif paling sedikit terdapat pada kelompok umur 0-5 tahun (bayi dan balita), namun secara kuantitas jumlahnya masih cukup besar, mencapai 564.374 orang pada 28 Mei 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 29 Mei 2020).

Grafik pada Gambar 4 juga menginformasikan penduduk positif COVID-19 yang paling banyak meninggal di Indonesia berada pada kelompok umur 60 tahun ke atas dan umur 46-59 tahun. Kematian penduduk berumur 60 tahun ke atas proporsinya tinggi, mendekati separoh, dari total kelompok umur ini. Sebaliknya, kematian bayi, anak-anak dan remaja (kelompok umur 0-17 tahun) paling rendah (< 1 persen).

Gambar 4. Distribusi Penduduk Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Meninggal Menurut Kelompok Umur di Indonesia dan DKI Jakarta, 2 Maret – 28 Mei 2020



Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 29 Mei 2020

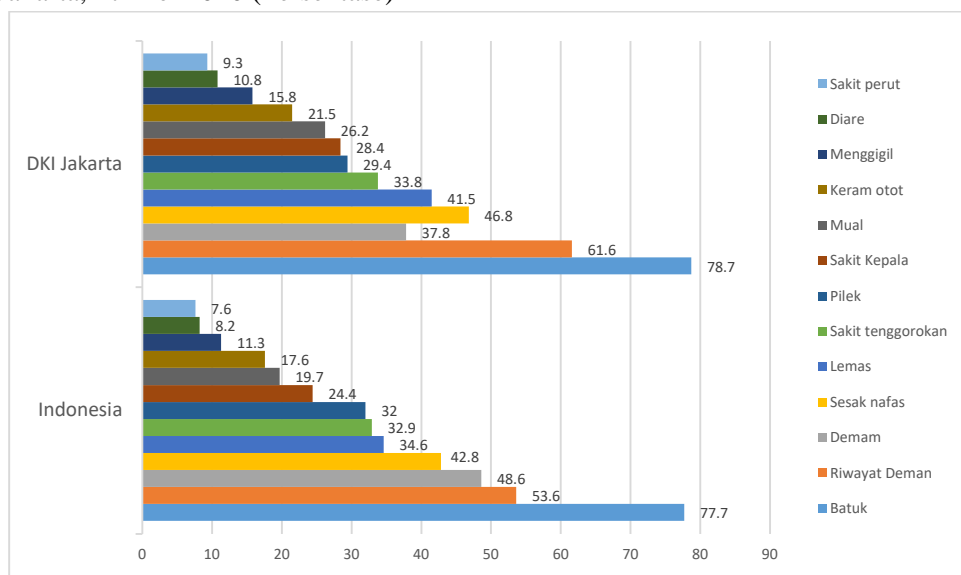
Distribusi penduduk positif COVID-19 dan yang meninggal menurut kelompok umur di tingkat nasional sedikit berbeda dengan di DKI Jakarta. Di Jakarta konsentrasi penduduk yang positif virus korona bergeser ke kelompok umur 46-59 tahun. Sedangkan

penduduk positif yang meninggal kondisinya serupa dengan tingkat nasional, mengelompok pada umur 60 tahun ke atas dan 46-59 tahun.

Kematian penduduk, terutama lansia, erat kaitannya dengan gejala dan penyakit penyerta yang mereka alami (Michelen dkk., 2020; Promislow & Phil, 2020; Shahid dkk., 2020; WHO, 2020b; Liu dkk., 2020). Data situs resmi pemerintah menginformasikan gejala penyakit utama dari penduduk positif COVID-19 yang meninggal adalah batuk dan riwayat demam dengan persentase di Indonesia sedikit lebih rendah dari di Jakarta. Gejala penyakit tertinggi ke tiga adalah sesak nafas diikuti oleh sakit tenggorokan dan demam. Gejala penyakit lain (seperti: mual, sakit perut, keram otot, dan menggigil) persentasenya lebih rendah dan bervariasi menurut jenis penyakit dengan perbedaan persentase yang tidak signifikan antara jenis penyakit dan lokasi, Indonesia dan DKI Jakarta. (Gambar 2).

Kebanyakan penduduk yang meninggal juga memiliki penyakit lain (penyakit penyerta) sebelum mereka positif COVID-19. Data situs resmi pemerintah mencatat penyakit penyerta utama dari penduduk positif COVID-19 yang meninggal di Indonesia adalah hipertensi, diabetes militus, jantung dan paru obstruktif kronis. Persentase tertinggi adalah hipertensi mencapai lebih dari separoh penduduk positif virus korona. Sedangkan tiga penyakit penyerta lain persentasenya jauh lebih rendah dari hipertensi. Penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit kanker, gangguan nafas lain, ginjal, hati dan asma, persentasenya relatif kecil, kurang dari 10 persen. Pola penyakit penyerta di tingkat nasional ini serupa dengan di DKI Jakarta. (Gambar 5)

Gambar 5. Distribusi Gejala Penyakit Penduduk Positif COVID-19 yang Meninggal di Indonesia dan DKI Jakarta, 17 Mei 2020 (Persentase)



Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 17 Mei 2020

KESIMPULAN

Paper ini mengungkapkan bahwa penduduk laki-laki dan penduduk berumur di atas 46 tahun, terutama 60 tahun ke atas, rentan terhadap COVID-19 di Indonesia dan DKI Jakarta. Penduduk laki-laki yang terkonfirmasi positif virus korona lebih banyak dari penduduk perempuan dan angka kematiannya jauh lebih tinggi (persentasenya berbeda signifikan) jika dibandingkan dengan kematian perempuan. Namun demikian penduduk perempuan masih harus tetap waspada, karena kemungkinan terinfeksi COVID-19 masih tinggi mengingat perbedaan persentase dengan penduduk

laki-laki yang positif virus korona tidak signifikan. COVID-19 menyerang semua kelompok umur, termasuk bayi, balita dan anak-anak. Meskipun mereka yang terdeteksi positif persentasenya rendah, tetapi tetap perlu mendapat perhatian mengingat secara kuantitas jumlahnya cukup besar dan pertambahannya cenderung meningkat.

Kebijakan pengurangan risiko penduduk terhadap COVID-19 sangat diperlukan untuk semua jenis kelamin dan kelompok umur, namun prioritas harus diberikan pada kelompok-kelompok penduduk yang lebih rentan di Indonesia dan DKI Jakarta. Upaya

kesiapsiagaan dan mitigasi sangat krusial dan mendesak untuk memutus penyebaran virus korona yang tren pertumbuhannya masih terus meningkat di Indonesia.

Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan tetap memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan warga, dan menjaga pola hidup sehat. Kegiatan sosialisasinya perlu terus digaungkan di ruang publik mengingat sebagian masyarakat tidak disiplin, terutama setelah beredarnya informasi rencana

pelanggaran PSBB. Namun sebagian penduduk, terutama di permukiman kumuh, padat dan miskin, sulit menjalankan *physical* dan *social distancing* karena kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi yang kurang kondusif. Pemerintah dan *stakeholders* harus menjamin ketersediaan akses mereka terhadap air bersih dan sumber air serta ruang terbuka dan bangunan/ruangan yang diperlukan untuk tempat isolasi/karantina mandiri, terutama bagi penduduk yang telah masuk dalam kategori ODP dan PDP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alon, T., Doepke, M., Rumsey, J.O., & Tertilt, M. (2020). The Impact of COVID-19 on Gender Equality. *NBER Working Paper* 26947. <https://doi.org/10.3386/w26947>
- Centre for Strategic and International Studies [CSIS]. (2020). *South East Asia COVID-19 Tracker*. <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0>.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M.S., Djalante, S., Rafliana, I. Gunawan, L.A., Surtiarti, G.A.K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *ScienceDirect*. *Progress in Disaster Science*, 6, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia. (2020). *Data COVID-19*. <https://domainkami.net/index.php/excel/main#>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta. (2020). <https://domainkami.net/index.php/excel/main#>.
- Lawton, G. (2020, April 16). Why are men more likely to get worse symptoms and die from covid-19? *NewScientist*. <https://www.newscientist.com/article/2240898-why-are-men-more-likely-to-get-worse-symptoms-and-die-from-covid-19/#ixzz6MBDhOfxp>.
- Liu, K., Chen, Y., Lin, R., & Han, K. (2020). Clinical features of COVID-19 in elderly patients: a comparison with young and middle-aged patients. *J Infect*.80 (6), E14-E18 <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.005>.
- Mahase, M. (2020). Covid-19: death rate is 0.66% and increases with age, study estimates. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1327>.
- Michelen, M., Jones, N., & Stavropoulou, C. (2020, April 01). In Patients of COVID-19, what are the symptoms and clinical features of mild and moderate cases?. *The Centre for Evidence-Based Medicine*. <https://www.cebm.net/covid-19/in-patients-of-covid-19-what-are-the-symptoms-and-clinical-features-of-mild-and-moderate-case/>.
- Promislow, D.E.L., & Phil, D (2020). A geroscience perspective on COVID-19 mortality. *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*, glaa094. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/gerona/glaa094>
- Shahid, Z., Kalayananita, R., McClafferty, B., Kepko, D., Ramgobin, D., Patel, R., Anggarwal, S., Vunnam, R., Sahu, N., Bhatt, D., Jones, K., Pharm, D., Golamari, R., & Jain, R. (2020). COVID-19 and older adults: what we know. *Journal of the American Geriatrics Society*, 68(5), 926-929. <https://doi.org/10.1111/jgs.16472>.
- Wahyuni, N.C. (2020, April 27). Indonesia currently has highest covid-19 mortality rate in Asia. *JakartaGlobe*. <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-currently-has-highest-covid19-mortality-rate-in-asia>.
- Wenham, C; Smith, C., & Morgan, R. (2020). COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. *The Lancet*, 395 (10227), 846-848. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30526-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2).

World Health Organization [WHO] (2020a).
International guidelines for certification and classification (Coding) of Covid-19 as cause of death.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?ua=1.
_____. (2020b). *Updates on novel corona virus (COVID-19).*
<https://www.who.int/maldives/news/detail/31-01-2020-updates-on-novel-corona-virus->

[\(COVID-19\)#:~:text=The%20virus%20can%20cause%20a, and%20deaths%20can%20occur.](#)

Wong JEL., Leo YS., & Tan C.C. (2020, Februari 20). COVID-19 in Singapore - current experience: critical global issues that require attention and action. *JAMA*.
<https://doi.org/10.1001/jama.2020.2467>.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

TRAPPED POPULATIONS: MENANGANI PANDEMI COVID-19 UNTUK PENYINTAS BENCANA DI KOTA PALU

(TRAPPED POPULATIONS: MANAGING COVID-19 PANDEMIC FOR DISASTER SURVIVORS IN PALU CITY)

Abdul Fikri Angga Reksa

Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi penulis: fikrianggareksa@gmail.com

Abstract

This article depicts the disaster survivors' recent situation amidst the COVID-19 crisis in Palu City (Central Sulawesi). Even though multiple disasters occurred around two years ago, there are still many people living in temporary shelters. They could not apply a health protocol recommendation such as physical distancing due to densely populated setting. Apart from that, they could not access a proper WASH facility in the evacuation camps. The coronavirus outbreak has been undermining the temporary shelters' dwellers hardly. Most of them are trapped or unable to move to a safe place, albeit they want to do it so. The local government has anticipated the worst-case scenario through direct assistance and stimulus programs. However, those ongoing programs are inadequate to reach the whole communities in need. In order to manage the COVID-19 pandemic, this article suggests people empowering approach by harnessing the existing social capital, for instance, social network and community-based initiatives. Learning from the tragedy on 28 September 2018, the community-based initiatives focus on providing basic needs (food, sanitizer, mask) and mental health support.

Keywords: *trapped populations, COVID-19, Palu*

PENYINTAS BENCANA DAN COVID-19

Belum usai duka masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), akibat gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang menerpa pada 28 September 2018. Kini masyarakat harus menghadapi ancaman baru berupa pandemi COVID-19. Sampai 7 Juni 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng mencatat sebanyak 35 pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan rincian 16 orang dinyatakan sembuh, 16 orang masih menjalani perawatan, dan 3 orang lainnya meninggal dunia.

Secara statistik, jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kota Palu memang terbilang rendah. Namun, pemerintah setempat sangat perlu meningkatkan kewaspadaan. Banyaknya penyintas bencana alam yang masih tinggal di tenda darurat dan hunian sementara

(huntara) menjadi alasan kuat betapa pentingnya langkah-langkah pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 di wilayah berisiko tinggi tersebut. Apabila tidak ditangani dengan serius, area huntara dan tenda darurat bisa menjadi kluster penyebaran COVID-19 yang sangat masif.

Di ranah global, para pakar mengklasifikan kamp pengungsi baik yang disebabkan oleh konflik maupun bencana alam sebagai 'hotspots' penyebaran COVID-19 (Meer, 2020). Raju dan Ayeb-Karlsson (2020) juga mengklasifikasikan permukiman informal dan kawasan perkampungan kumuh perkotaan sebagai wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan COVID-19 di samping kamp pengungsi. Terbukti, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengonfirmasi dua kasus pertama COVID-19 di tenda

pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh yang mengakibatkan ribuan penghuni kamp pengungsi Rohingya tersebut berada dalam pengawasan ketat (Ratcliffe & Ahmed, 2020). Pola penyebaran COVID-19 serupa mungkin saja terjadi di tenda-tenda pengungsian di Palu yang padat penduduk.

Trapped populations didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok untuk berpindah dari lingkungan yang berisiko tinggi meskipun mereka mengharapkannya (Foresight, 2011). Terminologi tersebut mengilustrasikan kerentanan masyarakat yang secara geografis terjebak atau terpaksa menetap akibat dampak buruk krisis iklim. Lebih lanjut, *trapped populations* juga menjelaskan kondisi kelompok masyarakat yang tidak bisa berpindah lantaran berbagai faktor misalnya hambatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Black & Collyer, 2014; Humble, 2014; Nawrotzki & DeWaard, 2017). Meski begitu, penggunaan istilah *trapped populations* perlu ditinjau lebih lanjut terkait implikasi penggunaan label '*trapped*' yang dinilai dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan kapasitas individu untuk memutuskan nasibnya sendiri (Ayeb-Karlsson dkk., 2018).

Dalam konteks masyarakat Palu, mereka yang tinggal di tenda darurat dan huntara dapat dikategorikan sebagai *trapped populations*. Walaupun bencana dahsyat sudah terjadi dua tahun silam, organisasi *Sulteng Bergerak* menyebut masih ada ribuan penyintas tinggal di tenda darurat. Area tenda darurat tersebut tersebar di beberapa kelurahan seperti Talise, Tondo, Pantoloan, Duyu, Petobo, Balara, dan Tawaeli. Banyak di antara mereka hidup dalam ketidakpastian terkait hunian tetap (huntara), finansial, hingga kebutuhan pokok. Bahkan masih ada kelompok masyarakat yang mengandalkan bantuan atau donasi untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka harus bertahan di tempat dengan fasilitas terbatas karena tidak memiliki aset untuk berpindah ke tempat yang lebih layak.

Masuknya pandemi COVID-19 semakin memperparah kerentanan masyarakat di tenda darurat. Apalagi tenda darurat dan huntara di Kota Palu masih belum dilengkapi dengan fasilitas air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH) yang memadai. Di samping itu, luas tenda darurat dan huntara mayoritas hanya berukuran 4x5 meter dan rata-rata dihuni oleh 2 sampai 7 anggota keluarga (NGO1, komunikasi personal, 30

Mei 2020). Anjuran yang dicanangkan WHO menjadi tidak relevan untuk penyintas bencana. Sebagai contoh kampanye program #DiRumahAja atau #StayAtHome tidak bisa diimplementasikan karena memang penyintas tidak memiliki rumah.

Hal tersebut juga berimplikasi pada anjuran dari (WHO) lainnya seperti pembatasan sosial dan imbauan mencuci tangan yang sulit dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa anjuran yang dicanangkan hanya bisa diimplementasikan untuk masyarakat yang memiliki privilese, bukan untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus di Palu.

Untuk mencegah penyebaran yang lebih luas di kawasan tenda darurat, beberapa langkah antisipasi telah dilakukan. Pemprov Sulteng menutup Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu hingga 1 Juni 2020. Upaya tersebut dilakukan karena Kota Palu merupakan gerbang utama ke kota-kota lain di Provinsi Sulteng. Selain itu, pemerintah menerapkan serangkaian langkah pencegahan untuk masyarakat di tenda darurat selama masa pandemi seperti penyemprotan disinfektan dan penambahan fasilitas cuci tangan di depan pintu masuk kamp pengungsian.

Beberapa organisasi kemanusiaan internasional memberikan penanganan khusus untuk para lansia yang masih tinggal di huntara. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dan kebutuhan bahan pokok. Akan tetapi, inisiatif tersebut menuai kritik tajam karena lemahnya kontrol pemerintah dalam melindungi kelompok rentan serta tidak meratanya distribusi BLT dan bahan pokok (NGO2, komunikasi personal, 30 Mei 2020).

Parks (2020) menegaskan pentingnya modal sosial untuk meminimalisasi dampak negatif pandemi COVID-19. Fakta bahwa ada kelompok masyarakat yang lebih rentan daripada kelompok lainnya, menjadikan kekerabatan dan/atau solidaritas antarmasyarakat menjadi krusial. Berkaca dari tragedi *triple disasters* 2018, bentuk modal sosial seperti jaringan sosial, kepercayaan pada tokoh masyarakat, dan penanganan berbasis masyarakat berkontribusi pada proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana (Reksa & Neise, 2019). Karena itu, penguatan modal sosial di tengah masyarakat dipercaya dapat mencegah keruntuhan yang lebih parah pada masa pandemi COVID-19 di wilayah rentan.

Masyarakat berperan penting dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19 di kamp pengungsian. Organisasi non-profit yang dikelola pegiat seni, Forum Sudut Pandang dan Institut Mosintuwu (Poso) menunjukkan solidaritasnya dengan menggelar “Masak untuk Kawan”. Program ini bertujuan menyediakan stok makanan matang untuk siapa saja yang membutuhkan di area Palu dan sekitarnya, termasuk masyarakat di kamp pengungsi. Hingga sekarang, krisis pangan untuk masyarakat yang berada di tenda darurat masih sering terjadi. Terlebih, sebagian besar penghuni huntara dan tenda pengungsian mayoritas berprofesi sebagai buruh harian lepas. Menyebarnya COVID-19 di Palu, membuat beberapa orang harus kehilangan mata pencahariannya.

Permasalahan sanitasi dan kesehatan paling sering dijumpai dalam kamp pengungsi untuk penyintas bencana (Raju & Ayeb-Karlsson, 2020). Salah satu inisiatif masyarakat dalam penyediaan akses kebersihan misalnya dilakukan oleh Komunitas Sikola Pomore bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah Palu. Mereka memproduksi *hand sanitizer* secara mandiri untuk dibagikan kepada penyintas bencana yang tinggal di tenda darurat. Beberapa komunitas juga membagikan masker kain gratis untuk masyarakat di tenda darurat. Hal itu dilakukan lantaran semakin langkanya *hand sanitizer* dan masker di pasaran.

Aksi penggalangan dana juga marak dilakukan oleh beberapa komunitas untuk masyarakat di tenda darurat yang kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi. Berbagai inisiatif komunitas tersebut banyak berkaca dari pengalaman menghadapi bencana sebelumnya. Mereka lebih memfokuskan penggalangan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar makanan, pendidikan dan sosialisasi protokol kesehatan, serta perlengkapan kesehatan (NGO1, komunikasi personal, 30 Mei 2020). Tidak hanya itu, upaya konseling untuk masyarakat juga masih terus digiatkan mengingat masih banyaknya penyintas yang masih trauma.

KESIMPULAN

Tidak bisa dimungkiri, pemberlakuan protokol kesehatan seperti pembatasan sosial menjadi sesuatu yang disebut ‘*a physical impossibility*’ (Iacobucci,

2020). Karena itu untuk menangani penyebaran COVID-19 di Palu dibutuhkan alternatif solusi yang lebih dari sekadar pemberlakuan peraturan normatif yang sudah ada. Namun, akselerasi pemenuhan akses kebutuhan perumahan dan fasilitas WASH mutlak dibutuhkan bagi penyintas bencana terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Selain itu, kesehatan mental dan rasa aman para penyintas juga patut menjadi prioritas utama (Sieffien dkk., 2020). Terlebih di tenda darurat Palu telah banyak beredar kabar tentang pelecehan seksual yang dialami perempuan di huntara.

Kemunculan berbagai kritik dalam penanganan COVID-19 oleh pemerintah, membuat masyarakat harus lebih saling menjaga di tengah ketidakpastian perihal pandemi. Langkah konkret komunitas berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan, terbukti mengurangi tekanan beban hidup mereka yang tinggal di tenda darurat untuk sementara waktu. Peran tokoh masyarakat atau tokoh adat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, informasi dan sosialisasi, serta meningkatkan solidaritas di tingkat akar rumput (gotong royong). Peran pemerintah sangat krusial terutama dalam menyiapkan bantuan finansial, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi skenario terburuk.

Sebagai penutup, artikel ini berkontribusi dalam memberikan ilustrasi awal mengenai kondisi *trapped populations* penyintas bencana di Kota Palu. Namun, artikel ini belum mengulas secara komprehensif relasi pemerintah dan masyarakat rentan beserta inisiatif yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui gambaran lengkap yang terjadi pada *trapped populations* pada masa pandemi COVID-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Indian Ocean Partnership (IOP) dan The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC). Terima kasih tak terhingga untuk rekan-rekan di Palu dan Sigi yang berkontribusi besar dalam penulisan artikel singkat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayeb-Karlsson, S., Smith, C. D., & Kniveton, D. (2018). A discursive review of the textual use of 'trapped' in environmental migration studies: The conceptual birth and troubled teenage years of trapped populations. *Ambio*, 47(5), 557-573. <https://doi.org/10.1007/s13280-017-1007-6>.
- Black, R., & Collyer, M. (2014). Populations 'trapped' at times of crisis. *Forced Migration Review*, 45, 52-56. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a605ba61-f2a1-4c92-81b0-92a5a33eb32e>.
- Dinkes Provinsi Sulteng.(2020, Juni 7). Situasi COVID-19; Update 7 Juni 2020. <https://dinkes.sultengprov.go.id/update-07-juni-2020/>
- Foresight (2011). Migration and global environmental change: Future challenges and opportunities. Final Project Report. London: The Government Office of Science.
- Humble, A. T. (2014). The rise of trapped populations. *Forced Migration Review*, 45, 56-57. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a605ba61-f2a1-4c92-81b0-92a5a33eb32e>.
- Iacobucci, G. (2020). Covid-19: Doctors warn of humanitarian catastrophe at Europe's largest refugee camp. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1097>.
- Meer, N. (2020, April 21). Overcrowded refugee camps risk Covid-19 tragedy. The University of Edinburgh. <https://www.ed.ac.uk/covid-19-response/expert-insights/overcrowded-refugee-camps-risk-covid-19>.
- Nawrotzki, R. J., & DeWaard, J. (2018). Putting trapped populations into place: Climate change and inter-district migration flows in Zambia. *Regional environmental change*, 18(2), 533-546. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1224-3>.
- Parks, V. (2020) The Critical Role of Social Capital During the COVID-19 Pandemic: Lessons from Disaster Research. *Population Briefs*. 2. https://egrove.olemiss.edu/population_brief/2.
- Raju, E., & Ayeb-Karlsson, S. (2020). COVID-19: How do you self-isolate in a refugee camp?. *International Journal of Public Health*, 1. <https://doi.org/10.1007/s00038-020-01381-8>.
- Ratcliffe, R., & Ahmed, R. (2020, May 15). Fears Rohingya refugees face disaster after Covid-19 reaches Cox's Bazar. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/fears-rohingya-refugees-face-disaster-after-covid-19-reaches-coxs-bazar>.
- Reksa, A.F.A, & Neise, T. (2020) Wiederaufbau und Überleben. Palu auf Sulawesi ein Jahr nach dem Erdbeben. *Geographische Rundschau* 71(12):46-49. <https://www.westermann.de/anlage/4618357/Wiederaufbau-und-Ueberleben-Palu-auf-Sulawesi-ein-Jahr-nach-dem-Erdbeben>.
- Sieffien, W., Law, S., & Andermann, L. (2020). Immigrant and refugee mental health during the COVID-19 pandemic: Additional key considerations. *Canadian Family Physician*. <https://www.cfp.ca/news/2020/06/23/06-23-1>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

DATA ACTIVISM AND COVID-19 IN INDONESIA

(AKTIVISME DATA DAN COVID-19 DI INDONESIA)

Ibnu Nadzir

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi penulis: ibnu.nadzir@gmail.com

Abstract

The government's inability to provide information in relation to COVID-19 in Indonesia, has stimulated grassroots efforts from society to develop data activism. These are the kind of activism that proliferates from modern social media ecosystem and utilizes data as the core of their movement. The article proposes that there are at least three forms of activism differentiated based on the actors, their main sources of data, and characteristic. These forms of activism are aimed to provide data and information that could help both government and society to better mitigate the impact of pandemic. While data activism provides some hope among other grim outlook of COVID-19 management in Indonesia, the questions on its impacts are still looming under the contested authorities of information in Indonesia.

Keywords: Data, activism, social media, COVID-19, information

Since Indonesia announced its first case back in early March, the handling of COVID-19 has been described as a mess by many scholars (Bland, 2020; Pisani, 2020). One crucial aspect that became the foundation of this mess is the absence of reliable data that could be used as a reference for accurate policy formulation (Nadzir, 2020). This is even more apparent when in their latest move, Jokowi's administrations pushed the agenda of 'new normal' that encourage Indonesian back to be active despite not being able to contain the spread of the pandemic (Bean, 2020). The lack of reliability from government to handle the pandemic has been responded by various grass roots movements from society. Among which are collective efforts to provide better data that is facilitated by digital media.

For a while, many has questioned the impact of digital technology on actual political and social changes (Gladwell, 2011; Morozov, 2011). In Indonesia, Lim (2013) has pointed out many caveats that limits the impact of Internet mediated activism. These criticism were justified, since Internet per se as a medium should

not be perceived to be inherently progressive (Dean, 2009). Nonetheless, the representation of our world has become so much more mediated nowadays that social media is integral for any social movements. The way Indonesian activists deal with the absence of COVID-19 data, is also not exempted from this phenomenon.

Based on preliminary observations, there are at least three trajectories of data activism that emerges during the spread of COVID-19 in Indonesia (Table 1). To discuss each category specifically, the article will look into three specific cases of data activism: The first form of activism is data storytelling. This is exemplified by the works produced by Edward Suhadi. He is known as a photographer and marketing experts, that back in 2014 also supported Jokowi by creating various creative forms of political campaign (Paraqbueq, 2014). During COVID-19 spread in Indonesia, Suhadi has produced a number of short videos that is intended to educate the public regarding the nature of this virus. To produce these visual contents, Edward referred to number of

articles mainly written from foreign sources such as journalists and scholars.

Table 1. Trajectories of Data Activism

Types of Activism	Actors	Main Sources of Data
Data Storytelling	Individuals	Journalistic Reports, Scientific Reports
Data Hub	Collectives	Government's Official Data, Informative Contents, Scientific Reports
Alternative Data	Collectives	Citizen Reports

The data then is transformed into short videos with compelling visualization. Moreover, these contents were also presented on social media that eventually were shared through various online platforms including social messenger like Whatsapp. In this regard, data activism engaged by Edward Suhadi has mediated the scientific data to have larger outreach for Indonesian audiences.

The concern to educate the danger of COVID-19 is also shared by other people. Among those are the ones that initiated kawalcovid19.id. An information hub, that updates relevant information regarding the development of COVID-19 in Indonesia on daily basis. This second form of data activism focuses more on the creation of information hub. Ainun Najib, one of the initiators of this website, previously was already known for his creation of kawalpemilu.org. An online platform dedicated to provides election data transparency since 2014 (Yusuf, 2014). Similar to kawalpemilu.org, the second platform is aimed as a platform that could become an information hub to help raise awareness among society (Priambodo, 2020).

Their main activity is representing daily updates of COVID-19 in Indonesia. The data is taken from daily official data released by the government. Furthermore, the data then would be presented into graphics and charts that is disseminated through their website and social media account. Aside from official data, their website and social media account also published relevant information considered as necessary to educate

public. The contents from individual creators such as Edward Suhadi and other creative professionals are among those that was also shared on kawalcovid social media accounts. In addition, to also help influencing the policy, kawalcovid teams published their own policy paper. While it does not seem to have much impact on government policies, the platform and social media accounts has become one of the most important sources for COVID-19 information in Indonesia.

Another collective initiate comparable platform on website known as laporcovid19.org. The website is initiated by Irma Hidayana and her colleagues, to provide better data than the one officially announced by government (Najwa, 2020). The website represents the third type of data activism that creates alternative data from the official data. Hidayana, educated with doctorate in public health herself, was concern regarding the official count of COVID-19 patients that she believes does not reflect the number of the true cases. The website thus encourage society to be actively participating in creating a more reliable set of data.

The data of this platform is taken from reports from citizens all over Indonesia that suspects unreported COVID-19 cases in their neighborhood. While the system is far from perfect, these reports could help to map COVID-19 cases that are expected to be much closer to the number of true cases. This effort is even more significant, since Indonesian government has not been able to provide enough testing to COVID-19 suspects comparable to other countries (Hermawan, 2020).

CONCLUSION

These three cases should not be taken as whole representation of data activism related to COVID-19 in Indonesia nor mutually exclusive. As with every effort to categorize, the boundaries between each category are much more fluid and intersect on each other. The digital media as the medium of activism also reinforced these characteristics. Specifically, since the affordances of Internet encourage its users to utilize multiple platforms (e.g. Instagram, Twitter, Facebook) simultaneously, and exchange the contents from one to another. Nonetheless, the examination of these activism is still useful to provide general picture of data based public action in contemporary situation.

The question currently remain is, to what extent these activisms shapes either society or government? Preliminary observation suggests that the outlooks is grim for several reasons. In term of policy making, the government until recently does not prioritize scientific evidence as reference. It is evident, for instance from the way government pushed the narrative of ‘new normal’, while neglecting the evidence regarding the spread of COVID-19 that is still very concerning (“Ahli epidemiologi... , 2020). Therefore, even if data activism is able to improve or provide COVID-19 related data, there is not any guarantee that their work will be incorporated into actual policies formulated by government. At the same time, should data activists focus more to educate public, their existence is

contested by other sources of authority that disregard data, yet have many influences within social media ecosystem. Among which are celebrities and religious figures that propagates conspiracy theories and persuades public to neglect the COVID-19 health protocol. These conditions provide massive challenge for data activism to have a significant and sustainable impact on society. Particularly, since their platforms are most likely accessed by those that already inclines to use data as their reference regarding COVID-19 in Indonesia. Nonetheless, various forms of data activism have set the precedents for future grassroots participations on social and political changes in Indonesia.

REFERENCES

- Ahli epidemiologi: jangan pakai istilah new normal, indonesia itu tidak normal.(2020, June 13). *Kumparan*.
<https://kumparan.com/kumparansains/ahli-epidemiologi-jangan-pakai-istilah-new-normal-indonesia-itu-tidak-normal-1tbVZdZCR9z/full>
- Bean, J. P. (2020, June 11). Indonesia’s “new normal” a disaster in the making. *Asia Times*.
<https://asiatimes.com/2020/06/indonesias-new-normal-a-disaster-in-the-making/>
- Bland, B. (2020, March 17). Indonesia: Covid-19 crisis reveals cracks in Jokowi’s ad hoc politics. *Lowy Institute*.
<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-covid-19-crisis-reveals-cracks-jokowi-s-ad-hoc-politics>
- Dean, J. (2009). *Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism and Left Politics*. Duke University Press.
- Gladwell, M. (2011, February 2). Does Egypt Need Twitter. *The New Yorker*.
<https://www.newyorker.com/news/news-desk/does-egypt-need-twitter>
- Hermawan, A. (2020, April 19). With limited testing capability, Indonesia may battle COVID-19 blindfolded. *The Jakarta Post*.
<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/18/with-limited-testing-capability-indonesia-may-battle-covid-19-blindfolded.html>
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks : Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>
- Morozov, E. (2011). The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. *PublicAffairs*.
<https://doi.org/10.1017/S1537592711004026>
- Nadzir, I. (2020, April 21). Data Transparency and Misinformation of COVID-29 in Indonesia. *Pusat Penelitian Politik LIPI*.
<http://pmb.lipi.go.id/data-transparency-and-misinformation-of-covid-19-in-indonesia/>
- Najwa, M. (2020, April 8). Masyarakat Galang Data Bantu Berantas Corona. *Narasi TV*.
<https://www.narasi.tv/mata-najwa/masyarakat-galang-data-bantu-berantas-corona>
- Paraqbueq, R. (2014, July 28). Bergembira dalam Kampanye. *TEMPO*.
<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/145936/bergembira-dalam-kampanye>
- Pisani, E. (2020, May 10). Indonesia has great data on COVID. Does anyone want to look at it?. *Indonesia ETC*.
<http://indonesiaetc.com/indonesia-has-great-data-on-covid-does-anyone-want-to-look-at-it/>
- Priambodo, Y. (2020, March 14). Kawal Covid19, Lawan Corona dengan Fakta bukan Hoaks - ROSI. *Kompas TV*.
<https://www.kompas.tv/article/71289/kawal-covid19-lawan-corona-dengan-fakta-bukan-hoaks-rosi>
- Yusuf, O. (2014, August 13). Siapakah “Pandawa” di Balik Kawal Pemilu. *Kompas*.
<https://tekno.kompas.com/read/2014/08/13/09050057/Siapakah.Pandawa.di.Balik.Kawal.Pemilu>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN, *BIG DATA ANALYSIS*, DAN *INTERNET OF THINGS*: POTENSI DAN PERANNYA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

(*ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY, BIG DATA ANALYSIS, AND INTERNET OF THINGS: THE POTENTIAL AND THE ROLE TO FIGHT COVID-19 IN INDONESIA*)

Syahrul Mubaroq¹, Inas Mufidatul Insiroh^{2*}

¹Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

*Korespondensi penulis: inas.mufidatul@gmail.com

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has spread throughout the world including Indonesia. The poor prevention and treatment of the initial phase results in a continuing increase in the number of positive cases and mortality caused by this virus. On the other hand, countries that have adopted policies that are fast and appropriate technology have been able to reduce the rate of additional cases and mortality rates. In this paper the authors conduct an analytical study of the application of technologies such as artificial intelligence, big data, and the internet of things in accelerating the detection, prevention, response, and recovery of COVID-19 cases in several countries and their possibilities to be applied in Indonesia. The authors suggest the Indonesian government to apply appropriate policies and technologies to reduce the high growth of COVID-19 cases.

Keywords: *artificial intelligence, big data, COVID-19, internet of things, technology*

Respons pemerintah terhadap pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) di Indonesia berjalan buruk. Penulis mendapati bahwa pemerintah terkesan bersikap mengganggampangkan ketika COVID-19 belum menyebar ke Indonesia. Koordinasi antarlembaga pun dinilai tak berjalan baik (Setyaningrum, 2020). Setelah virus ini masuk dan menyebar ke Indonesia, hingga 8 Juni kasus telah mencapai 32.033 pasien positif, dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 10.498 orang dan pasien meninggal sebanyak 1.883 orang (Gugus

Tugas Percepatan Penanganan, 2020). Pemerintah pun masih bergerak lamban. Pemerintah terlihat masih meraba-raba mekanisme yang tepat untuk menangani pandemi ini.

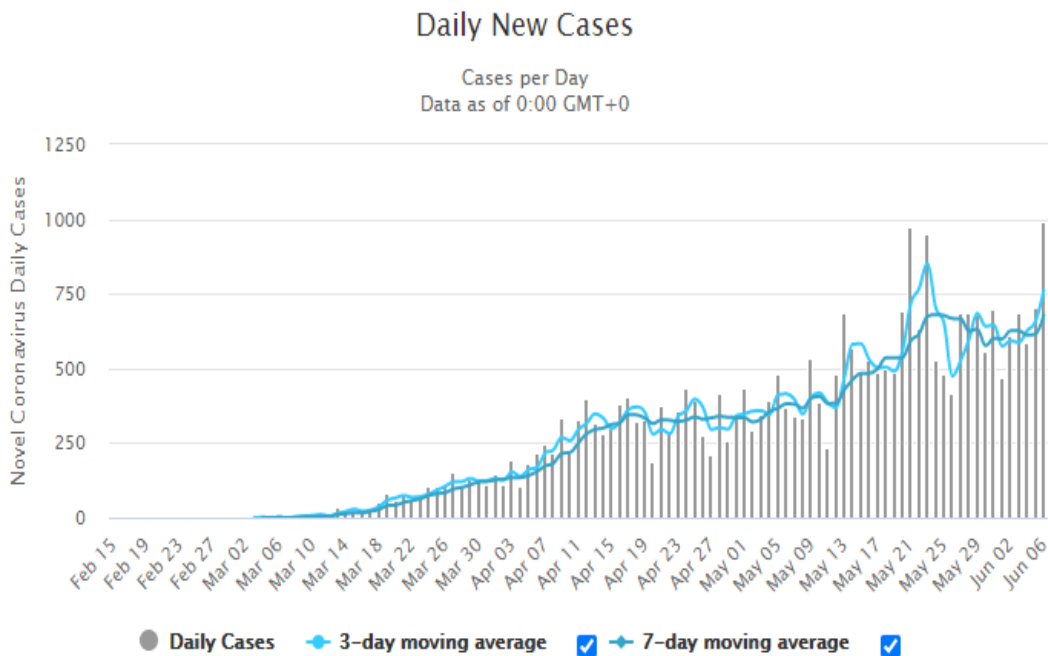
Kekurangan pemerintah dalam menangani pandemi ini terlihat setidaknya dari dua hal: pencegahan dan penanganan. Dari segi pencegahan, ada beberapa hal yang telah penulis lihat sebagai kekurangan. Pertama adalah kurang tanggapnya respons awal pasca pasien

positif pertama terkonfirmasi, seperti lambatnya penetapan kebijakan terkait pembatasan aktivitas maupun pembatasan mobilitas orang. Poin kedua yakni kurang masifnya sosialisasi atau kampanye kepada masyarakat tentang bagaimana dan apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan pandemi ini secara mandiri di awal-awal terjadinya. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang waspada dan masih tetap beraktivitas di luar, meskipun telah dilarang melalui diberlakukannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah (Firdausya, 2020).

Dari segi penanganan, kekurangan pemerintah terletak pada lambatnya penyediaan fasilitas kesehatan khusus untuk menangani kasus COVID-19, baik untuk pengujian maupun untuk perawatan. Untuk pengujian sendiri, baru tersedia 3 unit laboratorium ketika kasus

positif pertama terkonfirmasi. Sedangkan untuk keperluan perawatan, seharusnya dibutuhkan perlengkapan dan ruang isolasi yang memadai bagi pasien positif. Namun ternyata hal tersebut belum mencukupi, antara lain terlihat dari ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis saja yang masih kurang memadai (Bernie, 2020a). Hal ini berakibat pada adanya pasien COVID-19 yang ditelantarkan karena tidak mencukupinya kapasitas rumah sakit. Hal tersebut diperparah dengan lambatnya proses uji swab yang memakan waktu lebih dari 3 hari (Bernie, 2020b), dan berakibat pada terlambatnya penanganan sekaligus proses *tracing* orang-orang yang berinteraksi dengan pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP).

Gambar 1. Tampilan grafik data penambahan kasus harian di Indonesia



Sumber: Worldometers, 2020

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini pun masih kurang efektif dalam menekan laju pertumbuhan jumlah kasus positif. Padahal, di sisi lain, data menunjukkan bahwa jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat hingga saat ini, seperti terlihat pada Gambar 1. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa Indonesia masih belum memiliki kurva epidemi. Kurva epidemi memiliki peran penting

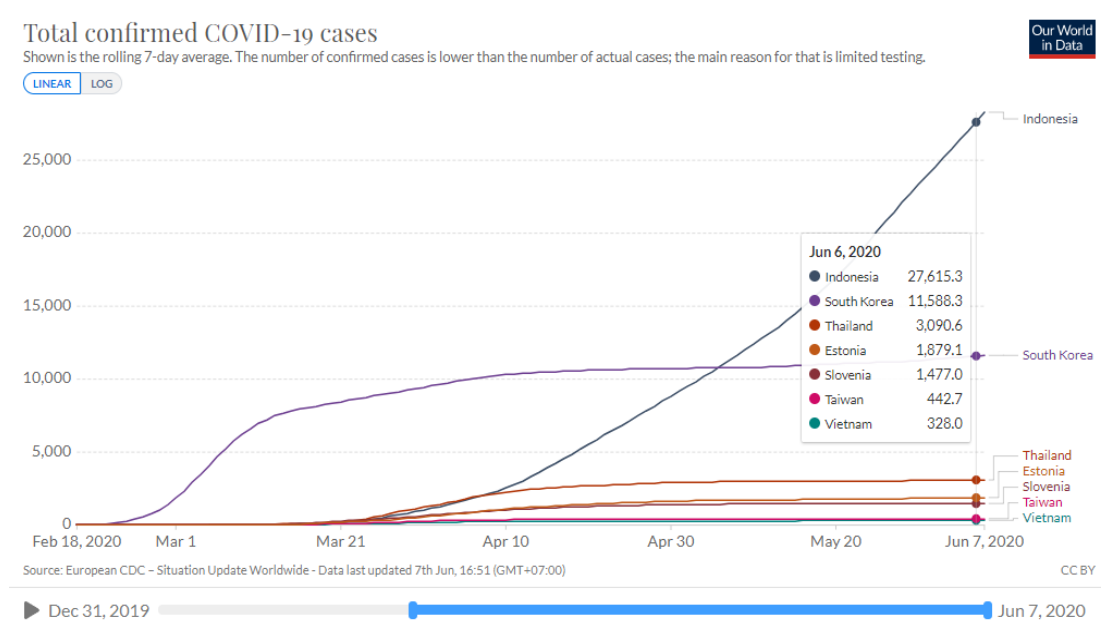
sebagai penunjuk kronologi pandemi, dimulai dari perjalanan pandemi, dimulai dari kapan dan bersumber dari mana, kapan perkiraan puncak pandemi, dan kapan kira-kira pandemi berakhir. Selain itu, kurva ini juga berfungsi untuk menganalisis apakah langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah telah tepat sasaran dan berjalan efektif atau tidak (Elyazar dkk., 2020). Ketiadaan kurva epidemi ini mengakibatkan tidak adanya indikator dan gambaran yang jelas

tentang jumlah kasus. Hal ini kemudian berimbas pada sulitnya proses identifikasi kapan kira-kira kasus akan mulai mengalami penurunan angka dan kapan kasus berakhir.

Dari penjabaran tersebut, pemerintah memerlukan suatu tindakan yang lebih terukur, efektif, serta relevan dibandingkan dengan tindakan yang sekarang telah diambil, setidaknya hingga Indonesia memiliki kurva

epidemik yang sesuai dengan standar keilmuan. Tindakan ini bisa dimulai dengan cara memberikan indikator keberhasilan yang jelas atas kebijakan PSBB yang telah diterapkan di beberapa daerah. Indikator keberhasilan ini diperlukan agar masyarakat tidak bingung apakah kebijakan PSBB tersebut efektif atau tidak dalam menekan laju pertumbuhan kasus positif terinfeksi COVID-19.

Gambar 2. Gambar perbandingan penambahan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di beberapa negara dengan Indonesia



Sumber: Roser dkk., 2020

Seperti terlihat pada Gambar 2, jika dibandingkan dengan negara seperti Korea Selatan, Thailand, Estonia, Slovenia, Taiwan, dan Vietnam, Indonesia masih mengalami kenaikan jumlah kasus yang signifikan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penanganan COVID-19 di Indonesia terbilang masih belum efektif dalam menekan laju pertumbuhan pasien positif. Hingga saat ini, telah ada beberapa negara yang berhasil menangani COVID-19, di mana mekanisme penanganan pandemi yang mereka lakukan bisa diadopsi oleh Indonesia. Dilansir dari Vox.com, beberapa negara yang berhasil tersebut di antaranya adalah Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Slovenia, Yordania, Islandia, Tiongkok, dan beberapa negara lain. Masing-masing negara tersebut memiliki cara yang berbeda dalam menangani, menanggulangi, dan mencegah penyebaran COVID-19, namun mekanisme yang mereka lakukan memiliki beberapa kesamaan, yakni menerapkan pembatasan sosial dengan ketat,

melakukan tes dan *tracing* secara masif kepada penduduk, mengisolasi pasien yang terindikasi positif, memanfaatkan teknologi dalam penanganan COVID-19, melakukan tindakan-tindakan preventif seperti himbuan untuk mengenakan masker kepada para penduduk, bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai info-info terkait perkembangan COVID-19, dan tak sedikit juga negara yang menerapkan *lockdown* (Ward, 2020).

Pemanfaatan Teknologi Untuk Mengatasi Pandemi

Selain menerapkan kebijakan-kebijakan manual di atas, perang melawan pandemi COVID-19 juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tercatat ada beberapa teknologi yang muncul di era revolusi industri 4.0 yang berguna bagi penanganan COVID-19, yakni *artificial intelligence* (AI), *big data*, *internet of things* (IoT), *virtual reality* (VR), *holography*, *cloud computing*, *autonomous robot*, *3D*

scanning, *3D printing*, dan *biosensor* (Javaid dkk., 2020). Dari banyaknya teknologi tersebut, yang sering kali muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan adalah AI, *big data*, dan IoT. Hal ini karena penggunaan tiga teknologi tersebut memiliki cakupan yang luas, baik dari segi fungsi maupun penggunaannya. AI digunakan untuk banyak tujuan, di antaranya deteksi dini dan memprediksi wabah, pembuatan robot, memproduksi *CT scan* yang berguna untuk mendeteksi pneumonia dalam diri seseorang, dan berbagai kegunaan lainnya untuk mendukung sistem jaminan kesehatan. *Big data* digunakan dalam hal melakukan *tracking* dengan data yang bersifat *real time*, serta menganalisis dan memprediksi sejauh mana COVID-19 dapat menginfeksi masyarakat serta apa saja dampaknya. Sedangkan IoT yang terintegrasi dengan *big data* dapat menjadi sumber data *tracing* dan *tracking*. IoT juga berguna untuk mendukung sistem pengawasan warga selama menjalani karantina ataupun pasien saat berada di rumah sakit, serta dapat menjadi sistem pengawasan pembatasan sosial dengan menggunakan *drone* ataupun *Closed Circuit Television* (CCTV) (Javaid dkk., 2020).

Dalam menangani pandemi ini, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang bersifat manual seperti pembatasan sosial dengan ketat, dikombinasikan dengan pengimplementasian teknologi-teknologi di atas. Menurut berbagai sumber, telah ada beberapa mekanisme penanganan atau pencegahan yang memanfaatkan teknologi dalam menghadapi pandemi ini, yakni *location tracking* yang melacak keberadaan dan riwayat perjalanan seseorang melalui data lokasi ponselnya. Cara ini telah dilakukan oleh Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Jerman, dan Italia. Selain itu, *big data analysis* yang terintegrasi dengan *smart CCTV*, media sosial, dan data lainnya yang relevan juga digunakan oleh Tiongkok untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakatnya pada saat *lockdown* di beberapa wilayahnya (Huang dkk., 2020).

Selain Tiongkok, Korea Selatan pun menerapkan teknologi IoT, *big data analysis*, dan AI dalam upaya mengurangi jumlah persebaran virus COVID-19 di masyarakat. Hal ini terbukti efektif, khususnya karena penerapannya dilakukan untuk mengawasi pergerakan masyarakat guna mengetahui daerah mana saja yang dikunjungi oleh warga. Apabila seseorang dinyatakan

positif COVID-19, maka daerah-daerah yang telah dikunjunginya akan diumumkan oleh otoritas terkait melalui laman [coronamap.live](https://www.korea.go.kr/coronamap.live). Masyarakat yang dalam waktu bersamaan ada di tempat tersebut akan diberi tahu untuk melakukan tes COVID-19 secara mandiri di tempat tes yang telah ditentukan, sehingga laju penyebaran bisa ditekan dan kebijakan *lockdown* tidak perlu dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan (Park dkk., 2020).

Mekanisme penanganan Covid-19 selanjutnya yang memanfaatkan teknologi dan *big data* adalah aplikasi ponsel yang bisa diunduh dan diakses secara luas oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi ponsel ini telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, Inggris, dan India. Meskipun teknologi aplikasi yang mereka kembangkan berbeda, namun fungsinya hampir serupa, yakni menginformasikan kepada pengguna apabila mereka ada di dekat orang atau berada di lokasi yang terinfeksi COVID-19.

Selain itu, teknologi AI juga dimanfaatkan dalam menangani pandemi ini. Tiongkok, khususnya rumah sakit Beijing, menggunakan AI untuk mengidentifikasi foto rontgen paru-paru yang terkena COVID-19 (Ting dkk., 2020). Negara ini juga menerapkan sistem pengenalan wajah bagi penduduk yang tidak mengenakan masker. Lebih jauh lagi, Tiongkok juga membuat robot dan *drone* khusus untuk dapat mengendalikan angka infeksi positif COVID-19 ini. Robot digunakan untuk membantu tenaga medis dalam merawat dan mengawasi pasien agar risiko tenaga medis tertular COVID-19 bisa ditekan serendah mungkin. Selain Tiongkok, Singapura juga mengadopsi teknologi ini. Sedangkan *drone* digunakan untuk menertibkan kerumunan dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke rumah masing-masing (Seetharaman, 2020).

Teknologi yang diterapkan di beberapa negara tersebut, khususnya Korea Selatan, seharusnya bisa digunakan di Indonesia, mengingat pemerintah Indonesia tidak melakukan *lockdown*, tetapi memilih menerapkan PSBB di beberapa daerah. Dilihat dari kebutuhannya, pada tahap seperti sekarang ini, pemerintah dapat menerapkan *big data analysis* dengan mengintegrasikan data *tracing* pasien positif COVID-19, data kependudukan, data dari aplikasi PeduliLindungi, data dari CCTV, dan beberapa data yang relevan untuk dapat ditampilkan dalam peta

lokasi yang sebelumnya pernah dikunjungi pasien positif, lalu memberikan peringatan kepada orang-orang yang sedang berada di daerah tersebut, atau yang secara bersamaan sedang berada di daerah tersebut, sehingga mempermudah *tracing* kluster kasus positif COVID-19 dan mengurangi risiko penularan lanjutan. Selain itu, teknologi AI dapat digunakan untuk proses deteksi dini COVID-19 dengan akurasi di atas 70%. Cara ini telah dilakukan pengujiannya di China dengan menganalisis foto rontgen paru-paru (Mei dkk., 2020). Teknologi ini dapat pula dikembangkan di Indonesia mengingat sudah banyak peneliti maupun perusahaan teknologi di Indonesia yang mengembangkan teknologi AI.

Penggunaan teknologi seperti AI, IoT, dan pemanfaatan *big data analysis*, utamanya yang berhubungan dengan data kependudukan, penting untuk dilakukan sebagai salah satu langkah dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Pengaplikasian teknologi-teknologi di atas penting karena berfungsi sebagai pendukung bagi kebijakan-kebijakan serta langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi wabah ini. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara yang berhasil menangani wabah dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat sekaligus didukung dengan pemanfaatan teknologi yang telah kami sebutkan di atas. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), peran teknologi seperti AI ini bahkan bisa menjangkau cakupan yang luas dalam masyarakat. AI bisa membantu kinerja pemerintah, petugas medis, serta masyarakat umum untuk bisa bersama-sama memerangi pandemi. Penggunaan teknologi seperti AI pun dapat dilakukan mulai dari tahap deteksi (*detection*), pencegahan (*prevention*), penanganan (*response*), dan pemulihan (*recovery*) (OECD, 2020).

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menyebar dengan cepat di berbagai daerah dan telah memakan banyak korban jiwa. Beberapa kebijakan telah diimplementasikan, seperti misalnya pembentukan

Gugus Tugas COVID-19, penerapan PSBB, tes swab, *rapid test*, dan beberapa kebijakan lainnya, namun peningkatan jumlah pasien positif masih terjadi. Jika menilik dari bagaimana negara lain berhasil menangani wabah ini, mereka bukan hanya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya manual seperti di atas, melainkan didukung pula dengan penerapan teknologi. Beberapa teknologi yang dipakai adalah AI, IoT, dan *big data*. Pemanfaatan teknologi-teknologi tersebut terbukti efektif untuk membantu mengendalikan COVID-19. Penulis berargumen bahwa pemerintah Indonesia pun perlu menerapkan teknologi-teknologi yang relevan dengan apa yang Indonesia butuhkan, seperti mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah; mengembangkan IoT dalam sistem *tracing*, *tracking*, dan pengawasan pasien positif, ODP, dan PDP; serta mengintegrasikan data kependudukan dan data-data terkait COVID-19 untuk kemudian dijadikan sistem *big data*, yang hasilnya dapat dianalisis untuk membuat kebijakan serta menjadi dasar informasi kepada masyarakat guna menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19. Selain itu, mengembangkan dan menerapkan teknologi AI di bidang medis, khususnya diagnosis serta di bidang kesehatan masyarakat dapat mempermudah dan mengefisienkan penanganan COVID-19.

Pemanfaatan teknologi tersebut penting untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena mampu mendukung pengimplementasian kebijakan yang sifatnya manual seperti PSBB. Bahkan, pengimplementasian teknologi yang telah kami jelaskan tadi juga dapat mendukung langkah pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 pada tahap deteksi, penanganan, pencegahan, dan pemulihan. Implementasi kebijakan pembatasan sosial yang ketat, disertai dengan pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, dan *big data* terbukti efektif dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di negara lain. Jika Indonesia turut mengadopsi cara tersebut dengan langkah yang tepat, konsisten, dan disiplin, tidak menutup kemungkinan angka penularan atau kenaikan jumlah pasien positif dapat dikendalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernie, M. (2020a, Maret 24). APD Tak Merata, Tenaga Kesehatan di Daerah Jalani “Misi Bunuh Diri”. *Tirto.id*. <https://tirto.id/apd-tak-merata-tenaga-kesehatan-di-daerah-jalani-misi-bunuh-diri-eG83>
- _____. (2020b, Mei 8). *Di Balik Rumitnya Penentuan Skala Prioritas Tes Swab COVID-19*. *tirto.id*. <https://tirto.id/di-balik-rumitnya-penentuan-skala-prioritas-tes-swab-covid-19-fnjh>
- Elyazar, I., Lestari, K. D., Ekawati, L. L., & Lina, R. N. (2020, Mei 8). *Indonesia belum punya kurva epidemi COVID-19: Kita harus hati-hati membaca klaim pemerintah kasus baru melambat*. *The Conversation*. <http://theconversation.com/indonesia-belum-punya-kurva-epidemi-covid-19-kita-harus-hati-hati-membaca-klaim-pemerintah-kasus-baru-melambat-137497>
- Firdausya, I. (2020, Maret 17). Mendikbud Sesalkan Masih Banyak Warga Beraktivitas di Luar Rumah. *Media indonesia* <https://mediaindonesia.com/read/detail/297129-mendikbud-sesalkan-masih-banyak-warga-beraktivitas-di-luar-rumah>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan. (2020). *Peta Sebaran | Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Huang, H., Peng, Z., Wu, H., & Xie, Q. (2020). A big data analysis on the five dimensions of emergency management information in the early stage of COVID-19 in China. *Journal of Chinese Governance*, 5(2), 213–233. <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1744923>
- Javaid, M., Haleem, A., Vaishya, R., Bahl, S., Suman, R., & Vaish, A. (2020). Industry 4.0 technologies and their applications in fighting COVID-19 pandemic. *Diabetes & Metabolic Syndrome. Clinical Research & Reviews*, 14(4), 419-422. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.032>
- Mei, X., Lee, H.-C., Diao, K., Huang, M., Lin, B., Liu, C., Xie, Z., Ma, Y., Robson, P. M., Chung, M., Bernheim, A., Mani, V., Calcagno, C., Li, K., Li, S., Shan, H., Lv, J., Zhao, T., Xia, J., ... Yang, Y. (2020). Artificial intelligence-enabled rapid diagnosis of patients with COVID-19. *Nature Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0931-3>
- Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2020) *Using artificial intelligence to help combat COVID-19*. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/using-artificial-intelligence-to-help-combat-covid-19-ae4c5c21/>
- Park, S., Choi, G. J., & Ko, H. (2020). Information Technology-Based Tracing Strategy in Response to COVID-19 in South Korea—Privacy Controversies. *JAMA*, 323(21), 2129. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.6602>
- Roser, M., Ritchie, H., Ortiz-Ospina, E., & Hasell, J. (2020). Coronavirus Pandemic (COVID-19). *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/coronavirus/country/indonesia>
- Seetharaman, G. (2020, March 29). Technology against coronavirus: How countries are using technology to fight coronavirus. *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/how-countries-are-using-technology-to-fight-coronavirus/articleshow/74867177.cms>
- Setyaningrum. (2020, April 29). Nilai Buruk Penanganan Corona di Indonesia, Pakar Beberkan Kekurangan Pemerintah. *Warta Ekonomi*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read283332/nilai-buruk-penanganan-corona-di-indonesia-pakar-beberkan-kekurangan-pemerintah>
- Ting, D. S. W., Carin, L., Dzau, V., & Wong, T. Y. (2020). Digital technology and COVID-19. *Nature Medicine*, 26(4), 459–461. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0824-5>
- Ward, A. (2020, Mei 5). Vietnam, Slovenia, and 3 other overlooked coronavirus success stories. *Vox*. <https://www.vox.com/2020/5/5/21247837/coronavirus-vietnam-slovenia-jordan-iceland-greece>
- Worldometers. (2020). Indonesia Coronavirus: 32,033 Cases and 1,883 Deaths. *Worldometer*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>

PANDUAN PENULISAN

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah diunggah secara daring (online) melalui website <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jki>. Penulis harus login untuk dapat mengunggah naskah tersebut. Pendaftaran secara daring (online) tidak dikenakan biaya apapun.
2. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
3. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
5. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
6. Dalam 1 edisi JKI tidak menerbitkan lebih dari 1 artikel dengan penulis yang sama (baik sebagai penulis utama atau pendamping).
7. Penulis (baik sebagai penulis utama atau pendamping) yang telah terbit dalam 1 edisi, maka artikel berikutnya dapat terbit kembali pada edisi ketiga setelah terbit. Contoh: artikel penulis A terbit di JKI pada **Juni 2018**, maka penulis tersebut dapat diterbitkan kembali paling cepat **Desember 2019**.
8. Outline dan isi naskah terdiri dari dua jenis sebagai berikut:
9. Outline dan isi naskah terdiri dari dua jenis sebagai berikut :

I. Untuk manuskrip yang merupakan **hasil kajian literatur** menggunakan outline sebagai berikut :

1. **Judul** ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata. Identitas penulis yang diletakkan di bawah judul meliputi nama dan lembaga penulis serta alamat email.
2. **Abstrak** dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 150-200. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
3. **Pendahuluan** yang berisi justifikasi isu yang diangkat dalam artikel, maksud/tujuan artikel, pendekatan dan metode yang digunakan.
4. **Batang tubuh/inti artikel** berisi kupasan, analisis, argumentasi, dan komparasi penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
5. **Kesimpulan** berisi bahasan tentang hal-hal penting dari temuan. Kesimpulan dapat ditambahkan saran-saran atau rekomendasi berkaitan dengan persoalan yang menjadi temuan.
6. **Tampilan tabel, gambar atau grafik** harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.

II. Untuk manuskrip yang merupakan **hasil penelitian** menggunakan outline sebagai berikut :

1. **Judul** ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata. Identitas penulis yang diletakkan di bawah judul meliputi nama dan lembaga penulis serta alamat email.
2. **Abstrak** dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 150-200. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
3. **Pendahuluan** yang berisi justifikasi isu yang diangkat dalam artikel, dan maksud/tujuan artikel.
4. **Metodologi** yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan (kuantitatif dan atau kualitatif), model dan variabel yang digunakan serta sumber data yang digunakan. Apabila menggunakan data primer, jelaskan metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan analisa data yang digunakan.
5. **Batang tubuh/inti artikel** berisi kupasan, analisis, argumentasi, dan komparasi penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
6. **Kesimpulan** berisi bahasan tentang hal-hal penting dari temuan. Kesimpulan dapat ditambahkan saran-saran atau rekomendasi berkaitan dengan persoalan yang menjadi temuan.
7. **Tampilan tabel, gambar atau grafik** harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.

III. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)

IV. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Buku

O'Keefe, J. H., Bell, D. S. H., & Wyne, K.L. (2009). *Diabetes essentials*. Jones and Bartlett Publishers.

Bunga Rampai

Friedman, S. L., & Wachs, T. D. (Editor). (1999). *Measuring environment across the life span: Emerging methods and concepts*. American Psychological Association.

Electronic Book

De Lara, M., & Doyen, L. (2008). *Sustainable management of natural resources: Mathematical models and methods*. Diakses dari <http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-3-540-79073-0>

Ardia, D. (2008). Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models: Theory and applications. doi: 10.1007/978-3-540-78657-3

Bagian dari Buku

Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. Dalam A. C. Gaw (Editor), *Culture, ethnicity, and mental illness* (pp. 517-552). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Scott, D. (2005). Colonial governmentality. Dalam J. X. Inda (Editor), *Anthropologies of modernity* (pp. 21-49). Diakses dari <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117909832>

Iacono, W. G. (2008). Polygraph testing. Dalam E. Borgida & S. T. Fiske (Editor), *Beyond common sense: Psychological science in the courtroom* (pp. 219-235). doi: 10.1002/9780470696422

Artikel Jurnal

Skenderian, J. J., Siegel, J. T., Crano, W. D., Lac, A., & Alvaro, E. E. (2008). Expectancy change and adolescents' intentions to use marijuana. *Psychology of Addictive Behaviors*, 22, 563-569. <https://doi.org/10.1037/a0013020>

Williams, S., & Beattie, H. J. (in press). Problem-based learning in the clinical setting – a systematic review. *Nurse Education Today*.

Makalah/Artikel Daring

Fallon, A., & Engel, C. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. *The Practising Midwife*, 11(9), 1-27. Diakses dari <http://www.practisingmidwife.co.uk>

Makalah Seminar

Bowden, F.J., & Fairley, C.K. (1996, June). *Endemic STDs in the Northern Territory: Estimations of effective rates of partner change*. Makalah dipresentasikan pada the Scientific Meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin.

Laporan

Queensland Health. (2005). *Health systems review. Final report*. Brisbane, Australia: Queensland Government.

Australian Institute of Health and Welfare. (2010). *Child protection Australia 2008-09 (Report No. CWS 35)*. Diakses dari <http://www.aihw.gov.au/publications/cws/35/10859.pdf>

Tesis/Disertasi

Axford, J.C. (2007). *What constitutes success in Pacific island community conserved areas?* (Disertasi, University of Queensland, Brisbane, Australia). Diakses dari <http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747>

Set Data

Pew Hispanic Center. (2004). *Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media* [Data file and code book]. Retrieved from <http://pewhispanic.org/datasets/>

Laman dengan Penulis

Atherton, J. (2005). *Behaviour modification*. Retrieved from http://www.learningandteaching.info/learning/behaviour_mod.htm

Winther, M. (2009, January 14). *The unconscious is spirit* [Online forum comment]. Retrieved from <http://groups.google.com/group/alt.psychology.jung/topics?lnk>

Laman tanpa Penulis

Behaviour modification. (2007). Retrieved from <http://www.educational-psychologist.org.uk/behaviour.html>

Manuskrip

Johnson, A. (2008). *Week three: Foucault* [Powerpoint slides]. Unpublished manuscript, BESC1001, University of Queensland, St Lucia, Australia.

7. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

ISSN 1907-2902



9 771907 290214